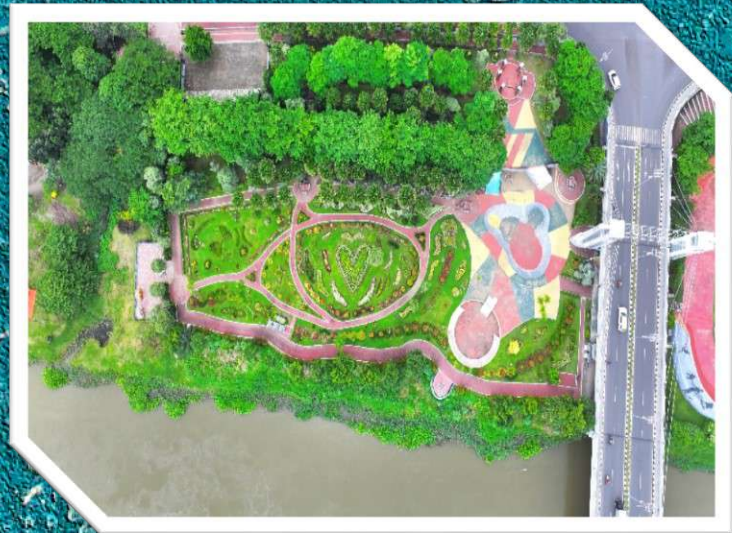




**PEMERINTAHAN
KOTA KEDIRI**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025**



LAMBANG

KOTA KEDIRI

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD sementara Kota Besar Kediri tgl. 30-3-1952 No. 22/DPRD-S/52 dan tgl. 21-IX-1953 No. 16/DPRD-S/53 yang menetapkan suatu lambang (Wapen) untuk Daerah Kota Besar Kediri, dan Surat Keputusan tersebut telah disahkan oleh Surat Keputusan Presiden RI No. 127/1954 dimuat dalam Berita Negara tahun 1954 No. 57.





1. Makna Lambang

Tertera dalam lambang:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Buto Locoyo | 5. Padi dan Kapas |
| 2. Perisai | 6. Dewi Kilisuci |
| 3. Macan Putih (Sri Aji Joyoboyo) | 7. Pita "Djojo ing Bojo" |
| 4. Bunga Melati | 8. Sayap berbulu 17 dan 8 dan ekor
berbulu 4 dan 5 |

Penjelasan:

- Buto locoyo (Ki Ageng Dhoho)** patih yang setia, teguh dan jujur dari Sri Aji Joyoboyo, penjaga Kota Kediri, lambang Kesetiaan, Keteguhan dan Kejujuran.
- Perisai**, lambang Pertahanan;
- Macan Putih (Sri Aji Joyoboyo)** Raja Pujangga ahli nujum ternama dari Kediri, lambang Waspada;
- Bunga Melati**, bunga nasional (Bunga Pusaka Indonesia) berdaun lima lambang Pancasila;
- Padi dan Kapas**, lambang Kemakmuran;
- Dewi Kilisuci** namanya sesuai dengan jiwanya. Ia bertapa untuk kepentingan saudaranya yang diberi haknya untuk memimpin rakyatnya (dia lapar untuk orang lain), lambang tidak mementingkan diri sendiri;
- Pita "Djojo ing Bojo"** adalah bahan pengikat atau mempersatukan, lambang Persatuan;
- Sayap dan ekor** berbulu 17, 8, 4 dan 5 atau 17-8-1945, lambang Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia
- Warna** Dengan Keberanian, Kesucian, dan Penderitaan dapat tercapai hasil yang gilang gemilang.
- Lambang** Kediri tetap Waspada dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan Keberanian, Kesucian, Keteguhan dan tidak takut Penderitaan untuk mencapai hasil yang Gilang Gemilang (Aman dan Makmur).





KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan Hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Kediri Tahun 2025 tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan bagi Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Kota Kediri dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di waktu yang akan datang dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Regulasi penyusunan LPPD yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan menyajikan capaian kinerja makro, IKK hasil (outcome) urusan Pemerintahan wajib dan pilihan, IKK fungsi penunjang urusan Pemerintahan, serta substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan laporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 ini adalah tahun keempat periode kedua dimana Pemerintah Kota Kediri telah memperkenalkan "Kota Kediri MAPAN" sebagai sebuah brand Kota Kediri dimana *tagline* tersebut memiliki makna: **Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni**. Konsep ini bertujuan menciptakan kemajuan fisik dan infrastruktur, didukung oleh penguatan mental-spiritual (agamis), kreativitas warga (produktif), kondusifitas (aman), serta kenyamanan kota.





Kami menyadari bahwa selama penyelenggaraan pemerintahan ini tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun, munculnya inovasi serta rekomendasi dari Pemerintah maupun masyarakat senantiasa kami harapkan. Semuanya demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kediri ke depan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan dan kerjasamanya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kediri Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Akhir kata kami berharap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang telah disusun ini dapat dijadikan motivasi serta komitmen bersama untuk meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan otonomi daerah di Kota Kediri agar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kota Kediri dapat terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan pada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Aamiin ya.

Kediri, 17 Maret 2026



VINANDA PRAMESWATI, S.H.M.Kn.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.1.1 Penjelasan Umum..... 2

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 13

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... 19

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 27

2.1 Capaian Kinerja Makro..... 27

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia..... 27

2.1.2 Angka Kemiskinan..... 29

2.1.3 Angka Pengangguran 30

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi..... 31

2.1.5 Pendapatan Per Kapita 31

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... 34

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil..... 35

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan..... 47

2.3 Capaian Kinerja 50

2.3.1 Skala Capaian Kinerja..... 51

2.3.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 52

2.3.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu 64

2.3.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi 78

2.3.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada)..... 86

2.3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 91

2.3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 169

2.3.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 198

2.4 Realisasi Anggaran 278

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 284

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL 301

4.1 URUSAN BIDANG PENDIDIKAN 301

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 301

4.1.2 Target Pencapaian SPM Kota Kediri Bidang Urusan Pendidikan 301

4.2 URUSAN BIDANG KESEHATAN..... 307

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar 307

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah..... 308

4.2.3 Alokasi Anggaran..... 309

4.2.4 Dukungan Personil 309

4.2.5 Hasil Capaian 310

4.2.6 Permasalahan dan Solusi..... 336

4.3 URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM..... 336

4.4 URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT..... 342

4.5 URUSAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 350

4.6 URUSAN BIDANG SOSIAL..... 367

4.7 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 379

4.7.1 URUSAN BIDANG PENDIDIKAN 379

4.7.2 URUSAN BIDANG KESEHATAN..... 408

BAB V PENUTUP 447



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Tuntutan terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin besar. Pemerintah mengeluarkan berbagai aturan tentang akuntabilitas pada bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun pelaporan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan amanat Pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan digunakan sebagai bahan evaluasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, apabila Kepala Daerah tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) akan dikenai sanksi

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Kediri menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang memuat tentang Kinerja Makro, IKK hasil (*outcome*) urusan wajib dan pilihan, serta IKK fungsi penunjang urusan Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga



pemerintah non kementerian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan ini disusun dengan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan daerah, Kota Kediri dibentuk dan ditetapkan sebagai Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

b. Data Geografis Wilayah

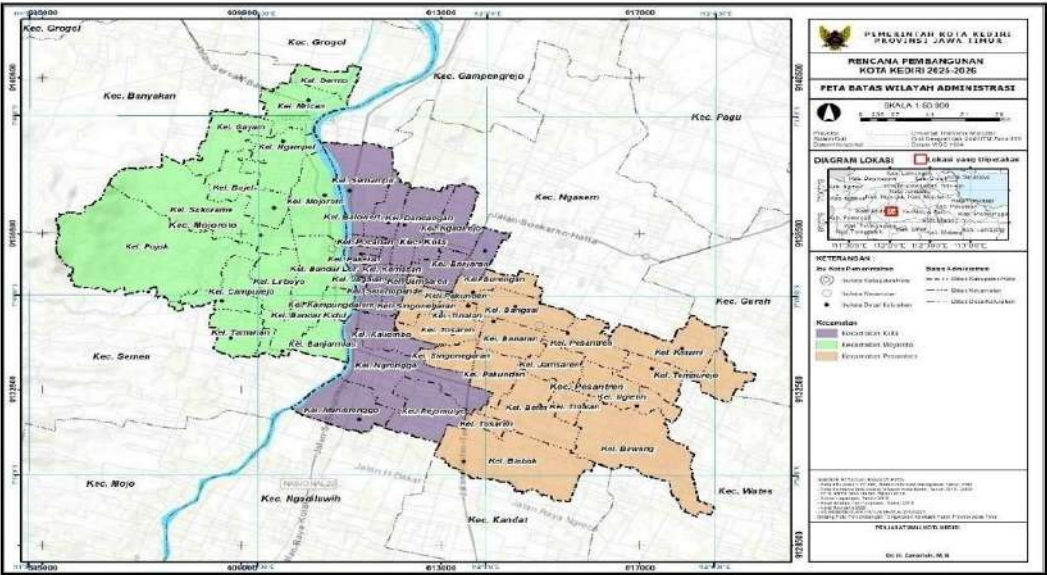
Secara geografis, Kota Kediri terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada antara $111^{\circ}57'$ - $112^{\circ}04'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}46'$ - $7^{\circ}52'$ Lintang Selatan dengan luas 67,1995 km². Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%. Secara administratif,



Kota Kediri terbagi menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, dengan luasan masing - masing kecamatan adalah Kecamatan Mojoroto sebesar 26,9335 km² terdiri dari 14 kelurahan, Kecamatan Kota sebesar 15,9501 Km² terdiri dari 17 kelurahan, dan Kecamatan Pesantren sebesar 24,3159 Km² terdiri dari 15 kelurahan, total terdiri dari 46 Kelurahan, berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kec. Wates dan Kec. Gurah
- Sebelah Barat : Kec. Banyakan dan Kec. Semen
- Sebelah Selatan : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih
- Sebelah Utara : Kec. Gampengrejo, Kec. Ngasem dan Kec. Grogol

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kota Kediri



Sumber: RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

Kondisi topografi wilayah Kota Kediri relatif datar, yaitu dengan ketinggian rata-rata 71 meter di atas permukaan laut dan sebagian besar merupakan dataran rendah dengan kemiringan antara 0- 2% seluas 5,737 Ha atau 90,49%. Mayoritas ketinggian wilayah Kota Kediri (80,17%) berada pada 63m sampai 100m dari permukaan laut yang terletak sepanjang sisi kiri dan kanan Kali Brantas. Ketinggian antara 15-40% berada di kawasan Gunung Maskumambang dengan ketinggian 300 mdpl dan Gunung Klotok 672 mdpl di bagian barat Kecamatan Mojoroto. Untuk Kecamatan Kota kondisi topografinya mayoritas berada pada kemiringan 0-2%.



Untuk Kecamatan Pesantren kondisi topografi wilayah relatif datar, yaitu pada kemiringan antara 0 s/d 15% dengan ketinggian lebih kurang 67 mdpl.

Sungai Brantas mengalir dari selatan ke utara sepanjang 7 Km, memisahkan wilayah Kota Kediri. Wilayah barat sungai menjadi wilayah Kecamatan Mojoroto, sedangkan timur sungai terdiri dari Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Kota.

Secara Geologi Kota Kediri terbagi atas berbagai macam jenis batuan dan tanah. Sebagian wilayah Kecamatan Mojoroto memiliki endapan alluvium yang terdiri atas elemen kerakal, kerikil, pasir lempung, lumpur, dan sisa tumbuhan. Bahannya berwarna kelabu-kuning keruh-kehitaman, mudah lepas atau gembur. Pada wilayah Kecamatan Kota, jenis batuan yang ada adalah tuf vulkan intermedier dengan kedalaman lebih dari 25 cm dan bertekstur tanah halus. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Pesantren, berdasarkan jenis batuan termasuk dalam jenis batuan endapan lahar yang sebagian besar dari Gunung Kelud dan sebagian kecil dari Gunung Anjasmara dan Gunung Kawi-Butak. Jenis tanah di wilayah Kota Kediri adalah alluvial coklat kelabu dan mediteran.

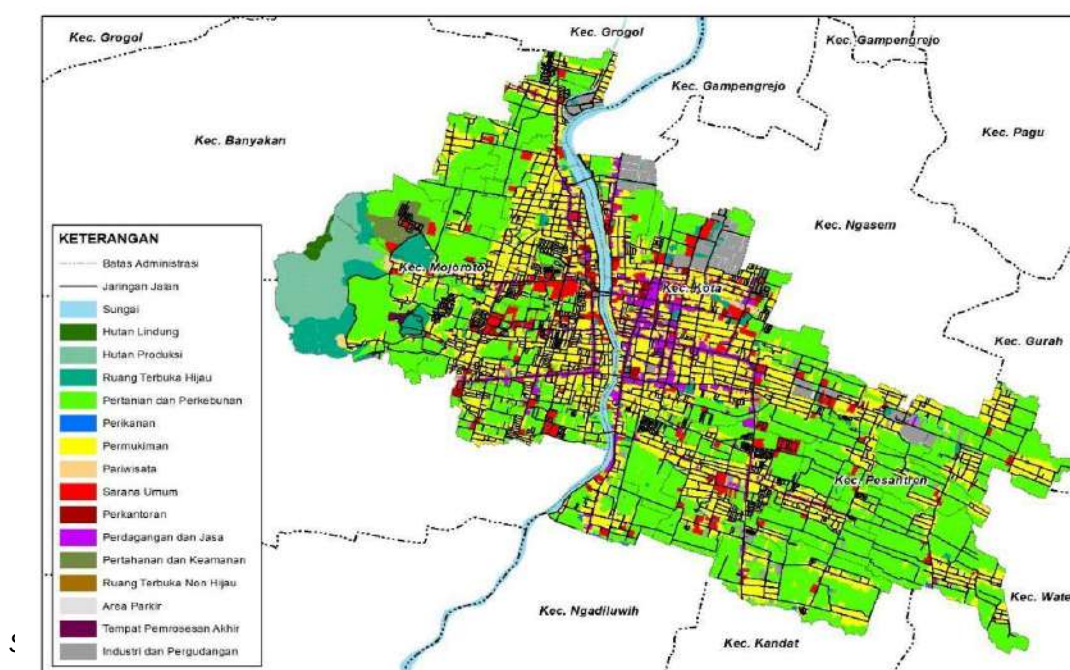
Keberadaan Sungai Brantas yang berada di tengah-tengah kota Kediri, mengalir dari arah selatan ke arah utara. Kota Kediri juga dilalui beberapa sungai yang mengalir menuju Sungai Brantas. Sungai tersebut antara lain :

1. Sungai Kresek sepanjang 5,87 km Kecamatan Pesantren;
2. Sungai Parang 3,00 km Kecamatan Mojoroto;
3. Sungai Kedak 5,84 km Kecamatan Mojoroto;
4. Sungai Ngampel 1,38 km Kecamatan Mojoroto;
5. Sungai Tawang 7,46 km Kecamatan Kota; dan
6. Sungai Bruno 1,93 km Kecamatan Mojoroto

Penggunaan lahan di wilayah Kota Kediri cenderung mengikuti pola yang berkembang secara linier mengikuti jalan-jalan utama kota.



Gambar 1.2
Penggunaan Lahan Kota Kediri



Penggunaan Lahan di Kota Kediri bisa dilihat lebih jelas menurut Kecamatan dimana 63% dari Total Lahan di Kecamatan Kota dimanfaatkan untuk perkantoran, perdagangan jasa, industri, pemukiman dan wisata kota, sedangkan sisanya untuk pemanfaatan Persawahan, Fasilitas umum dan sosial serta lahan kosong . Untuk Kecamatan Mojoroto pemanfaatan lahan masih didominasi oleh Persawahan, tanah Kosong dan Hutan sebesar 67,48% sedangkan 32,52% digunakan untuk pendidikan, home industri, industri, pariwisata dan pertanian serta pemukiman. Untuk Kecamatan Pesantren, dominasi penggunaan lahannya sama dengan Kecamatan Mojoroto yaitu sebesar 58,81% dan untuk sisanya dimanfaatkan untuk perkantoran, industri, home industri, permukiman serta pertanian.

c. Jumlah Penduduk

Modal Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pembangunan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan yang berwawasan kependudukan akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan

Secara administratif, penduduk Kota Kediri pada tahun 2025 tercatat berjumlah 302.010 jiwa, mengalami kenaikan sebesar 0,86 % jika dibandingkan dengan tahun 2025. Kenaikan jumlah tersebut disebabkan karena perpindahan penduduk dan



selisih antara jumlah kelahiran dan kematian. Dengan luas wilayah sebesar 67,1995/Km², kepadatan penduduk Kota Kediri pada tahun 2025 sebesar 4.354 jiwa/Km². Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kota sebesar 90.896 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Mojoroto sebesar 117.448 jiwa/km² dan Kecamatan Pesantren sebesar 93.080 jiwa/km². Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas perekonomian akibat kegiatan perdagangan dan jasa dan sebagai pusat pelayanan di Kecamatan Kota menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk karena mobilitas penduduk, selain pertumbuhan secara alami.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kota Kediri pada tahun 2025 lebih kecil dari penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan komposisi 149.916 jiwa penduduk laki-laki dan 152.094 jiwa penduduk perempuan . Komposisi penduduk Kota Kediri pada tahun 2025 menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

NO	USIA	MOJOROTO			KOTA			PESANTREN			JUMLAH			%
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1	0-4	3.493	3.357	6.850	2.512	2.410	4.922	2.783	2.558	5.341	9.427	8.859	18.286	6,07%
2	5- 9	4.496	4.168	8.664	3.287	3.154	6.441	3.495	3.304	6.799	11.186	10.682	21.868	7,25%
3	10 - 14	5.001	4.666	9.667	3.722	3.479	7.201	3.893	3.603	7.496	12.887	12.021	24.908	8,26%
4	15 - 19	4.796	4.735	9.531	3.614	3.357	6.971	3.706	3.731	7.437	12.387	12.045	24.432	8,11%
5	20 - 24	4.758	4.727	9.485	3.555	3.427	6.982	3.813	3.726	7.539	12.208	11.959	24.167	8,02%
6	25 - 29	4.284	4.393	8.677	3.398	3.333	6.731	3.556	3.558	7.114	11.008	11.000	22.008	7,30%
7	30 - 34	4.231	4.195	8.426	3.209	3.173	6.382	3.207	3.196	6.403	10.283	10.20	20.485	6,80%
8	35 - 39	3.987	3.956	7.943	2.981	3.054	6.035	3.059	3.022	6.081	10.298	10.333	20.631	6,84%
9	40 - 44	4.921	4.944	9.865	3.835	3.812	7.647	3.815	3.850	7.665	12.771	12.696	25.467	8,45%
10	45 - 49	4.551	4.381	8.932	3.506	3.334	6.840	3.644	3.562	7.206	11.421	11.060	22.481	7,46%
11	50 - 54	3.925	3.818	7.743	2.989	2.953	5.942	3.153	3.144	6.297	9.889	9.744	19.633	6,51%
12	55 - 59	3.281	3.496	6.777	2.523	2.826	5.349	2.770	2.784	5.554	8.733	9.491	18.224	6,05%
13	60 - 64	2.603	3.060	5.663	2.052	2.633	4.685	2.159	2.525	4.684	6.359	7.653	14.012	4,65%
14	65 - 69	1.928	2.218	4.146	2.052	2.633	4.685	1.609	1.803	3.412	5.082	5.970	11.052	3,67%
15	70 - 74	1.144	1.385	2.529	1.712	2.095	3.807	993	1.130	2.123	3.011	3.588	6.599	2,19%
16	70-74	1.144	1.385	2.529	1.109	1.428	2.537	903	1.314	2.217	2.733	4.438	7.171	2,38%
TOT		58.372	59.076	117.448	44.88	46.015	90.89	46.430	46.650	93.080	149.916	152.094	302.010	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri 2025
Pada Tabel 1.1 dan menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Kota Kediri masih didominasi oleh penduduk usia produktif yakni usia 15 tahun hingga 64 tahun sebanyak 209.388 jiwa atau sekitar 70,19% dari total jumlah penduduk. Kota Kediri saat ini mengalami bonus demografi atau jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding



usia non produktif, dimana hal tersebut merupakan modal dalam pembangunan, sehingga dalam memaksimalkannya Pemerintah Kota Kediri telah bekerjasama dengan beberapa pihak swasta guna membuka peluang investasi sehingga membuka lapangan pekerjaan.

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kota Kediri didominasi oleh tingkat Pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 90.247 dari jumlah penduduk di Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri terus meningkatkan tingkat Pendidikan penduduk sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Kediri yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapaun komposisi penduduk Kota Kediri berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	MOJOROTO			KOTA			PESANTREN			JUMLAH		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	10.003	9933	20.233	7858	7517	15.375	8397	7097	16,394	26.258	24.547	50.805
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	4.760	4.824	9.584	3.665	3.594	7.259	3.765	3.715	7.480	12.190	12.133	24.323
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	6.464	8.296	14.760	4.228	5.829	10.057	6.273	7.646	13.919	16.965	21.771	38.736
4	SLTP/SEDERAJAT	9.519	9.666	19.185	7.541	7.710	15.251	8.186	8.239	16.425	25.246	25.615	50.861
5	SLTA/SEDERAJAT	19.713	17.190	36.903	15.506	14.241	29.747	14.997	13.443	28.440	50.216	44.874	95.090
6	DIPLOMA I/II	292	486	778	247	392	639	223	352	575	762	1.230	1.992
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	883	1.437	2.320	772	1.055	1.827	647	954	1.601	2.302	3.446	5.748
8	DIPLOMA IV/STRATA I	5.920	6.826	12.746	4.670	5.422	10.092	3.770	4.202	7.972	14.360	16.450	30.810
9	STRATA II	566	504	1.070	407	330	737	286	251	537	1.259	1.085	2.344
10	STRATA III	19	15	34	28	17	45	14	11	25	61	43	104
TOTAL		58.13	59.17	117.61	44.92	46.10	91.02	46.55	45.91	76.99	149.6	151.19	300.81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri 2025

Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Kediri pada tahun 2025 yaitu 1,001% atau jumlah penduduk kota Kediri tahun 2025 yaitu 302.010 Jiwa.

Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Kediri dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Kediri Tahun 2020 - 2025

Uraian	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk	292.262	292.597	294.692	298.820	301.424	302.010



Tingkat Pertumbuhan Penduduk	0,009	0,001	0,007	0,014	1,008	1,001
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

d. Jumlah kecamatan dan kelurahan

Secara administratif wilayah Kota Kediri terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kota, dan Pesantren. Kecamatan Mojoroto terdiri atas 14 kelurahan, Kecamatan Kota 17 kelurahan, dan Kecamatan Pesantren 15 kelurahan. Secara keseluruhan di Kota Kediri terdapat 46 kelurahan.

Tabel 1.5
Data Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Mojoroto		Kecamatan Kota		Kecamatan Pesantren	
1	Bujel	1	Banjaran	1	Bangsai
2	Banjarmelati	2	Balowerti	2	Banaran
3	Bandar Kidul	3	Dandangan	3	Bawang
4	Bandar Lor	4	Jagalan	4	Betet
5	Campurejo	5	Kaliombo	5	Blabak
6	Dermo	6	Kampung Dalem	6	Burengan
7	Gayam	7	Kemasan	7	Jamsaren
8	Lirboyo	8	Manisrenggo	8	Ketami
9	Mrican	9	Ngadirejo	9	Ngletih
10	Mojoroto	10	Ngronggo	10	Pakunden
11	Ngampel	11	Pakelan	11	Pesantren
12	Pojok	12	Pocanan	12	Singonegaran
13	Sukorame	13	Rejomulyo	13	Tempurejo
14	Tamanan	14	Ringin Anom	14	Tinalan
		15	Semampir	15	Tosaren
		16	Setono Gedong		
		17	Setono Pande		

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, jumlah perangkat daerah adalah 28 (Dua Puluh Delapan) Perangkat Daerah terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas terdiri dari 17 Dinas yaitu :
 - 4.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4.2 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - 4.3 Dinas Perhubungan
 - 4.4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 4.5 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 - 4.6 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
 - 4.7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 4.8 Dinas Kesehatan
 - 4.9 Dinas Pendidikan
 - 4.10 Dinas Sosial
 - 4.11 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
 - 4.12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 4.13 Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 4.14 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 - 4.15 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - 4.16 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - 4.17 Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan terdiri dari 5 Badan, yaitu:
 - 5.1 Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 5.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 5.3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 5.4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 5.5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kecamatan terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu :
 - 6.1 Kecamatan Mojoroto
 - 6.2 Kecamatan Kota



6.3 Kecamatan Pesantren

Jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara di Kota Kediri Tahun 2025 berjumlah 2107 orang. Struktur ASN ini menjadi modal dasar besar bagi pengembangan kinerja aparatur negara. Berbagai bentuk pelatihan sebenarnya sudah banyak dilakukan baik untuk tingkat pejabat maupun staf, tetapi orientasi pelatihan lebih banyak pada peningkatan kapasitas intelektual dan belum pada perubahan mindset birokrasi. Begitu pentingnya pelatihan perubahan *mindset* birokrasi, sehingga menjadi salah satu area perubahan dalam program reformasi birokrasi. *Mindset* aparatur birokrasi menjadi penentu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima. Berikut ini merupakan rincian data ASN menurut tingkat pendidikan di Kota Kediri :

Tabel 1.6
Data Pegawai Pemerintah Kota Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2025
Sekolah Dasar (SD)	16
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	31
Sekolah Menengah Atas (SMA)	623
Diploma I/Akta I / DII	14
Diploma III/Akta III	118
Diploma IV/Akta IV / S1	956
S2/Pasca Sarjana	349
S3/Doktor/Ph.D -	
Jumlah	2107

Sumber: BKPSDM Kota Kediri, 2025

f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pada perubahan anggaran tahun 2025, jumlah pendapatan daerah Rp1.524.889.742.542,62 Rincian perubahan pendapatan daerah disajikan pada tabel berikut.:

Tabel 1.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Komponen Pendapatan Daerah	Anggaran 2025	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Pendapatan Asli Daerah	446.875.344.013,62	446.345.750.554,91	104,36



Pendapatan Transfer	1.078.014.398.529,00	1.097.411.954.643,00	101,79
Lain-Lain Pendapatan	-	-	-
Jumlah	1.524.889.742.542,62	1.543.757.705.197,91	-

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Target pendapatan daerah tersebut terealisasi sebesar Rp 1.543.757.705.197,91. Tidak semua komponen pendapatan daerah dapat terealisasi sesuai/melebihi target yang ditetapkan. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rincian realisasi PAD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025

Komponen Pendapatan Asli Daerah	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Pajak Daerah	200.850.000.000,00	215.131.709.102,00	107,00
Retribusi Daerah	30.541.086.820,00	40.097.691.311,20	131,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.903.466.410,43	2.903.466.410,43	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	212.580.790.783,19	208.212.883.731,2	97,95
Jumlah	446.875.344.013,62	466.345.750.554,83	-

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 dari target sebesar Rp 446.875.344.013,62 terealisasi sebesar Rp. 466.345.750.554,83 Seluruh objek PAD terealisasi sesuai/lebih dari target yang ditetapkan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang semula ditargetkan sebesar sebesar Rp. 993.740.535.282,00 terdapat perubahan menjadi sebesar Rp. 1.003.913.033.293,00 . Rincian perubahan target dan realisasi Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025

Komponen Pendapatan Transfer	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	993.740.535.282,00	1.003.913.033.293,00	101,02
Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.165.384.247,00	85.390.442.350,00	112,11
Jumlah	1.069.905.919.529,00	1.089.303.475.643,00	-



Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Dalam rangka mengalokasikan kenaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, Pemerintah Kota Kediri melakukan alokasi anggaran belanja tahun anggaran 2025. Rincian realisasi Belanja Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Komponen Belanja Daerah	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Belanja Operasi	1.606.995.177.284,44	1.301.880.850.335,00	81,01
Belanja Modal	242.663.996.040,01	192.819.701.393,00	79,46
Belanja Tidak Terduga	13.413.947.000,00	6.160.050.365,00	45,92
Jumlah	1.863.073.120.324,45	1.500.860.602.093,00	-

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Mengacu pada target yang ditetapkan pada perubahan APBD, Persentase realisasi Belanja Daerah paling besar pada Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja tidak terduga.

Rincian perubahan anggaran dan realiasi Belanja Operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025

Komponen Belanja Operasi	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	687.313.405.779,38	572.527.932.002,00	83,30
Belanja Barang dan Jasa	822.668.188.338,06	663.153.330.885,00	80,61
Belanja Hibah	88.979.960.967,00	59.408.637.448,00	66,77
Belanja Bantuan Sosial	8.033.622.200,00	6.790.950.000,00	84,53
Jumlah	1.598.961.555.084,44	1.295.089.900.335,00	-

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi tertinggi dari Belanja Operasi adalah Belanja Barang dan Jasa, diikuti Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada rincian perubahan APBD tahun anggaran 2025, perubahan anggaran dan realisasi belanja modal disajikan pada tabel berikut.



Tabel 1.12
Perubahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025

Komponen Belanja Modal	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.737.385.720,00	60.500.987.550,00	78,84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.849.252.151,14	102.718.357.562,00	83,61
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.820.711.922,87	26.368.407.249,00	66,22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.205.197.746,00	3.180.500.532,00	99,23
Belanja Modal Aset Lainnya	51.448.500,00	51.448.500,00	100,00
Jumlah	242.663.996.040,01	192.819.701.393,00	-

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi tertinggi dari belanja modal adalah belanja modal Gedung, diikuti belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran dan realisasi belanja tidak terduga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025

Uraian	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
BELANJA TIDAK TERDUGA	13.413.947	6.160.050.	45,92

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Kediri menetapkan prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2025 dengan mengacu pada prioritas Nasional yang tercantum dalam RKP 2025 dan prioritas Provinsi Jawa Timur yang tercantum pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan, Pemerintah Kota Kediri juga memperhatikan isu strategis pembangunan

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah



Memperhatikan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, masih terdapat permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan melalui berbagai kebijakan dan program yang terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di Pemerintah Kota Kediri berdasarkan RPJMD 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya Kualitas SDM dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan;
- b. Lemahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Tarik Investasi;
- c. Pembangunan Infrastruktur yang Kurang Merata dan Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup;
- d. Kurangnya Pengelolaan Sampah dan Mitigasi Bencana yang Belum Optimal;
- e. Akses masyarakat terhadap layanan publik masih terbatas dan Digitalisasi Pelayanan Publik yang belum Merata;

Dari permasalahan pembangunan daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di Pemerintah Kota Kediri dapat diidentifikasi Permasalahan berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

A. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Ekonomi yang Merata dan Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pengembangan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dukungan berupa akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing pengusaha lokal. Selain itu, peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat terus didorong guna mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Upaya ini juga disertai dengan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan wirausaha di berbagai sektor baik formal maupun informal, untuk mengurangi pengangguran. Peningkatan kesejahteraan juga berarti menurunkan angka kemiskinan yang dilaksanakan dengan kolaborasi dan integratif berbagai pihak untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meminimalisir kantong kemiskinan. Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni dan pengurangan kawasan kumuh didorong untuk menurunkan kesenjangan. Peningkatan akses hunian yang aman, layak dan berkelanjutan



untuk memastikan peningkatan kualitas kehidupan. Pembangunan infrastruktur publik yang merata, berkualitas dan berkelanjutan seperti transportasi, sanitasi, energi, pembangunan icon ciri khas kota, infrastruktur MICE (meeting, incentive, convention and exhibition), perbaikan fasilitas umum menjadi prioritas dalam menunjang aktivitas ekonomi serta meningkatkan daya saing perkotaan untuk terwujudnya masyarakat yang sejatera.

B. Memperkuat Kehidupan Sosial yang Berketuhanan dengan Nilai Kemanusiaan

Memperkuat kerukunan sosial dan solidaritas masyarakat dengan meningkatkan nilai-nilai masyarakat untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama, pemahaman nilai toleransi, serta penciptaan lingkungan yang kondusif bagi keberagaman. Selain itu, nilai kemanusiaan dimaksudkan untuk membangun empati dan hubungan kedekatan emosi yang dilakukan dengan wawasan kebangsaan dan memperkuat program berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek sosial dan pembangunan. Upaya ini juga didukung oleh penguatan kesadaran kolektif untuk menyelaraskan nilai tradisional dengan dinamika Masyarakat modern. Peningkatan peran lembaga sosial, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat diperkuat untuk mendorong solidaritas dan kebersamaan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta masyarakat yang bersatu, toleran, dan memiliki solidaritas kuat sebagai fondasi kesejahteraan bersama.

C. Mewujudkan Produktivitas Sumber Daya Manusia

Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif, aktif, dan kreatif dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan peran masyarakat, serta perluasan akses terhadap kesempatan belajar dan berprestasi. Perluasan akses pendidikan yang merata dengan memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Literasi dan numerasi terus didorong untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu berpikir kritis dan berdaya saing. Peningkatan prestasi melalui pemberian beasiswa pendidikan tinggi, pengembangan potensi atlet melalui pembinaan, beasiswa atlet berprestasi, dan pembangunan infrastruktur olahraga yang memadai. Kesehatan



masyarakat juga menjadi prioritas dengan menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata. Pemerataan kualitas fasilitas kesehatan, perluasan cakupan layanan, Upaya pencegahan dan pengobatan penyakit, perilaku hidup bersih dan sehat.

D. Urusan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Responsif dan Berintegritas

Pemerintahan yang inovatif, cepat merespons kebutuhan masyarakat, dan menjunjung tinggi integritas merupakan landasan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan berkualitas. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya nyata membangun sistem pelayanan yang transparan, mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mampu menjawab berbagai dinamika secara tepat dan cepat. Inovasi menjadi kunci yang terus diperkuat sebagai budaya kerja di seluruh tingkat pemerintahan. Upaya mendorong terobosan kebijakan, digitalisasi pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan solusi yang relevan, mudah diakses, dan memberikan dampak nyata bagi warga. Komitmen terhadap inovasi daerah diwujudkan melalui sistem penghargaan untuk mendorong aparatur bekerja lebih efektif, inovatif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan diperkuat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, mendorong aparatur yang profesional, adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Konsistensi dalam menegakkan peraturan daerah, untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial serta penguatan kelembagaan menjadi elemen pendukung dalam menciptakan good governance. Upaya ini diselaraskan dengan peningkatan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan secara mandiri melalui optimalisasi pendapatan daerah, kerja sama dengan berbagai pihak, dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan bebas korupsi.

E. Mewujudkan Kota yang Rapi, Indah, Bersih Bertumpu pada Pembangunan Pariwisata dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata yang menggabungkan potensi wisata lokal dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan secara terpadu. Promosi pariwisata diarahkan agar lebih inklusif dan ramah. Penyelenggaraan event



berkelas nasional yang mengangkat tema-tema budaya khas Kediri, revitalisasi destinasi wisata berbasis sejarah, serta pengembangan sarana dan prasarana meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), dan pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan atraksi wisata. Penguatan kelompok pariwisata melalui fasilitasi maupun peningkatan kualitas pelayanan wisata berjalan selaras. Dengan cara ini, masyarakat menjadi pelaku utama dalam menciptakan pengalaman wisata yang ramah, otentik dan berkelanjutan. Pemberdayaan komunitas untuk mengelola atraksi wisata mendorong partisipasi warga dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai yang dijaga oleh masyarakat sendiri.

Dalam konteks transformasi ekonomi lokal, dukungan terhadap transformasi digital, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan identitas kota dan daya tarik pengembangan ekonomi kreatif menjadi strategi penting untuk mendukung ekonomi berbasis potensi lokal. Sejumlah 17 (tujuh belas) sektor ekonomi kreatif yaitu arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film/animasi/video, fotografi, kriya/ crafting, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, televisi/radio, dan aplikasi serta pengembangan teknologi menjadi sebuah potensi lokal yang dapat dioptimalkan. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan, kelembagaan, SDM, dan infrastruktur, sektor ini bisa menjadi motor pertumbuhan baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

b. Visi dan misi kepala daerah

Visi adalah pernyataan mengenai keadaan di masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu organisasi. Visi organisasi yang ditetapkan mesti menjadi visi bersama (*shared vision*) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumber daya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar/tolok ukur keunggulan, dan menjembatani keadaan sekarang dan masa depan. Berdasarkan kondisi obyektif daerah saat ini, dan tantangan yang dihadapi, maka visi pembangunan Kota Kediri tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 adalah:



“Membangun Kota Kediri yang MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni)”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kota dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan pembangunan Kota Kediri secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kota Kediri Maju:** Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang transparan.
2. **Kota Kediri Agamis:** Memperkuat nilai-nilai religius dan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat.
3. **Kota Kediri Produktif:** Mendorong ekonomi kreatif, UMKM, dan industri yang berdaya saing tinggi.
4. **Kota Kediri Aman:** Menjamin kondusivitas wilayah dan perlindungan sosial.
5. **Kota Kediri Ngangeni:** Menciptakan kota yang nyaman, bersih, dan berkesan (tourism)

Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kota Kediri yaitu “MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni)”. maka dirumuskan 7 (Tujuh) atau Sapta Cipta Kota Kediri dalam mencapai Visi pembangunan Kota Kediri 2025 – 2029 yaitu sebagai berikut :

- Misi 1 : **Program Merata:** Pemerataan pembangunan infrastruktur dan akses layanan dasar
- Misi 2 : **Produktif, Kreatif, Inovatif:** Pengembangan ekosistem ekonomi digital dan UMKM
- Misi 3 : **D'Cito (Kediri City Tourism):** Pengembangan pariwisata yang menarik.
- Misi 4 : **Agamis & Humanis:** Peningkatan kerukunan dan pelayanan sosial.
- Misi 5 : **Aman & Kondusif:** Penguatan keamanan dan ketertiban umum.
- Misi 6 : **Pendidikan & Kesehatan:** Akses pendidikan bermutu dan layanan kesehatan terjangkau
- Misi 7 : **Tata Kelola Bersih:** Reformasi birokrasi yang lincah dan bebas korupsi.

c. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan



Memperhatikan visi dan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Kediri serta mengacu RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024, maka Prioritas Pembangunan Kota Kediri tahun 2024, adalah:

- a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.
- e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar.
- f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim.
- g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan



mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Kediri menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat;
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur;
3. SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kota/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kota/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kota/Kota;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri

Dalam penerapan SPM dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data,
Pengumpulan data, yang meliputi jumlah identitas warga negara yang berhak menerima, jumlah barang dan jasa yang sudah tersedia dan yang dibutuhkan, jumlah sarana, prasarana dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Pengumpulan



data sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 persen dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun. Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan SIPD.

2. Perhitungan kebutuhan

Pemenuhan pelayanan dasar dalam tahap ini pemerintah daerah menghitung selisih ketersediaan barang dan jasa serta sarana, prasarana dengan jumlah warga penerima dan mutu SPM. Diutamakan masyarakat tidak mampu.

3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar. Nantinya dalam proses perencanaan ini akan di integrasi ke dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dokrenda) yang kemudian memasuki proses penganggaran. Berdasarkan pasal 29 Pemendagri nomor 59 tahun 2021 pendanaan penerapan SPM bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota. Serta sumber lainnya yang meliputi dana transfer berupa DAK, dana bagi hasil, dana desa, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, hibah, program tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pelaksanaan SPM dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan SPM dalam satu tahun anggaran, yang meliputi jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja SPM.

Indikator penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

a. Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100 %
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau	100%



		menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
--	--	--	--

b. Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR	TARGET
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human</i>	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency</i>	100%



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR	TARGET
	Immunodeficiency Virus)	virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan	

c. Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

d. Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100%

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET
----	-----------------------	---------------	--------



1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%

f. Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga negara/gelandangan dan pengeis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Kota Kediri Tahun 2024 - 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	81,88	82,71	1,01
2	Angka Kemiskinan	6,51	6,04	-7,22
3	Angka Pengangguran	3,91	3,76	-3,84
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,43	1,74	-49,27
5	Pendapatan Perkapita	565,84	581,57	2,78
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,334	0,337	0,90

Sumber: BPS Kota Kediri

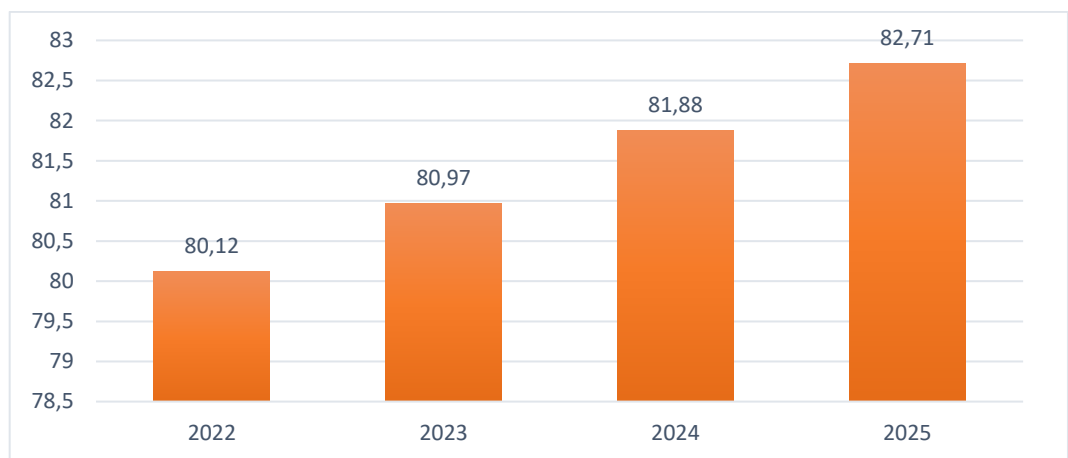
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjelaskan bagaimana penduduk memperoleh akses hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang menggunakan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Realisasi IPM Kota Kediri tahun 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada grafik 2.1, berikut:



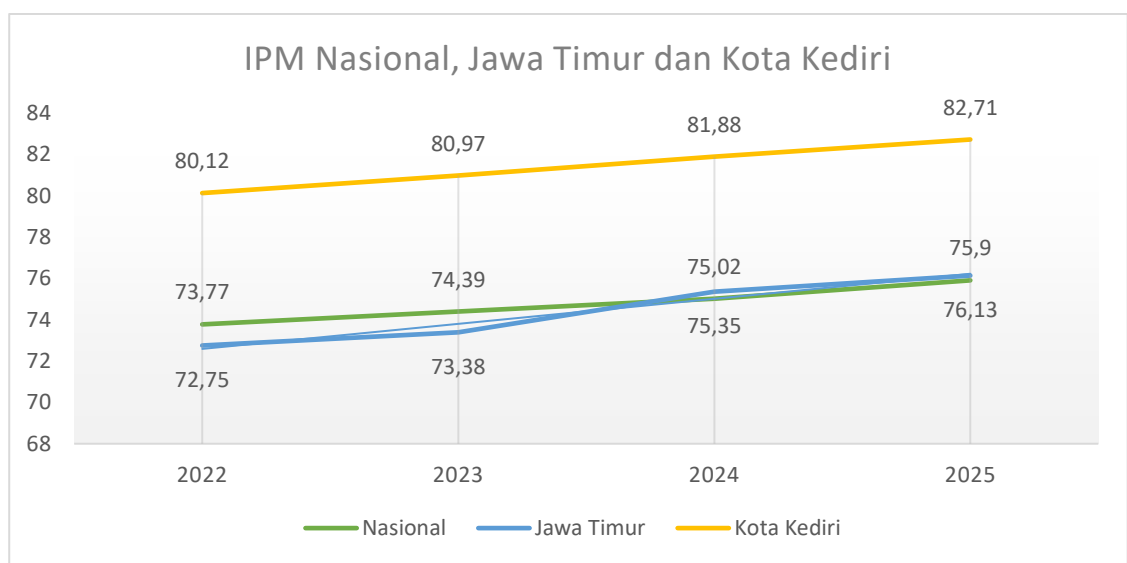
Grafik 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Kota Kediri
Tahun 2022 – 2025



Sumber: BPS Kota Kediri

Dari grafik diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri pada tahun 2025 mencapai 82,71, meningkat 0,83 poin (1,01 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (81,88). Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Nilai Indeks Pembangunan Manusia dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

Grafik 2.2
Perkembangan Nilai IPM Kota Kediri Tahun 2022-2025



Sumber

:

Data

BPS

Kota

Kediri



Tabel 2.2
Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri
Terhadap Rata-rata Propinsi Jawa Timur Tahun 2022-2025

Tahun	Kota Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Propinsi Jawa Timur (poin)	
				IPM Tertinggi	IPM Terendah
2022	80.12	72.75	73.77	82.74	63.39
2023	80.97	73.38	74.39	83.45	63.13
2024	81.88	75.35	75.02	84.68	66.72
2025	82,71	76,13	75,90	85,65	67,23

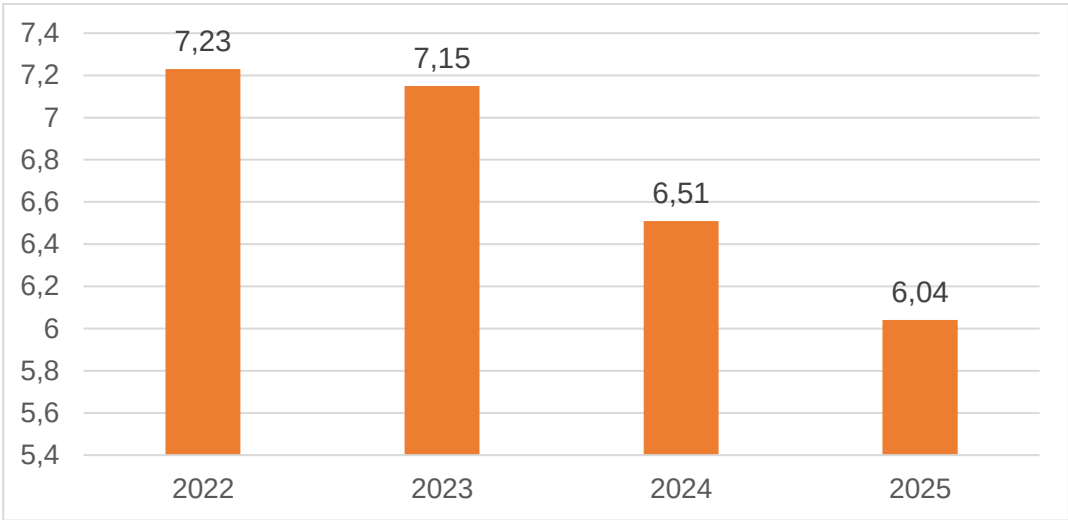
Sumber: BPS Kota Kediri

Dari tabel di atas IPM Kota Kediri menempati rangking 6 dari seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Angka IPM ini sekaligus selalu jauh di atas angka IPM Rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional sejak tahun 2022. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Misi ke-2 selalu menempati prioritas program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Realisasi tingkat kemiskinan Kota Kediri tahun 2025 sebesar 6,04%, berkurang sebesar 0,47 poin dari tahun 2024 sebesar 6,51%. Gambaran realisasi Tingkat kemiskinan tahun 2022-2025 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Tingkat Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2022 - 2025



Sumber: BPS Kota Kediri



Dari grafik di atas, diketahui bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2022 sampai dengan 2025 cenderung menurun. Pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan berbagai program untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, rehabilitasi rumah tidak layak huni, program pemberdayaan masyarakat, penciptaan wirausaha baru, pelatihan kerja dan bantuan modal.

2.1.3 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Angka TPT diperoleh atas rilis dari Badan Pusat Statistik pada setiap tahunnya. Angka ini diperoleh dari jumlah angkatan kerja yang menganggur dibanding jumlah angkatan kerja.

Sementara itu, dampak kesejahteraan sosial penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu bidang ketenagakerjaan di Kota Kediri dapat dilihat dari data indikator rasio kerja,TPT dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Keadaan Ketenagakerjaan Kota Kediri
Tahun 2024 - 2025

No	Uraian	2024	2025
1	Jumlah Penduduk	301.424	301.815
2	Penduduk Usia Produktif	212,192	237.545
3	Angkatan Kerja	165918	167.812
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,74	70,64
5	Pencari Kerja terdaftar	1002	793
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.91	3,76
7	Upah Minimum Kota (UMK) (Rp)	2.572.361	2.742.806
8	% TPT Jawa Timur	4.19%	3,88%
9	% TPT Nasional	4,91%	4,96%

Sumber: BPS.

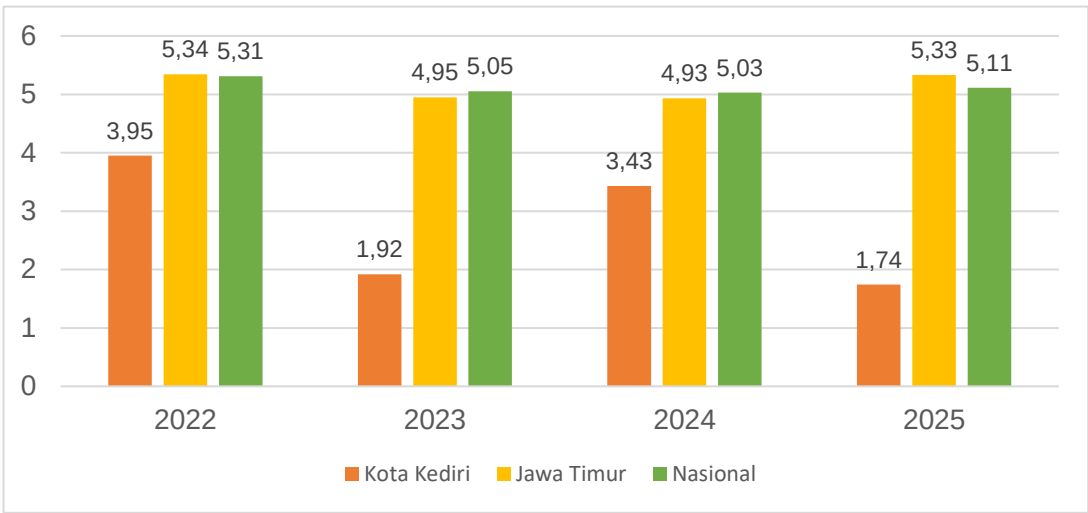
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Kediri tahun 2025 sebesar 3,76%, berkurang dari tahun 2024 sebesar 43,91%. Pengurangan TPT tersebut menunjukkan keberhasilan program pengurangan TPT melalui pelatihan kerja dan pemberian bantuan modal oleh Pemerintah Kota Kediri. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja, upah minimum Kota Kediri dinaikkan dari Rp. 2.572.361,00 menjadi Rp 2.742.806,00.



2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat pada suatu daerah yang merupakan suatu proses perubahan perekonomian suatu daerah dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Secara nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2025 sebesar 1,74%

Grafik 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Tahun 2022 – 2025



Sumber: BPS

Angka PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Kediri tahun 2024 senilai 175,17 triliun rupiah. Berdasarkan angka PDRB ADHK pertumbuhan PDRB Kota Kediri tahun 2025 meningkat 1,74 persen dari tahun sebelumnya.

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal, terutama oleh para peneliti dan pemerhati yang peduli terhadap masalah kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita adalah nilai nominal PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sehingga nilainya sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, artinya bahwa jika pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonominya maka ada kecenderungan semakin kecil PDRB per kapita wilayah tersebut. Oleh sebab itu, laju



pertumbuhan penduduk idealnya tidak melebihi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Secara makro ekonomi, semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah mengindikasikan semakin baik tingkat perekonomian masyarakat pada wilayah tersebut. Meskipun masih ada kekurangan, tetapi indikator ini sudah cukup memadai untuk menjelaskan potensi ekonomi suatu wilayah dan pengaruhnya terhadap tingkat kemakmuran penduduknya. Karena data PDRB dapat digunakan untuk melihat kemampuan atau potensi suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), artinya nilai PDRB per kapita dihitung atas dasar harga tahun berjalan. Sehingga sangat dipengaruhi oleh total volume produksi dan harga barang/jasa pada tahun tersebut. Oleh sebab itu indikator ini tidak dapat langsung dijadikan rujukan atau kesimpulan terkait perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.4
Tingkat Pendapatan Perkapita Penduduk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Kediri
(Juta Rupiah/Tahun)

Tahun	Jumlah PDRB ADHK	Jumlah Penduduk	Pend. Perkapita (Rp/Tahun/Pdd)
2022	152.780.000.000	294.692	522.860.000
2023	159.740.000.000	298.820	541.070.000
2024	168.750.000.000	301.424	565.840.000
2025	175.166.360.000	301.815	698.220.000

Sumber: BPS Kota Kediri

Pendapatan perkapita penduduk Kota Kediri menunjukkan angka yang terus meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir 2022-2025 dengan rata-rata kenaikan 3,33% % per tahun.. Indikator ini menunjukkan keberhasilan kebijakan Pemerintah Kota Kediri dalam menjaga stabilitas pertumbuhan sektor basis ekonomi Kota Kediri sehingga mampu memberikan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang baik setiap tahun.



2.1.1 Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna), sehingga nilai Gini Ratio berkisar antara 0 - 1. Indikator ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu wilayah. Memasuki tahun 2021 hingga 2023, ketimpangan pendapatan di Kota Kediri terus mengalami peningkatan. Indeks Gini naik dari 0,374 pada tahun 2021 menjadi 0,400 pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Kediri berada di atas rata-rata ketimpangan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Kediri belum sepenuhnya inklusif, sehingga sebagian besar manfaat dari pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Fenomena ini berpotensi memicu permasalahan sosial jika tidak segera diatasi dengan kebijakan yang tepat.

Namun, pada tahun 2025 terjadi perubahan yang cukup signifikan, di mana Indeks Gini Kota Kediri menurun menjadi 0,334. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di kalangan masyarakat. Penurunan ketimpangan ini dapat diatributkan pada berbagai faktor seperti peningkatan akses terhadap lapangan kerja formal, program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah yang lebih berpihak pada pemerataan kesejahteraan. Program sosial yang lebih terarah dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan juga turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ini.

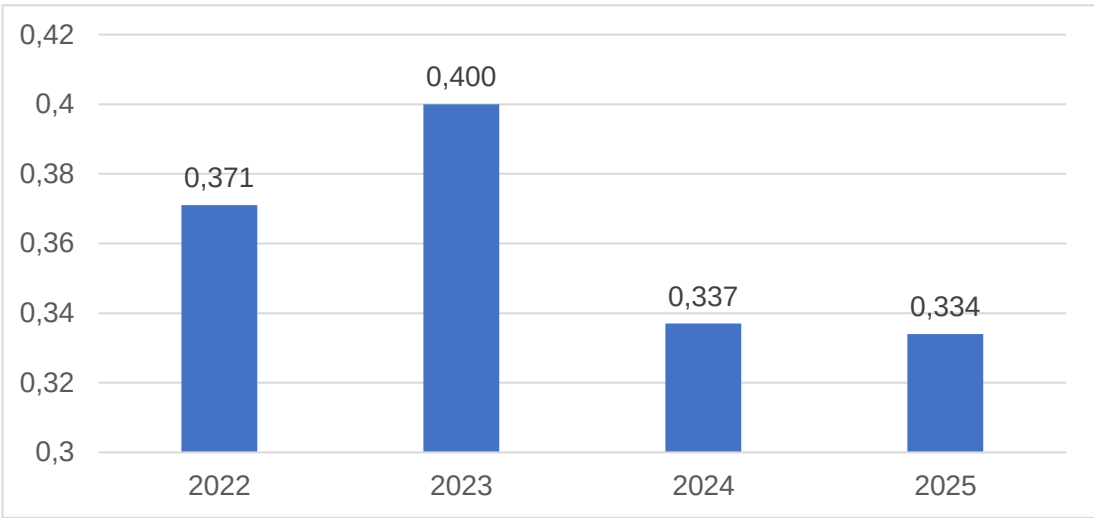
Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2025, ketimpangan pendapatan tetap menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kota Kediri. Ketimpangan yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan yang mendorong pemerataan, seperti peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan akses modal, serta kebijakan redistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan ketimpangan pendapatan di Kota Kediri dapat terus ditekan sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi



benar-benar inklusif dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan kesejahteraan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi Kota Kediri dalam jangka panjang. Pemerintah bersama masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.. Indeks Gini Kota Kediri Tahun 2022 – 2025 dapat dilihat pada Grafik 2.5

Grafik 2.5
Indeks Gini Kota Kediri Tahun 2022 – 2025



Sumber: BPS

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai indeks gini pada tahun 2022 sampai dengan 2025 berada pada rentang 0,337–0,334, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan di Kota Kediri berada pada tingkat ketimpangan sedang.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil (<i>outcome</i>)	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Wajib					
1	Pendidikan	1 Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	95.13 %	DINAS PENDIDIKAN	
		2 Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	DINAS PENDIDIKAN	
		3 Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	DINAS PENDIDIKAN	
		4 Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	46.44 %	DINAS PENDIDIKAN	
		5 Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	49.90 %	DINAS PENDIDIKAN	
2	Kesehatan	1 Persentase kematian ibu	0.03 %	DINAS KESEHATAN	
		2 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	4.61 %	DINAS KESEHATAN	
		3 Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	91.42 %	DINAS KESEHATAN	
		4 Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	90.38 %	DINAS KESEHATAN	
		5 Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	89.82 %	DINAS KESEHATAN	



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil (<i>outcome</i>)	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
		6 Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96.35 %	DINAS KESEHATAN	
		7 Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		8 Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	92.69 %	DINAS KESEHATAN	
		9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		10 Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		11 Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		12 Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		13 Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		14 Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	71.89 %	DINAS PUPR	Surat Pernyataan
No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil (<i>outcome</i>)	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan





		2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	90.70 %	DINAS PUPR	Surat Pernyataan Kepala Dinas
		3	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	80.52 %	DINAS PUPR	
		4	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	100%	DINAS PUPR	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0 %	DINAS PUPR	Pernyataan Kepala Dinas
		6	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	0 %	DINAS PUPR	Pernyataan Kepala Dinas
		7	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100 %	DINAS PUPR	
		8	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	0 %	DINAS PUPR	Pernyataan Kepala Dinas
		9	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	51.75 %	DINAS PUPR	
		10	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	41.38 %	DINAS PUPR	





No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil (<i>outcome</i>)	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
4	Perumahan Rakyat	1 Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100 %	DPKP	
		2 Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100 %	DPKP	
		3 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	15.34 %	DPKP	
		4 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0 %	DPKP	Pernyataan Kepala Dinas
5	Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1 Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33.33 %	SATPOL PP	
		2 Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	SATPOL PP	
		3 Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	86.21 %	BPBD	
		4 Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	BPBD	
		5 Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan	100 %	BPBD	





		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	83.58 %	SATPOL PP	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	DINAS SOSIAL	
		2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	DINAS SOSIAL	
		3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	DINAS SOSIAL	
		4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	DINAS SOSIAL	
		5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100 %	DINAS SOSIAL	
		6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100 %	DINAS SOSIAL	





	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	85.71 %	DINKOP UMTK	
		2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	26.19 %	DINKOP UMTK	
		3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	99.99 %	DINKOP UMTK	
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	45,88 %	DP3AP2KB	
		2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	DP3AP2KB	
9	Pangan	1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0 %	DKPP	Surat Pernyataan Kepala Dinas
10	Pertanahan	1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	76.97 %	DINAS PUPR	Surat Pernyataan Kepala Dinas
		2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	81.60 %	DPM PTSP	Surat Pernyataan Kepala Dinas





		3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	100 %	DPM PTSP	Surat Pernyataan
11	Lingkungan Hidup	1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	42.85 %	DLHKP	
		2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	95.46 %	DLHKP	
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan sipil	1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	99.98 %	DISPENDUKCAPIL	
		2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	98.49 %	DISPENDUKCAPIL	
		3	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100 %	DISPENDUKCAPIL	
		4	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %	DISPENDUKCAPIL	
		5	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	99.71 %	DISPENDUKCAPIL	
		6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	95.51 %	DISPENDUKCAPIL	





		7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	94.01 %	DISPENDUKCAPIL	
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	0 %	BAGIAN PEMERINTAHAN	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0 %	BAGIAN PEMERINTAHAN	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah
		3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	0 %	BAGIAN PEMERINTAHAN	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	89.62 %	DP3AP2KB	
		2	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	74.28 %	DP3AP2KB	
		3	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive	64.79 %	DP3AP2KB	





15	Perhubungan	1	Konektivitas Kabupaten/Kota	1 %	DINAS PERHUBUNGAN
		2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,51 %	DINAS PERHUBUNGAN
		3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	25 %	DINAS PERHUBUNGAN
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	DISKOMINFO
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	65,87 %	DISKOMINFO
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	DISKOMINFO
17	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	-10.63 %	DINKOP UMTK
		2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	86.83 %	DINKOP UMTK
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	7.58 %	DPM PTSP
		2	Realisasi total terhadap target investasi	262.43 %	DPM PTSP





	Kepemudaan Dan Olahraga	1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	16,67 %	DISBUDPARPORA	
		2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	9.30 %	DISBUDPARPORA	
		3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	24.43 %	DISBUDPARPORA	
		4	Persentase jumlah atlet berprestasi	95.65 %	DISBUDPARPORA	
20	Statistik	1	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	61.18 %	DISKOMINFO	
21	Persandian	1	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	64.81 %	DISKOMINFO	
22	Kebudayaan	1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100 %	DISBUDPARPORA	
		2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	24.12 %	DISBUDPARPORA	
23	Perpustakaan	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	55,97 %	DISARPUS	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	20,75 %	DISARPUS	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	100	DISARPUS	





Urusan Pilihan					
1	Kelautan Dan Perikanan	1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	19,31 Ton	DKPP
		2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	13.51 Kg/Kap/Th	DKPP
2	Pariwisata	1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	26,61 %	DISBUDPARPORA
		2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	73.86 %	DISBUDPARPORA
		3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	10.03 %	DISBUDPARPORA
3	Pertanian	1	Peningkatan produksi tanaman pangan	-16.28 %	DKPP
		2	Peningkatan produksi hortikultura	-47.29 %	
		3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	4.24 %	DKPP
		4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100 %	DKPP
4	Kehutanan				





6	Energi dan Sumber Daya Mineral				
	Perdagangan	1 Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	75.49 %	DISPERDAGIN	
	Perindustrian	1 Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	65.85 %	DISPERDAGIN	
		2 Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	0.91 %	DISPERDAGIN	
		3 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	9.12 %	DISPERDAGIN	
		4 Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	7.98 %	DISPERDAGIN	
8	Transmigrasi				





2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator kinerja kunci	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
1	Perencanaan	1 Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100 %	BPPKAD	
2	Keuangan	1 Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	21.72 %	BPPKAD	
		2 Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	29.82 %	BPPKAD	
		3 Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	63.15 %	BPPKAD	
		4 Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	35.83 %	BPPKAD	
3	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	1 Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	68,20 %	BKPSDM	
4	Penelitian dan Pengembangan	1 Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan)	100%	BAPPEDA	
5	Fungsi Pengawasan	1 Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	INSPEKTORAT	





		2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	3	INSPEKTORAT	
		3	Manajemen risiko Indeks	2	INSPEKTORAT	
		4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	72,22 %	INSPEKTORAT	
5	Fungsi Pengadaan	1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	35,56%	BPBJ	
		2	Pemanfaatan sistem pengadaan	19,47%	BPBJ	
		3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	23,75%	BPBJ	
6	Hubungan Dengan Perwakilan Daerah	1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu	DPRD	
		2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	100 %	DPRD	





No	Fungsi Penunjang	Indikator kinerja kunci	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
7	Pelayanan Publik	1 Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	93,84 %	BAGIAN ORGANISASI	





2.3 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Kediri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026 dan RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Pemerintah Kota Kediri.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



2.3.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (RPD 2025-2026)

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 5/4*100	(7)	(8)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	74,64	N/A	N/A	N/A	Kementerian PANRB
1.1	Meningkatnya Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	314	306	97,45%	Sangat Tinggi	BKN
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	70,98	101,40%	Sangat Tinggi	Kemendagri
		Nilai SAKIP	73	74,14	101,56%	Sangat Tinggi	Kementerian PANRB
1.3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah	Indeks Reformasi Hukum	98,25	98,60	100,36%	Sangat Tinggi	LAN
1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,70	3,59	97,03%	Sangat Tinggi	Bappeda
		Indeks Inovasi Daerah	53	66,01	124,55%	Sangat Tinggi	BRIN
		Indeks SPBE	3,95	3,89*	98,48%	Sangat Tinggi	Kementerian PANRB
2.	Meningkatnya kualitas	Indeks Pembangunan	82	82,71	100,86%	Sangat Tinggi	BPS



No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 5/4*100	(7)	(8)
	sumber daya manusia	Manusia (IPM)					
2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,80	0,81	101,25%	Sangat Tinggi	BPS
2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	75,74	76,28	100,71%	Sangat Tinggi	BPS
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	94,72	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	3,5-4,5	1,74	43,50%	Sangat Rendah	BPS
3.1	Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa	Nilai Peningkatan PDRB	2,3-3,2T	1,6T	69,57%	Sedang	BPS
3.2	Meningkatnya jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE	Nilai Realisasi Investasi	1.414 M	1.622 M	114,71%	Sangat Tinggi	OSS
3.3	Terkendalnya Harga Bahan kebutuhan pokok dan penting	Tingkat Inflasi	3±1	2,95	98,33%	Sangat Tinggi	BPS
		Indeks Ketahanan Pangan	74	70,41	95,15%	Sangat Tinggi	BAPANAS
3.4	Meningkatnya daya tarik wisata, budaya dan olah raga	Jumlah Kunjungan Wisata	1.800.000	1.893.765	105,21%	Sangat Tinggi	Disbudparpora
4.	Pengentasan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,50%	6,04%	107,08%	Sangat Tinggi	BPS



No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 5/4*100	(7)	(8)
	dan Perluasan Kesempatan Kerja						
4.1	Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial	100%	99,81%	99,81%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
4.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,9%	3,76%	103,59%	Sangat Tinggi	BPS
5.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	4,6	4,56	99,13%	Sangat Tinggi	Bappeda
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	88	85,58	97,25%	Sangat Tinggi	Satpol PP
5.2	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,78	0,56	71,79%	Sedang	BNPB
6.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	82	82,1	100,12%	Sangat Tinggi	Bappeda
6.1	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	84,60%	81,57%	96,42%	Sangat Tinggi	Dinas PUPR
6.2	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	88	88,71	100,80%	Sangat Tinggi	Bappeda
6.3	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	Persentase permukiman layak huni	89,71%	94%	104,78%	Sangat Tinggi	DPKP
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,76	63,26	94,76%	Sangat Tinggi	DLHKP

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025



Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja untuk :

Tujuan 1 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah yang diukur dengan indikator :

1. “Indeks Reformasi Birokrasi” yang capaiannya belum dapat diukur karena belum tersaji data realisasi.

Untuk mendukung tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah” melalui sasaran :

- a. **Meningkatnya manajemen ASN** yang diukur dengan indikator “Indeks Sistem Merit” mencapai 306, dengan persentase capaian sebesar 97,45%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.
- b. **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan** yang diukur oleh 2 (dua) indikator, yaitu indikator “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah” mencapai 70,98, dengan persentase capaian sebesar 101,40%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”. Indikator “Nilai SAKIP” mencapai 74,14, dengan persentase capaian sebesar 101,56%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.
- c. **Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah** yang diukur dengan indikator “Indeks Reformasi Hukum” mencapai 98,60, dengan persentase capaian sebesar 100,36%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.



- d. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik** yang diukur oleh 3 (tiga) indikator, yaitu indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” mencapai 3,59, dengan persentase capaian sebesar 97,03%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”. Indikator “Indeks Inovasi Daerah” mencapai 66,01, dengan persentase capaian sebesar 124,55%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”. Indikator “Indeks SPBE” mencapai 3,89, dengan persentase capaian sebesar 98,48%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Tujuan 2 :

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

yang diukur dengan indikator :

1. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)” mencapai 82,71, dengan persentase capaian sebesar 100,86%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Untuk mendukung tujuan “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” melalui sasaran :

- a. **Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan Masyarakat** yang diukur dengan indikator “Indeks Pendidikan” mencapai 0,81, dengan persentase capaian sebesar 101,25%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.



- b. **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** yang diukur dengan indikator “Umur Harapan Hidup” mencapai 76,28, dengan persentase capaian sebesar 100,71%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.
- c. **Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak** yang diukur dengan indikator “Indeks Pembangunan Gender” yang mana capaiannya belum dapat diukur karena belum tersaji data realisasi.

Tujuan 3 :

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan

yang diukur dengan indikator :

- 1. “Pertumbuhan Ekonomi” mencapai 1,74, dengan persentase capaian sebesar 43,50%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Rendah”.

Untuk mendukung tujuan “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan” melalui sasaran :

- a. **Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa** yang diukur dengan indikator “Nilai Peningkatan PDRB” mencapai 1,6T, dengan persentase capaian sebesar 69,57%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sedang”.



- b. **Meningkatnya jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE** yang diukur dengan indikator “Nilai Realisasi Investasi” mencapai 1.622 M, dengan persentase capaian sebesar 114,71%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.
- c. **Terkendalinya Harga Bahan kebutuhan pokok dan penting** yang diukur oleh 2 (dua) indikator, yaitu indikator “Tingkat Inflasi” mencapai 2,95, dengan persentase capaian sebesar 95,15%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”. Indikator “Indeks Ketahanan Pangan” mencapai 70,41, dengan persentase capaian sebesar 95,15%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.
- d. **Meningkatnya daya tarik wisata, budaya dan olah raga** yang diukur dengan indikator “Jumlah Kunjungan Wisata” mencapai 1.893.765, dengan persentase capaian sebesar 105,21%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Tujuan 4 :

Pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

yang diukur dengan indikator :

- 1. “Tingkat Kemiskinan” mencapai 6,04%, dengan persentase capaian sebesar 107,08%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Untuk mendukung tujuan “Pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja” melalui sasaran :



- a. **Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial** yang diukur dengan indikator “Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial” mencapai 99,81%, dengan persentase capaian sebesar 99,81%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.
- b. **Menurunnya angka pengangguran** yang diukur dengan indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” mencapai 3,76%, dengan persentase capaian sebesar 103,59%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Tujuan 5 :

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis

yang diukur dengan indikator :

1. “Indeks Kerukunan Umat Beragama” mencapai 4,56, dengan persentase capaian sebesar 99,13%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Untuk mendukung tujuan “Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis” melalui sasaran :

- a. **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat** yang diukur dengan indikator “Indeks Ketentraman dan Ketertiban” mencapai 85,58, dengan persentase capaian sebesar 97,25%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.



- b. **Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana** yang diukur dengan indikator “Indeks Ketahanan Daerah” mencapai 0,56, dengan persentase capaian sebesar 71,79%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sedang”.

Tujuan 6 :

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

yang diukur dengan indikator :

1. “Indeks Kota Layak Huni” mencapai 82,1, dengan persentase capaian sebesar 100,12%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Untuk mendukung tujuan “Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan” melalui sasaran :

- a. **Meningkatnya kualitas penataan ruang** yang diukur dengan indikator “Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang” mencapai 81,57%, dengan persentase capaian sebesar 96,42%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.
- b. **Meningkatnya kualitas infrastruktur** yang diukur dengan indikator “Indeks Infrastruktur” mencapai 88,71, dengan persentase capaian sebesar 100,80%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.



- c. **Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan** yang diukur dengan indikator “Persentase permukiman layak huni” mencapai 94%, dengan persentase capaian sebesar 104,78%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.
- d. **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** yang diukur dengan indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” mencapai 63,26, dengan persentase capaian sebesar 94,76%. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 5/4*100	(7)	(8)
1.	Terwujudnya ekonomi yang merata dan infrastruktur berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	3.5-4.5	1,74	43,50%	Sangat Rendah	BPS
2.		Indeks Gini	0.327-0.364	0,334	103,33%	Sangat Tinggi	BPS
3.	Meningkatnya Daya Saing Kota di Level Nasional	Indeks Daya Saing Daerah	3.75	3,74	99,73%	Sangat Tinggi	BRIN
4.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6.45-6.32%	6,04%	105,40%	Sangat Tinggi	BPS
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.87-3.54%	3,76%	98,52%	Sangat Tinggi	BPS
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Produktif	Indeks Pembangunan Manusia	82.77	82,71	99,93%	Sangat Tinggi	BPS
7.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	86.5	N/A	N/A	N/A	Kementerian PANRB
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	72.99	74,14	101,58%	Sangat Tinggi	Kementerian PANRB
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	62.00	70,98	114,48%	Sangat Tinggi	Kemendagri
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69.79	63,26	90,64%	Tinggi	DLHKP
11.	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam	Indeks Risiko Bencana	73-70	75,10	94,97%	Sangat Tinggi	BNPB



No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = $\frac{5}{4} \times 100$	(7)	(8)
	Penanggulangan Bencana						

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2025 terjadi perubahan Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan penetapan RPD tahun 2025-2026 dan RPJMD tahun 2025-2029. Pemerintah Daerah Kota Kediri dari 29 indikator kinerja menjadi 11 indikator setelah adanya perubahan PK. Dari 11 indikator pada PK perubahan, hanya terdapat 3 indikator yang berbeda dengan PK awal.

Indikator yang berbeda dengan PK awal dan belum menjadi indikator sebelumnya yaitu :

1. Indikator “Indeks Daya Saing Daerah”. Pada tahun 2025 pada PK perubahan, Indikator Indeks Daya Saing Daerah ditargetkan 3,75. Adapun realisasi pada Indikator Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,74 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,73%.
2. Indikator “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”. Pada tahun 2025 pada PK perubahan, Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ditargetkan 62,00. Adapun realisasi pada Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 70,98 sehingga capaian kinerjanya sebesar 114,48%.
3. Indikator “Indeks Risiko Bencana”. Pada tahun 2025 pada PK perubahan, Indikator Indeks Risiko Bencana ditargetkan 73-70. Adapun realisasi pada Indikator Indeks Risiko Bencana sebesar 75,10 sehingga capaian kinerjanya sebesar 94,97%.



2.3.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Renstra RPD 2025-2026)

Tabel 3. 4 *Perbandingan Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja 2024 & 2025)*

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100	(7)	(8)	(9)= 8/7*100
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	77,00	84,67	109,96%	74,64	N/A	N/A
1.1	Meningkatnya Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	310	306	98,71%	314	306	97,45%
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	70	70,98	101,40%
		Nilai SAKIP	81,05	72,49	89,44%	73	74,14	101,56%
1.3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	98,25	98,60	100,36%
1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,80	3,541	93,18%	3,70	3,59	97,03%
		Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	53	66,01	124,55%
		Indeks SPBE	3,66	3,89	106,28%	3,95	3,89*	98,48%



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100	(7)	(8)	(9)= 8/7*100
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,2	81,88	100,84%	82	82,71	100,86%
2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,80	0,80	100,00%	0,80	0,81	101,25%
2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	75,00	75,94	101,25%	75,74	76,28	100,71%
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	95,80	95,99	100,19%	94,72	N/A	N/A
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,00-6,00	3,43	68,60%	3,5-4,5	1,74	43,50%
3.1	Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa	Nilai Peningkatan PDRB	4,7 T – 5,9 T	3,1 T	65,96%	2,3-3,2T	1,6T	69,57%
3.2	Meningkatnya jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE	Nilai Realisasi Investasi	1.400 M	1.477 M	105,50%	1.414 M	1.622 M	114,71%
3.3	Terkendalinya Harga Bahan kebutuhan pokok dan penting	Tingkat Inflasi	3±1	1,19	59,50%	3±1	2,95	98,33%
		Indeks Ketahanan Pangan	-	-	-	74	70,41	95,15%
3.4	Meningkatnya daya tarik	Jumlah Kunjungan Wisata	1.750.000	1.759.000	100,52%	1.800.000	1.893.765	105,21%



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100	(7)	(8)	(9)= 8/7*100
	wisata, budaya dan olah raga							
4.	Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kemiskinan	6,90%	6,51%	105,65%	6,50	6,04	107,08%
4.1	Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial	100%	99,81%	99,81%	100%	99,81%	99,81%
4.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05%	3,91%	103,58%	3,9%	3,76%	103,59%
5.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	4,56	4,56	100,00%	4,6	4,56	99,13%
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	87	86,04	98,89%	88	85,58	97,25%
5.2	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,75	0,50	64,10%	0,78	0,56	71,79%
6.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	80,50	81,02	100,02%	82	82,1	100,12%
6.1	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	84,40%	85,46%	101,25%	84,60%	81,57%	96,42%
6.2	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	88	87,41	99,33%	88	88,71	100,80%
6.3	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	Persentase permukiman layak huni	94,92%	95,53%	100,64%	89,71%	94%	104,78%



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100	(7)	(8)	(9)= 8/7*100
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,60	67,09	100,74%	66,76	63,26	94,76%

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025



Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja :

Tujuan 1

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah

yang diukur dengan indikator :

1. “Indeks Reformasi Birokrasi” yang capaiannya belum dapat diukur karena belum tersaji data realisasi.

Untuk mendukung tujuan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah” melalui realisasi kinerja sasaran :

- a. **Meningkatnya manajemen ASN** yang diukur dengan indikator “Indeks Sistem Merit” tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025 dikarenakan realisasi tahun 2025 menggunakan realisasi tahun 2024.
- b. **Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan** yang diukur dengan 2 (dua) indikator. Indikator “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah” belum dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru dan belum ada realisasi yang dapat disajikan. Indikator “Nilai SAKIP” mengalami peningkatan sebesar 1,65 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 72,49. Memasuki tahun



2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 74,14. Nilai SAKIP terdiri dari 4 komponen penilaian. Realisasi setiap komponen SAKIP tahun 2025, yaitu: perencanaan kinerja sebesar 23,54, pengukuran kinerja 21,05, pelaporan kinerja 11,44, evaluasi internal 18,11. Memperhatikan target sebesar 72,99, maka capaian Nilai SAKIP Kota Kediri tahun 2025 sebesar 101,58% (sangat tinggi).

- c. **Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah** yang diukur dengan indikator “Indeks Reformasi Hukum” belum dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru dan belum ada realisasi yang dapat disajikan.
- d. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik** yang diukur dengan 3 (tiga) indikator. Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” mengalami peningkatan sebesar 0,049 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 3,541. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 3,590. Indikator “Indeks Inovasi Daerah” tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru dan belum ada realisasi yang dapat disajikan. Indikator “Indeks SPBE” tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025 dikarenakan realisasi tahun 2025 menggunakan realisasi tahun 2024.

Tujuan 2

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

yang diukur dengan indikator :



1. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)” mengalami peningkatan sebesar 0,83 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 81,88. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 82,71. Pertumbuhan IPM 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi, terutama standar hidup layak dan kesehatan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 76,28 tahun, meningkat 0,34 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 15,71 pada tahun 2024 menjadi 15,72 tahun pada 2025, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,17 tahun, dari 10,92 tahun 2024 menjadi 11,09 tahun pada tahun 2025. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat 614 ribu rupiah (4,49 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk mendukung tujuan “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” melalui realisasi kinerja sasaran :

- a. **Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat** yang diukur dengan indikator “Indeks Pendidikan” mengalami peningkatan sebesar 0,01 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 0,80. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 0,81.



- b. **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** yang diukur dengan indikator “Umur Harapan Hidup” mengalami peningkatan sebesar 0,34 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 75,94. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 76,28.
- c. **Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak** yang diukur dengan indikator “Indeks Pembangunan Gender” yang capaiannya belum dapat diukur karena belum tersaji data realisasi.

Tujuan 3

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan

yang diukur dengan indikator :

1. “Pertumbuhan Ekonomi” mengalami penurunan sebesar 1,69 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 3,43. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja menurun menjadi 1,74. Salah satu penyumbang penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri adalah rendahnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan yaitu sebesar 0,05 persen. Disisi lain, Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri Tahun 2025 non industri pengolahan sangat tinggi, sebesar 7,33 persen. Industri pengolahan yang didominasi industri pengolahan tembakau merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar, sebesar 78,55 persen. Sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Kediri tahun 2025 adalah sektor industri pengolahan sebesar 78,55%. Kontribusi terbesar kedua disumbang dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi



mobil dan sepeda motor sebesar 10,77%. Sektor informasi dan komunikasi menempati kontribusi terbesar ketiga dalam struktur perekonomian Kota Kediri, sebesar 2,34%. Sementara, sektor penyediaan akomodasi dan makan menempati urutan keempat sebesar 2,08% dan sektor konstruksi menempati urutan kelima sebesar 1,91% dalam mendukung struktur perekonomian Kota Kediri.

Untuk mendukung tujuan “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan” melalui realisasi kinerja sasaran :

- a. **Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa** yang diukur dengan indikator “Nilai Peningkatan PDRB” mengalami penurunan sebesar 1,69 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 3,1T. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 1,6T.
- b. **Meningkatnya jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE** yang diukur dengan indikator “Nilai Realisasi Investasi” mengalami peningkatan sebesar 145 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 1.477 M. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 1.622 M.
- c. **Terkendalinya harga bahan kebutuhan pokok dan penting** yang diukur dengan 2 (dua) indikator. Indikator “Tingkat Inflasi” mengalami peningkatan sebesar 1,76 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 1,19. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 2,95. Indikator “Indeks Ketahanan



Pangan” tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru dan belum ada realisasi yang dapat disajikan.

- d. **Meningkatnya daya tarik wisata, budaya dan olah raga** yang diukur dengan indikator “Jumlah Kunjungan Wisata” mengalami kenaikan sebesar 134.765 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 1.759.000. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 1.893.765.

Tujuan 4

Pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

yang diukur dengan indikator :

1. “Tingkat Kemiskinan” mengalami penurunan sebesar 0,47 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 6,51%. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja menurun menjadi 6,04%.

Untuk mendukung tujuan “Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja” melalui realisasi kinerja sasaran :

- a. **Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial** yang diukur dengan indikator “Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial” menunjukkan realisasi yang stabil dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 99,81%. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja tetap stabil di angka 99,81%.



- b. **Menurunnya angka pengangguran** yang diukur dengan indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” mengalami penurunan sebesar 0,15 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 3,91%. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja menurun menjadi 3,76%.

Tujuan 5

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis

yang diukur dengan indikator :

1. “Indeks Kerukunan Umat Beragama” menunjukkan realisasi yang sama dari tahun 2024 ke tahun 2025, akan tetapi jika disandingkan dengan masing masing target tahun 2024 dan 2025 “Indeks Kerukunan Umat Beragama” mengalami penurunan. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 4,56. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja sebesar 4,56.

Untuk mendukung tujuan “Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis” melalui realisasi kinerja sasaran :

- a. **Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat** yang diukur dengan indikator “Indeks Ketentraman dan Ketertiban” mengalami penurunan sebesar 0,46 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 86,04. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 85,58.



- b. **Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana** yang diukur dengan indikator “Indeks Ketahanan Daerah” mengalami peningkatan sebesar 0,06 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 0,50. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 0,56.

Tujuan 6

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

yang diukur dengan indikator :

1. “Indeks Kota Layak Huni” mengalami kenaikan sebesar 1,08 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 81,02. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja menurun menjadi 82,10.

Untuk mendukung tujuan “Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan” melalui realisasi kinerja sasaran :

- a. **Meningkatnya kualitas penataan ruang** yang diukur dengan indikator “Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang” mengalami penurunan sebesar 3,89 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 85,46%. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja menurun menjadi 81,57%.
- b. **Meningkatnya Kualitas infrastruktur** yang diukur dengan indikator “Indeks Infrastruktur” mengalami peningkatan sebesar 1,3 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi



kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 87,41. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja meningkat menjadi 88,71.

- c. **Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan** yang diukur dengan indikator “Persentase permukiman layak huni” mengalami penurunan sebesar 0,02 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 95,53%. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja menurun menjadi 94%.
- d. **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** yang diukur dengan indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” mengalami penurunan sebesar 3,83 dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar 67,09. Memasuki tahun 2025, realisasi kinerja menurun menjadi 63,26.



Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 & 2025)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100	(7)	(8)	(9)=8/7*100
1.	Terwujudnya ekonomi yang merata dan infrastruktur berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,00-6,00	3,43	68,60%	3.5-4.5	1,74	43,50%
2.		Indeks Gini	0,350-0,390	0,337	103,71%	0.327-0.364	0,334	103,33%
3.	Meningkatnya Daya Saing Kota di Level Nasional	Indeks Daya Saing Daerah	-	-	-	3.75	3,74	99,73%
4.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,90%	6,51%	105,65%	6.45-6.32	6,04	105,40%
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05%	3,91%	103,58%	3.87-3.54	3,76	98,52%
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Produktif	Indeks Pembangunan Manusia	81,2	81,88	100,84%	82.77	82,71	99,93%
7.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	77,00	84,67	109,96%	86.5	N/A	N/A
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	81,05	72,49	89,44%	72.99	74,14	101,58%
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	62.00	70,98	114,48%



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100	(7)	(8)	(9)=8/7*100
	Daerah							
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,60	67,09	100,74%	69,79	63,26	90,64%
11.	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	-	-	-	73-70	75,10	94,97%

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025

2.3.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kota Kediri periode 2025-2026 dan dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kota Kediri periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan RPD 2025-2026)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	76	N/A



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
	pelayanan publik dan inovasi daerah				
1.1	Meningkatnya Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	306	318	96,23%
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,98	75	94,64%
		Nilai SAKIP	74,14	75	98,85%
1.3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah	Indeks Reformasi Hukum	98,60	60	164,33%
1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,59	3,80	94,47%
		Indeks Inovasi Daerah	66,01	55	120,02%
		Indeks SPBE	3,89*	3,8	102,37%
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,71	82	100,87%
2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,81	0,81	100,00%
2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	76,28	75,74	100,71%
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	N/A	94,91	N/A
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	1,74	3,5-4,5	38,67%
3.1	Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa	Nilai Peningkatan PDRB	1,6T	2,8T-3,8T	42,11%
3.2	Meningkatnya jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE	Nilai Realisasi Investasi	1.622 M	2.898 M	55,97%



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
3.3	Terkendalnya Harga Bahan kebutuhan pokok dan penting	Tingkat Inflasi	2,95	3±1	98,33%
		Indeks Ketahanan Pangan	70,41	75	93,88%
3.4	Meningkatnya daya tarik wisata, budaya dan olah raga	Jumlah Kunjungan Wisata	1.893.765	1.925.000	98,38%
4.	Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kemiskinan	6,04%	6,85%	113,41%
4.1	Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial	99,81%	100%	99,81%
4.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,76%	4,01%	106,65%
5.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	4,56	4,56	100,00%
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	85,58	89	96,16%
5.2	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,56	0,80	70,00%
6.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	82,1	80,9	101,48%
6.1	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	81,57%	84,80%	96,19%
6.2	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	88,71	90	98,57%
6.3	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	Persentase permukiman layak huni	94%	90,34%	104,05%
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,26	66,77	94,74%

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :



Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja indikator :

1. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 belum dapat diukur dikarenakan belum tersaji realisasinya.
 - 1.1 Indeks Sistem Merit tahun 2025 tercatat sebesar 306. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 96,23%
 - 1.2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 tercatat sebesar 70,98. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 94,64%
 - 1.3 Nilai SAKIP tahun 2025 tercatat sebesar 74,14. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 98,85%
 - 1.4 Indeks Reformasi Hukum tahun 2025 tercatat sebesar 98,60. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 164,33%
 - 1.5 Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 tercatat sebesar 66,01. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 120,02%
 - 1.6 Indeks SPBE tahun 2025 tercatat sebesar 3,89. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 102,37%
 - 1.7 Indeks SPBE tahun 2025 tercatat sebesar 3,89. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 102,37%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat sebesar 82,71. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 100,87%



- 2.1 Indeks Pendidikan tahun 2025 tercatat sebesar 0,81. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 100,00%
- 2.2 Umur Harapan Hidup tahun 2025 tercatat sebesar 76,28. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 100,71%
- 2.3 Indeks Pembangunan Gender tahun 2025 belum dapat diukur dikarenakan belum tersaji realisasinya
3. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 1,74. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 38,67%
- 3.1 Nilai Peningkatan PDRB tahun 2025 tercatat sebesar 1,6T. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 42,11%
- 3.2 Nilai Realisasi Investasi tahun 2025 tercatat sebesar 1.622 M. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 55,97%
- 3.3 Tingkat Inflasi tahun 2025 tercatat sebesar 2,95. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 98,33%
- 3.4 Indeks Ketahanan Pangan tahun 2025 tercatat sebesar 70,41. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 93,88%
- 3.5 Jumlah Kunjungan Wisata tahun 2025 tercatat sebesar 1.893.765. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 98,38%



4. Tingkat Kemiskinan tahun 2025 tercatat sebesar 6,04%. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 113,41%
 - 4.1 Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial tahun 2025 tercatat sebesar 99,81%. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 99,81%
 - 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 tercatat sebesar 3,76%. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 106,65%
5. Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2025 tercatat sebesar 4,56. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 100,00%
 - 5.1 Indeks Ketentraman dan Ketertiban tahun 2025 tercatat sebesar 85,58. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 96,16%
 - 5.2 Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 tercatat sebesar 0,56. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 70,00%
6. Indeks Kota Layak Huni tahun 2025 tercatat sebesar 82,1. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 101,48%
 - 6.1 Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang tahun 2025 tercatat sebesar 81,57%. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 96,19%



- 6.2 Indeks Infrastruktur tahun 2025 tercatat sebesar 88,71. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 98,57%
- 6.3 Persentase permukiman layak huni tahun 2025 tercatat sebesar 94%. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 104,05%
- 6.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 tercatat sebesar 63,26. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 94,74%

Tabel 3. 7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
(Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Renstra 2025-2029)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Terwujudnya ekonomi yang merata dan infrastruktur berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	1,74	4.4-5.5	31,64%
2.		Indeks Gini	0,334	0.319-0.356	95,51%
3.	Meningkatnya Daya Saing Kota di Level Nasional	Indeks Daya Saing Daerah	3,74	4.2	89,05%
4.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,04%	5.72-5.40%	89,40%
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,76%	3.66-3.35%	89,10%
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	82,71	85.42	94,49%



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
	yang Produktif				
7.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	91.5	N/A
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	74,14	80.21	92,43%
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,98	80.00	88,73%
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,26	70.25	90,05%
11.	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	75,10	61-60	79,89%

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Tahun 2025 terjadi perubahan PK setelah RPJMD tahun 2025-2029 ditetapkan. Dari 11 (sebelas) indikator pada PK perubahan, hanya terdapat 4 (empat) indikator yang berbeda dengan PK awal.

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja indikator “Indeks Gini” tahun 2025 tercatat sebesar 0,334. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 103,33%. Data ini menunjukkan progres yang signifikan. Realisasi kinerja indikator “Indeks Daya Saing Daerah” tahun 2025 tercatat sebesar 3,74. Ketika dibandingkan



dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 99,73%. Data ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan performa. Realisasi kinerja indikator “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah” tahun 2025 tercatat sebesar 70,98. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 114,48%. Data ini menunjukkan progres yang signifikan. Realisasi kinerja indikator “Indeks Risiko Bencana” tahun 2025 tercatat sebesar 75,10. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 94,97%. Data ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan performa.

2.3.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

*Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota
(Perjanjian Kinerja Tahun 2025)*

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	-	-	-	-



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Meningkatnya Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	306	-	383 (Prov. Jatim)	295 (Kota Madiun)	-
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,98	-	-	82,0876 (Kab. Kediri)	-
		Nilai SAKIP	74,14	66,42	69,05 (Rata-rata Provinsi se-Indonesia)	64,89 (Rata-rata Kab/Kota se-Indonesia)	-
1.3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah	Indeks Reformasi Hukum	98,60	-	-	99,16 (Kota Madiun)	-
1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,59	-	3,74 (Prov. Jatim)	3,59 (Kota Madiun)	-
		Indeks Inovasi Daerah	66,01	49,43	-	-	-
		Indeks SPBE	3,89*	3,23	-	4,57 (Kota Madiun)	-
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,71	-	76,13 (Prov. Jatim)	85,12 (Kota Madiun)	-
2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,81	-	-	-	-
2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	76,28	74,47	75,36 (Prov. Jatim)	76,11 (Kota Madiun)	-
2.3	Meningkatnya	Indeks Pembangunan	N/A	-	-	-	-



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Gender					
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	1,74	5,11	5,33 (Prov. Jatim)	5,69 (Kota Madiun)	-
3.1	Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa	Nilai Peningkatan PDRB	1,6T	-	-	-	-
3.2	Meningkatnya jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE	Nilai Realisasi Investasi	1.622 M	-	-	-	-
3.3	Terkendalinya Harga Bahan kebutuhan pokok dan penting	Tingkat Inflasi	2,95	2,92	2,63 (Prov. Jatim)	2,7 (Kota Madiun)	-
		Indeks Ketahanan Pangan	70,41	-	72,66 (Prov. Jatim)	-	-
3.4	Meningkatnya daya tarik wisata, budaya dan olah raga	Jumlah Kunjungan Wisata	1.893.765	-	-	-	-
4.	Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kemiskinan	6,04%	-	9,50% (Prov. Jatim)	3,89% (Kota Madiun)	-
4.1	Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial	99,81%	-	-	-	-



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,76%	-	3,88% (Prov. Jatim)	4,29% (Kota Madiun)	-
5.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	4,56	3,89	-	-	-
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	85,58	-	-	-	-
5.2	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,56	-	-	0,61 (Nilai rata-rata Kab/Kota)	-
6.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	82,1	-	-	-	-
6.1	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	81,57%	-	-	-	-
6.2	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	88,71	-	-	-	-
6.3	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	Persentase permukiman layak huni	94%	-	-	-	-
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,26	-	-	-	-

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025



Tabel 3. 9 **Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota (Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya ekonomi yang merata dan infrastruktur berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	1,74	5,11	5,33 (Prov. Jatim)	5,69 (Kota Madiun)	-
2.		Indeks Gini	0,334	0,381	0,369 (Prov. Jatim)	-	-
3.	Meningkatnya Daya Saing Kota di Level Nasional	Indeks Daya Saing Daerah	3,74	3,50	3,91 (Prov. Jatim)	-	-
4.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,04%	-	9,50% (Prov. Jatim)	3,89% (Kota Madiun)	-
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,76%	-	3,88% (Prov. Jatim)	4,29% (Kota Madiun)	-
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Produktif	Indeks Pembangunan Manusia	82,71	-	76,13 (Prov. Jatim)	85,12 (Kota Madiun)	-
7.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	-	-	-	-
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	74,14	66,42	69,05 (Rata-rata Provinsi se-Indonesia)	64,89 (Rata-rata Kab/Kota se-Indonesia)	-
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,98	-	-	82,0876 (Kab. Kediri)	-



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,26	-	-	-	-
11.	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	75,10	-	-	-	-

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025

2.3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi (Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi	Indeks Reformasi Birokrasi	74,64	N/A	N/A	Permasalahan : 1. Belum meratanya pemahaman terhadap RB	Solusi : 1. Penguatan implementasi RB Tematik, dengan memastikan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pada pelayanan publik dan inovasi daerah					Tematik, khususnya keterkaitan antara program/kegiatan Perangkat Daerah dengan isu prioritas. 2. Kualitas pengelolaan kinerja dan SAKIP antar Perangkat Daerah belum merata, sehingga mempengaruhi konsistensi capaian RB secara keseluruhan. 3. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi birokrasi belum sepenuhnya terintegrasi lintas Perangkat Daerah. Keberhasilan : 1. Ketersediaan regulasi dan pedoman pelaksanaan RB, baik nasional maupun daerah, sebagai acuan yang jelas bagi seluruh Perangkat Daerah. 2. Peran aktif Tim Reformasi	seluruh Perangkat Daerah mengaitkan program dan kegiatan terhadap sasaran prioritas pembangunan daerah dan isu strategis nasional. 2. Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan SAKIP, melalui pendampingan, klinik kinerja, serta penguatan peran APIP dalam melakukan reuiu dan pengendalian mutu. 3. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui standarisasi pelayanan, inovasi layanan, dan peningkatan kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan. 5. Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian internal, termasuk implementasi SPIP dan peningkatan maturitas pengendalian risiko.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Birokrasi Daerah. 3. Sinergi lintas Perangkat Daerah, terutama dalam implementasi RB Tematik dan peningkatan kualitas pelayanan public. 4. Pemanfaatan teknologi informasi, yang mendukung transparansi, efisiensi, dan integrasi tata kelola pemerintahan. 5. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, melalui survei kepuasan, pengaduan, dan keterlibatan dalam evaluasi pelayanan public.	6. Monitoring dan evaluasi RB secara berkala, serta penetapan rencana aksi perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.
1.1	Meningkatnya Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	314	306	97,45%	Permasalahan : Sistem manajemen talenta ASN Pemerintah Kota Kediri telah tersedia namun belum divalidasi oleh BKN RI.	Solusi : Menyelenggarakan ekspose system manajemen talenta ASN Kota Kediri dengan BKN RI.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Keberhasilan : 1. Perencanaan Kebutuhan ASN dan Pengadaan ASN serentak berpedoman pada peraturan yang berlaku. 2. Pengembangan kompetensi ASN melalui webinar yang dapat memperluas cakupan peserta. 3. Penggunaan system informasi dalam layanan kepegawaian. 4. Pembinaan kinerja ASN dengan mekanisme pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kinerja dan disiplin ASN.	
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	70,98	101,40%	Permasalahan : 1. Lemahnya manajemen waktu yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran serta	Solusi : 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran dan pelaksanaan program. 2. Meningkatkan koordinasi dan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pelaksanaan kegiatan. 2. Pengalokasian anggaran APBD yang belum sesuai dengan mandatory spending. 3. Penyerapan anggaran yang lambat dan rendah. 4. Rendahnya kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif. Keberhasilan : 1. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 2. Penyajian dokumen pengelolaan keuangan (APBD, laporan realisasi)	komunikasi antara perangkat daerah dan legislatif untuk mengatasi keterlambatan APBD. 3. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pendapatan daerah agar dapat meningkatkan kemampuan daerah. 4. Mempercepat penyerapan anggaran. 5. Memastikan ketepatan penginputan data pada system pengukuran IPKD dan memanfaatkan asistensi dari kemendagri.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						secara terbuka dan mudah diakses publik melalui sistem informasi pemerintahan. 3. Adanya sinkronisasi yang tinggi antara dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS/APBD). 4. Peningkatan PAD. 5. Penggunaan teknologi informasi dalam operasional keuangan untuk meminimalisir human error dan meningkatkan efisiensi.	
		Nilai SAKIP	73	74,14	101,56%	Permasalahan : 1. Masih ditemukan indikator kinerja yang belum relevan atau belum cukup kuat untuk menjawab kondisi sasaran strategis yang diharapkan.	Solusi : 1. Melakukan reviu perencanaan kinerja level Kota dan PD dengan memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang relevan di RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2025-



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Pohon kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan logis (sebab-akibat) yang menunjang kinerja di atasnya secara langsung dan belum dijabarkan hingga level operasional. 3. Kolaborasi lintas sektor (crosscutting) atau hubungan aktivitas antar bidang/instansi belum terbangun secara memadai. 4. Formulasi perhitungan atau data yang digunakan pada beberapa Perangkat Daerah (PD) dinilai belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. 5. Belum adanya integrasi antara aplikasi pengukuran kinerja individu (PUSDASIP) dengan aplikasi pengukuran	2029. 2. Menjabarkan pohon kinerja secara logis dari level strategis hingga operasional dan memanfaatkannya dalam penyusunan RPJMD serta Renstra PD Thun 2025-2029. 3. Menyempurnakan pemetaan aktivitas crosscutting guna mengidentifikasi dukungan yang diperlukan dari entitas atau PD lain. 4. Memastikan formulasi perhitungan dan keandalan data sesuai dengan kondisi yang ingin dicapai, serta melakukan reviu ulang jika data sulit diukur. 5. Pemerintah Kota Kediri akan membangun sistem/aplikasi APKPD kinerja individu selaras dan menunjang keberhasilan kinerja organisasi.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kinerja organisasi (APKPD), sehingga capaian individu belum tentu mencerminkan capaian organisasi. 6. Belum terdapat sistem informasi kinerja yang andal dan terintegrasi, sehingga data kinerja mudah diakses dan dianalisis. 7. Kualitas laporan kinerja Perangkat Daerah belum memiliki kualitas yang merata, terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum memberikan analisis faktor kegagalan serta solusinya secara mendalam dan substantif. 8. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam melakukan monev atas kinerja secara berkala. Keberhasilan :	6. Perangkat Daerah melakukan analisis keberhasilan kegagalan serta solusi atas kinerja secara berkala. 7. Melaksanakan klinik pendampingan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas dokumen pelaporan kinerja. 8. Melakukan pembangunan/ pengembangan sistem yang menyajikan informasi kinerja.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						1. Telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 baik untuk Kepala Daerah maupun PD secara tepat waktu. 2. Terdapat peningkatan kualitas dokumen perencanaan jangka pendek (Perjanjian Kinerja) dibanding tahun sebelumnya dalam hal perumusan kinerja, indikator maupun target kinerjanya. 3. Telah disusun pohon kinerja baik level kota hingga Perangkat Daerah beserta cascading kinerjanya. 4. Telah dilakukan perbaikan	



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pada dokumen Renstra PD dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan detail formulasi perhitungan dan penanggung jawab data yang jelas. 5. Ketersediaan regulasi dan pedoman teknis yang jelas sebagai acuan penyusunan laporan kinerja. 6. Kompetensi SDM pengelola SAKIP yang cukup memadai. 7. Peran aktif APIP dan Bagian Organisasi dalam pendampingan, reviu, dan pengendalian kualitas laporan kinerja. 8. Koordinasi dan komunikasi lintas Perangkat Daerah yang efektif dalam penyusunan dan evaluasi laporan kinerja.	



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah	Indeks Reformasi Hukum	98,25	98,60	100,36%	Permasalahan : Optimalisasi penataan database peraturan perundang- undangan dimana pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Keberhasilan : 1. Koordinasi yang baik dengan Kementerian Hukum an HAM untuk memperkuat harmonisasi regulasi. 2. Kompetensi perancang peraturan perundang- undangan yang berkualitas. 3. Re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu yang berkualitas.	Solusi : 1. Perlu komitmen pimpinan dan pengelola JDIH untuk membenahi pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. 2. Memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja JDIH.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,70	3,59	97,03%	Permasalahan : 1. Pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) belum optimal, sehingga perbaikan layanan belum sepenuhnya berbasis umpan balik pengguna layanan. 2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan pada sebagian unit layanan belum memadai dan belum ramah kelompok rentan. Keberhasilan : 1. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan penilaian terhadap kualitas pelayanan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. 3. Sinergi lintas Perangkat	Solusi : 1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala serta pemanfaatan hasil SKM sebagai dasar perbaikan layanan yang terukur dan berkelanjutan. 2. Optimalisasi kanal pengaduan dan umpan balik masyarakat, serta memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara cepat dan transparan. 3. Pengembangan dan integrasi layanan berbasis digital, termasuk penyederhanaan proses bisnis pelayanan dan pemanfaatan aplikasi pelayanan public. 4. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan, dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Daerah dan unit layanan, dalam penyelenggaraan pelayanan yang terpadu dan berkelanjutan. 4. Ketersediaan SDM pelayanan yang kompeten dan berintegritas.	5. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala, termasuk penilaian unit layanan dengan kinerja terbaik dan pembinaan terhadap unit yang belum memenuhi standar.
		Indeks Inovasi Daerah	53	66,01	124,55%	Permasalahan : Tingkat kematangan inovasi di beberapa PD masih rendah. Keberhasilan : Komitmen Kepala Daerah untuk mendorong pertumbuhan inovasi daerah. Komitmen tersebut dilakukan melalui perwujudan Misi "Aman" sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public.	Solusi : Melengkapi syarat administrasi dalam pelaporan inovasi.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indeks SPBE	3,95	3,89*	98,48%	Permasalahan : Nilai Indeks SPBE berdasarkan MONEV Tahun 2024, karena pada Tahun 2025 Kota Kediri tidak menjadi piloting transisi MONEV SPBE menjadi PEMDI.	Solusi : 1. Pada tahun 2026 Indeks SPBE akan bertransformasi menjadi Indeks PEMDI (Pemerintah Digital) sehingga perlu adanya reviu Arsitektur SPBE Kota Kediri. 2. Kolaborasi yang solid dan baik antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82	82,71	100,86%	Permasalahan: 1. Pertumbuhan dimensi pendidikan masih relatif kecil. Peningkatan Harapan Lama Sekolah hanya 0,01 tahun, menunjukkan bahwa percepatan peningkatan akses pendidikan masih terbatas. 2. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar kelompok Masyarakat. Masih terdapat kelompok	Solusi : 1. Penguatan kualitas pendidikan • Meningkatkan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. • Penguatan program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. • Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana pendidikan. 2. Peningkatan layanan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						masyarakat tertentu yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan tinggi dan layanan kesehatan berkualitas. 3. Ketergantungan peningkatan standar hidup pada pertumbuhan ekonomi tertentu. Peningkatan pengeluaran per kapita belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. 4. Tantangan keberlanjutan peningkatan IPM. Karena IPM Kota Kediri sudah berada pada kategori sangat tinggi, peningkatan selanjutnya akan semakin sulit dicapai tanpa inovasi kebijakan yang lebih progresif.	kesehatan masyarakat • Penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan. • Program pencegahan penyakit serta peningkatan gizi masyarakat. • Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup sejak dini. 3. Penguatan ekonomi masyarakat dan pengurangan kesenjangan • Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. • Penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi dan pengembangan sektor unggulan daerah. • Program pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Peningkatan integrasi



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Keberhasilan: 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Terlihat dari meningkatnya angka harapan hidup menjadi 76,28 tahun, naik 0,34 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya akses layanan kesehatan, program promotif dan preventif, serta penguatan pelayanan fasilitas kesehatan. 2. Perbaikan kualitas pendidikan masyarakat Terjadi peningkatan pada indikator pendidikan, yaitu: • Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi 15,72 • Rata-rata Lama Sekolah	program pembangunan manusia • Memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. • Pemanfaatan data terpadu untuk penentuan sasaran program secara lebih tepat.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(RLS) meningkat menjadi 11,09 Kondisi ini menunjukkan semakin terbukanya akses pendidikan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Dimensi standar hidup layak mengalami peningkatan dengan rata-rata pengeluaran riil per kapita naik sebesar Rp. 614 ribu atau 4,49%, yang menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat serta pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah. 4. Sinergi program pembangunan antar perangkat daerah Program di bidang pendidikan,	



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan cukup efektif sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.	
2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,80	0,81	101,25%	Permasalahan : 1. Masih terdapat kesenjangan akses pendidikan dan penyediaan infrastruktur berkualitas. 2. Kurangnya guru yang berkualitas, kompetensi yang belum merata, serta permasalahan kesejahteraan guru (terutama guru honorer) yang memengaruhi motivasi dan mutu pengajaran. 3. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu memaksa anak putus	Solusi : 1. Peningkatan pemerataan kualitas layanan pendidikan dan akses layanan pendidikan baik formal dan non formal di semua jenjang. 2. Pemberian bantuan pendidikan disemua jenjang khusus bagi siswa miskin untuk masuk disekolah negeri agar tetap sekolah, dan mengurangi angka putus sekolah. 3. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan baik formal dan non formal.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga memengaruhi rata-rata lama sekolah. 4. Tingkat literasi dan keterampilan penduduk yang masih rendah berdampak langsung pada indeks pendidikan, terutama bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Keberhasilan : 1. Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH), persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf mencapai angka yang sangat tinggi. 2. Optimalisasi Harapan Lama Sekolah (HLS), adanya peningkatan akses dan	4. Optimalisasi Program Wajib Belajar, Kebijakan yang lebih efektif untuk menekan angka putus sekolah dan memastikan anak usia 7-12 tahun dapat menuntaskan pendidikan dasar (Wajar Dikdas). 5. Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Guru, Perbaikan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi, yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di kelas. 6. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pendidikan, Penggunaan teknologi (seperti rapor pendidikan) untuk memperbaiki metode pengajaran dan efisiensi pengelolaan sekolah. 7. Perbaikan Infrastruktur,



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						partisipasi sekolah yang lebih baik bagi anak-anak usia sekolah, di mana semakin banyak anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. 3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang meningkat, Rata-rata tahun yang dihabiskan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal semakin tinggi, menunjukkan keberhasilan program pemberantasan buta aksara dan wajib belajar. 4. Pemerataan Akses dan Kualitas, Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata dan adil (meluas, merata, dan berkeadilan) serta peningkatan kualitas	rehabilitasi sekolah rusak dan penyediaan sarana belajar yang memadai.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						guru. 5. Pemberian bantuan bagi siswa miskin untuk masuk disekolah negeri di semua jenjang. 6. Pemberian bantuan pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan mahasiswa.	
2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	75,74	76,28	100,71%	Keberhasilan : 1. Akses pelayanan kesehatan yang baik dan merata Dimana puskesmas, rumah sakit, tenaga Kesehatan tersedia sampai desa 2. Seluruh penduduk sudah terjamin kesehatannya 3. Jumlah kematian ibu dan bayi rendah dan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya 4. Akses air bersih layak 5. Kesadaran pemanfaatan	Solusi : 1. Skrining rutin penyakit tidak menular 2. Penguatan promotive dan preventif melalui kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 3. Edukasi gizi, aktifitas fisik, dan berhenti merokok, revitalisasi Posyandu dan Posbindu PTM



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						layanan Kesehatan meningkat	
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	94,72	N/A	N/A	Meskipun nilai IPG Tahun 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri menunjukkan komitmen dalam mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. Permasalahan : 1. Pada beberapa sektor pembangunan masih terdapat kesenjangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan pengambilan Keputusan 2. Data Pembangunan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin masih belum sepenuhnya tersedia secara komprehensif sehingga	Solusi : 1. Penguatan sistem data gender 2. Penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) • Mengembangkan basis data terpilah berdasarkan jenis kelamin pada seluruh sektor pembangunan. • Memanfaatkan data tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif gender. • Meningkatkan integrasi analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah. • Mendorong seluruh perangkat daerah menyusun program yang responsif gender.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						menyulitkan analisis kesenjangan gender secara lebih mendalam dalam pengambilan Keputusan Keberhasilan : 1. Pemerintah Kota Kediri telah mendorong pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan sehingga kebutuhan laki-laki dan perempuan dapat terakomodasi secara lebih seimbang. 2. Berbagai program pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi turut	



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						mendukung peningkatan kesetaraan gender. 3. Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun kelembagaan masyarakat menunjukkan kecenderungan meningkat sehingga berkontribusi pada pembangunan manusia yang lebih inklusif.	
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	3,5-4,5	1,74	43,50%	Permasalahan : 1. Sektor industri pengolahan yang menjadi sektor dominan hanya tumbuh 0,05 persen, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.	Solusi : 1. Mengembangkan sektor ekonomi potensial di luar industri pengolahan seperti perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, pariwisata, dan ekonomi digital. 2. Mendorong pengembangan UMKM sebagai penggerak



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Struktur ekonomi Kota Kediri sangat bergantung pada sektor industri pengolahan tembakau, sehingga ketika sektor tersebut mengalami perlambatan maka pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan ikut terpengaruh. 3. Meskipun sektor non-industri tumbuh cukup tinggi, kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil sehingga belum mampu mengimbangi dominasi sektor industri pengolahan. Keberhasilan : 1. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri pada sektor non-industri pengolahan mencapai 7,33 persen, yang	ekonomi lokal. 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor baru. 4. Mendorong investasi pada sektor ekonomi baru yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Mengembangkan sektor ekonomi alternatif yang mampu menjadi sumber pertumbuhan baru.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						menunjukkan adanya perkembangan pada sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, jasa, informasi dan komunikasi, serta sektor akomodasi dan makan minum. 2. Sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Kediri yaitu sebesar 78,55 persen, yang menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah. 3. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 10,77 persen, menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dan mendukung	



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						perputaran ekonomi daerah. 4. Sektor informasi dan komunikasi yang menyumbang 2,34 persen menunjukkan adanya perkembangan ekonomi berbasis digital yang semakin mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.	
3.1	Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa	Nilai Peningkatan PDRB	2,3-3,2T	1,6T	69,57%	Permasalahan : Keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan, fluktuasi harga komoditas, serta keterbatasan skala usaha pada sektor pertanian dan perikanan sehingga nilai tambah ekonomi yang dihasilkan belum optimal. Keberhasilan : 1. tingginya aktivitas distribusi barang dan jasa, pertumbuhan usaha	Solusi : 1. pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan produktivitas industri melalui penguatan inovasi, pengembangan hilirisasi produk, serta peningkatan investasi di sektor industri pengolahan agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. 2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, akses pembiayaan,



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						perdagangan, serta meningkatnya daya beli masyarakat. 2. peningkatan kapasitas produksi serta efektivitas program pengembangan sektor pangan dan perikanan.	serta pendampingan usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.
3.2	Meningkatnya jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE	Nilai Realisasi Investasi	1.414 M	1.622 M	114,71%	Permasalahan : 1. Dikarenakan menggunakan OSS yang terpusat di Kementerian Investasi, Kota Kediri hanya mengusulkan dan melaporkan ke kementerian investasi dan secara otomatis sistem oss juga melakukan pembekuan akun akun oss. 2. Adanya investasi tol secara otomatis menambah nilai investasi kota Kediri, namun investasi yg ditanamkan oleh PT. Surya Sapta Agung Tol sebesar 9,920 M diakui	Solusi : 1. Selalu berkoordinasi dgn BKPM, DPMPTSP propinsi, dan OPD terkait dengan pelaksanaan pengawasan berusaha, serta melakukan notifikasi, bimbingan teknis penyusunan LKPM. 2. Melakukan updating dan koordinasi terkait realisasi investasi PT. Surya sapta Agung Tol. 3. Melakukan penyusunan peta potensi dan peluang investasi serta memperkuat regulasi sehingga memberikan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						oleh LKPM yang tertanam di kota kediri hanya 250 juta dan belum seluruh investasi yg tertanam belum terealisasi 100% dikarenakan proyek masih berjalan. 3. Minat investasi di kota kediri belum tergambarkan dgn jelas dikarenakan belum terpetakannya potensi dan peluang investasi. Keberhasilan : 1. Adanya peraturan BKPM yang menyatakan bahwa 2 kali periode berturut turut pelaku usaha tidak melaporkan LKPM akan diberikan SP melalui OSS. 2. Adanya investasi Tol Kediri-Tulugagung sebesar 250 Juta. 3. Adanya Bandara dan Jalan	kepastian hukum dan minat investasi di kediri akan terus berkembang.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Tol Kertosono Tulungagung menumbuhkan minat investasi di Kota Kediri.	
3.3	Terkendalnya Harga Bahan kebutuhan pokok dan penting	Tingkat Inflasi	3±1	2,95	98,33%	Permasalahan : 1. Kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,92 persen, yang merupakan komponen penting dalam konsumsi masyarakat. 2. Kenaikan signifikan pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya Kelompok ini mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu 14,34 persen, yang dapat	Solusi : 1. Penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pemantauan harga, pengendalian distribusi, sertaantisipasi lonjakan harga pada komoditas strategis. 2. Menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan • Memperkuat kerja sama antar daerah dalam penyediaan komoditas pangan. • Meningkatkan efisiensi sistem distribusi agar pasokan barang tetap terjaga. 3. Pelaksanaan operasi pasar



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						memberikan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga. 3. Potensi fluktuasi harga komoditas pangan Harga komoditas pangan masih rentan terhadap faktor cuaca, distribusi, serta kondisi pasokan dari daerah lain sehingga dapat memicu kenaikan harga. 4. Ketergantungan pasokan dari luar daerah Beberapa komoditas kebutuhan pokok masih bergantung pada pasokan dari daerah lain sehingga berpotensi menyebabkan fluktuasi harga apabila terjadi gangguan distribusi. Keberhasilan : 1. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	dan stabilisasi harga Melakukan pasar murah dan operasi pasar pada periode tertentu, terutama pada saat terjadi lonjakan harga atau pada momentum hari besar keagamaan. 4. Penguatan produksi pangan lokal Mendorong peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. 5. Penguatan sistem pemantauan harga berbasis data Pemanfaatan sistem informasi harga secara real-time untuk mendeteksi potensi kenaikan harga secara lebih cepat sehingga langkah pengendalian dapat segera dilakukan.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(TPID) yang berjalan efektif dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui pemantauan harga, operasi pasar, serta penguatan distribusi barang. 2. Ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok yang relatif terjaga, sehingga mampu mengantisipasi lonjakan harga terutama pada komoditas pangan. 3. Penguatan sistem distribusi dan stabilisasi harga, termasuk melalui kegiatan pasar murah dan kerja sama antar daerah dalam menjaga pasokan komoditas strategis. 4. Stabilitas sektor ekonomi daerah, yang mendukung keseimbangan antara permintaan dan pasokan	



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						barang dan jasa di masyarakat.	
		Indeks Ketahanan Pangan	74	70,41	95,15%	Permasalahan : 1. Terbatasnya jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. 2. Rendahnya konsumsi protein hewani. 3. Terbatasnya daya beli masyarakat karena kemiskinan. 4. Harga pangan yang berfluktuasi. 5. Belum memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Keberhasilan : 1. Penurunan prevalensi stunting. 2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah dan	Solusi : 1. Melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). 2. Perluasan akses terhadap sistem informasi pasar dan harga pangan. 3. Meningkatkan upaya penganeekaragaman pangan (sumber kalori, dan protein hewani) dengan tujuan meningkatkan skor PPH Konsumsi. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan indeks pertanian. 5. Menerapkan teknologi inovatif spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian pangan. 6. Menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Operasi Pasar Murni.	(CPPD) diawali dengan penyusunan regulasi.
3.4	Meningkatnya daya tarik wisata, budaya dan olah raga	Jumlah Kunjungan Wisata	1.800.000	1.893.765	105,21%	Permasalahan : Daya tarik destinasi wisata yang belum sepenuhnya berkembang dan terkelola secara optimal, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti aksesibilitas, fasilitas pendukung dan layanan di sekitar destinasi wisata yang mempengaruhi kenyamanan dan minat wisatawan untuk berkunjung kembali. Keberhasilan : 1. Kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan event yang menarik wisatawan. 2. Adanya peningkatan ragam	Solusi : Pengembangan pariwisata yang lebih terintegrasi, meliputi peningkatan kualitas destinasi, penguatan promosi, diversifikasi atraksi wisata, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						atraksi wisata (diantaranya Apeksi Nite Carnival 2025, Napak Tilas Jenderal Soedirman). 3. Adanya beragam wisata kuliner dan belanja.	
4.	Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kemiskinan	6,50%	6,04%	107,08%	Permasalahan : 1. Masih terdapat jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan Pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Kota Kediri masih mencapai 17,93 ribu jiwa, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu terus diperkuat. 2. Kerentanan terhadap guncangan ekonomi Sebagian masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan masih rentan kembali menjadi miskin	Solusi : 1. Penguatan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi Mendorong pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan masyarakat, serta perluasan akses permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Peningkatan kualitas perlindungan sosial Memperkuat program bantuan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						apabila terjadi tekanan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau penurunan pendapatan. 3. Keterbatasan kesempatan kerja yang produktif Sebagian penduduk miskin masih bekerja pada sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah sehingga peningkatan kesejahteraan belum optimal. 4. Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi Sebagian kelompok masyarakat masih memiliki keterbatasan akses terhadap permodalan, peluang usaha, serta peningkatan keterampilan kerja. Keberhasilan:	guna menjaga daya beli masyarakat. 3. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja Mendorong investasi dan pengembangan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas. 4. Peningkatan akses terhadap layanan dasar Memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. 5. Penguatan basis data kemiskinan yang terintegrasi Pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial secara lebih optimal agar program



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,02 pada tahun 2024 menjadi 0,62 pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. 2. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menurun dari 0,25 menjadi 0,21, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang.	penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran
4.1	Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial	100%	99,81%	99,81%	1. Penyaluran bantuan Sosial ke KPM miskin dan rentan (Desil 1 - 4 DTSEN) 2. Penggunaan DTSEN sebagai data Tunggal penyaluran bantuan Sosial 3. Penyaluran Bantanke KPM di Kelompok lain khususnya dalam kategori SPM	Solusi : 1. Pendampingan langsung ke masing - masing Karang Taruna di Kelurahan 2. Monev berkala aktifitas PSKS Perorangan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,9%	3,76%	103,59%	Permasalahan : 1. Pertumbuhan lapangan kerja belum sepenuhnya sebanding dengan pertambahan jumlah angkatan kerja baru setiap tahun. 2. Masih terdapat kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri sehingga sebagian tenaga kerja belum terserap secara optimal. 3. Sebagian tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah. Keberhasilan : 1. Meningkatnya kemampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja yang	Solusi : 1. Melalui penguatan program pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar kerja serta peningkatan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja. 2. Mendorong pertumbuhan sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti UMKM, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif. 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik investor untuk membuka usaha baru yang dapat menciptakan lapangan kerja. 4. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta pendampingan usaha bagi masyarakat.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dipengaruhi oleh berkembangnya sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berperan sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. 2. program pemerintah daerah seperti pelatihan keterampilan tenaga kerja, peningkatan kompetensi angkatan kerja, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja turut berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menekan tingkat pengangguran di daerah	
5.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	4,6	4,56	99,13%	Permasalahan : Disinformasi di media sosial yang memprovokasi intoleransi. Keberhasilan :	Solusi : Membentuk tim tanggap cepat (Media Center) yang berfungsi memantau isu sensitif dan segera menerbitkan klarifikasi



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						1. Monitoring dan Evaluasi (monev) IKUB yang menjadi early warning' 2. Peran aktif FKUB dan dukungan pedoman kebijakan pemerintah. 3. Banyaknya Lembaga Pendidikan/ pondok pesantren. 4. Figur-figur kiai dan pimpinan pesantren yang berpandangan moderat. 5. Komunitas lokal yang aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan.	melalui kanal resmi pemerintah.
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	88	85,58	97,25%	Permasalahan : 1. Penurunan persepsi masyarakat dengan adanya pelanggaran berulang di lokasi yang sama. 2. Meningkatnya aktivitas masyarakat dengan	Solusi : 1. Optimalisasi konsistensi penertiban dan pemantauan lokasi rawan pelanggaran. 2. Melakukan penertiban terpadu dan pengawasan rutin, serta koordinasi dengan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						bertambahnya PKL, reklame ilegal, atau kegiatan usaha musiman 3. Kurang pemahaman masyarakat tertang substansi PERDA No. 1 Tahun 2016 4. Komposisi responden berbeda (lebih banyak pelaku usaha/warga terdampak) Keberhasilan : 1. Penertiban dilakukan secara rutin dan merata di seluruh lokasi rawan pelanggaran. 2. Sinergi antar OPD dan aparat wilayah memastikan penanganan pelanggaran lebih cepat dan efektif. 3. Partisipasi masyarakat dengan memahami dan mendukung Perda, serta aktif melaporkan	Perangkat Daerah terkait. 3. Optimalisasi jadwal patroli dan penugasan personel sesuai prioritas lokasi dan waktu rawan. 4. Optimalisasi kegiatan sosialisasi Perda secara masif dan edukatif kepada warga dan pelaku usaha secara langsung dan melalui media sosial. 5. Melakukan evaluasi hasil survei secara rutin dan menambah titik survei. 6. Optimalisasi SDM dengan penugasan personel sesuai prioritas, pemanfaatan teknologi, dan patroli terjadwal.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						pelanggaran. 4. Optimalisasi SDM dan Sumber Daya dengan penugasan personel sesuai prioritas, pemanfaatan teknologi, dan patroli terjadwal meningkatkan efektivitas penertiban. 5. Sosialisasi dan edukasi Perda untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Perda mengurangi pelanggaran akibat ketidaktahuan. 6. Evaluasi dan pemantauan rutin, survei dan monitoring berkala membantu mengetahui perkembangan dan menyesuaikan strategi penertiban.	
5.2	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,78	0,56	71,79%	Permasalahan : 1. Rendahnya pengembangan kebijakan penanggulangan	Solusi : 1. Melakukan sinkronisasi rekomendasi aksi serta hasil



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						bencana yang mendukung peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana. Sebagai salah satu contoh adalah tidak adanya prosedur operasi standar yang telah dilegalkan sebagai pedoman untuk penentuan status keadaan darurat bencana daerah dan aktivasi system komando penanganan darurat bencana daerah. 2. Struktur data yang disampaikan oleh lembaga dan instansi sebagai bukti dukung dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) beberapa belum memenuhi syarat sebagai bukti dukung yang dapat diverifikasi. 3. Sebagian besar instansi dan lembaga yang berpartisipasi	identifikasi potensi permasalahan dari penilaian indeks ketahanan daerah tahun 2025 sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2026 serta penyusunan perencanaan kerja untuk tahun 2027. 2. Memperkuat asistensi dan monitoring data dukung dengan membagi pada beberapa tahapan pelaksanaan penilaian sebelum proses verifikasi dilakukan.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dalam penilaian IKD maupun dari internal BPBD sendiri, kesulitan dalam menyusun outcome dari kegiatan yang dilaksanakan di wilayah yang rawan banjir. Keberhasilan : 1. Dukungan optimal dari lintas sektor baik internal maupun eksternal dalam pemenuhan data dukung untuk penilaian Indeks Ketahanan Daerah. 2. Soliditas dan konsistensi tim kerja dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi dan Lembaga yang berpartisipasi pada penilaian IKD untuk pemenuhan data dukung berdasarkan petunjuk teknis serta rekomendasi aksi penilaian IKD tahun	



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						sebelumnya (tahun 2024).	
6.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	82	82,1	100,12%	Permasalahan : 1. Faktor urbanisasi dengan diindikasikan pertambahan penduduk kota yang semakin cepat. 2. Masih adanya RTLH yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, khususnya dalam hal kepemilikan surat tanah/SHM. Keberhasilan : 1. Investasi dalam infrastruktur dan pelayanan publik, yang berkontribusi pada pertumbuhan jangka Panjang. 2. Tersedianya DAK TPPKT dan Bantuan Program Provinsi Jawa Timur dalam mengentaskan kawasan	Solusi : 1. Peningkatan sektor infrastruktur dan layanan dasar. 2. Koordinasi dengan pihak kelurahan agar persyaratan dimaksud bisa tercukupi dan target jumlah RTLH yang ditangani tercapai.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kumuh, tersedianya dokumen penanganan kumuh di tingkat kota (RP2KPKPK) dan tingkat kelurahan (RPLP). Terlaksananya rehabilitasi RTLH melalui APBD, APBN, BAZNAS, dan CSR.	
6.1	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	84,60%	81,57%	96,42%	Permasalahan : 1. Sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh 136system136kat di Kota Kediri. 2. Tidak seluruh 136system136kat dapat mengakses 136system berbasis website. 3. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kebijakan Keberhasilan : 1. Perlu dilaksanakan	Solusi : 1. Adanya tim pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan Gedung. 2. Adanya peran aktif masyarakat melalui "lapor mbak wali" dan media lainnya



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang. 2. Diperlukan pengoptimalan terhadap sistem pada SITR agar informasi dan pelayanan dapat dilakukan secara digital. 3. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan fokus pada Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat dan Penegakan RTRW.	
6.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	88	88,71	100,80%	Permasalahan : 1. Masih terdapat jalan dengan kondisi tidak mantap sepanjang 36,3 km atau sekitar 9,2 persen dari total panjang jalan	Solusi : 1. Meningkatkan program pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas jalan guna mengurangi ruas jalan dengan kondisi rusak.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kewenangan kota yang terdiri dari kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kondisi ini dapat menghambat kelancaran mobilitas masyarakat serta berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. 2. Cakupan trotoar pada jalan strategis kota masih belum optimal, dengan persentase sebesar 72,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian ruas jalan strategis belum dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang memadai. 3. Potensi peningkatan kemacetan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jaringan jalan dan manajemen lalu lintas yang lebih baik.	2. Prioritas penanganan perlu diberikan pada jembatan yang berada dalam kondisi rusak berat dan kritis guna menjaga keselamatan pengguna jalan. 3. Meningkatkan pembangunan trotoar pada ruas jalan strategis kota guna mendukung mobilitas masyarakat serta menciptakan lingkungan kota yang lebih ramah bagi pejalan kaki. 4. Mengoptimalkan rekayasa lalu lintas, pengaturan simpang, serta pengembangan sistem transportasi perkotaan guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan. 5. Melakukan pemeliharaan rutin jaringan drainase agar tetap berfungsi optimal dalam



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Keberhasilan : 1. sebagian besar jaringan jalan kota telah memenuhi standar pelayanan sehingga dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang 2. arus lalu lintas masih stabil meskipun kecepatan kendaraan mulai dikendalikan akibat meningkatnya kepadatan lalu lintas 3. kondisi jembatan secara umum tergolong mantap, dengan panjang jembatan dalam kondisi baik mencapai 1.107,6 meter atau 75,14 persen dari total panjang jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah kota 4. akses air minum	mengalirkan air dan mencegah terjadinya genangan atau banjir.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						terlindungi telah mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Kota Kediri telah memperoleh layanan air bersih yang memadai. 5. kondisi drainase juga menunjukkan kinerja yang baik, dengan persentase drainase dalam kondisi baik mencapai 91,2 persen, yang mendukung sistem pengendalian genangan dan pengelolaan air perkotaan.	
6.3	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	Persentase permukiman layak huni	89,71%	94%	104,78%	Permasalahan : 1. Faktor urbanisasi dengan diindikasikan pertambahan penduduk kota yang semakin cepat. 2. Masih adanya RTLH yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, khususnya	Solusi : 1. Peningkatan sektor infrastruktur dan layanan dasar. 2. Koordinasi dengan pihak kelurahan agar persyaratan dimaksud bisa tercukupi dan target jumlah RTLH yang ditangani tercapai.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dalam hal kepemilikan surat tanah/SHM. Keberhasilan : 1. Investasi dalam infrastruktur dan pelayanan publik, yang berkontribusi pada pertumbuhan jangka Panjang. 2. Tersedianya DAK TPPKT dan Bantuan Program Provinsi Jawa Timur dalam mengentaskan kawasan kumuh, tersedianya dokumen penanganan kumuh di tingkat kota (RP2KPKPK) dan tingkat kelurahan (RPLP). Terlaksananya rehabilitasi RTLH melalui APBD, APBN, BAZNAS, dan CSR.	
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,76	63,26	94,76%	Permasalahan : 1. Rendahnya kesadaran	Solusi : 1. Sosialisasi dan pengawasan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	hidup yang berkelanjutan					masyarakat/ pelaku usaha terkait pengelolaan air limbah. 2. Adanya pembangunan jalan tol yang berdampak pada kualitas udara, karena Kota Kediri tidak ada ring road/ jalan lingkaran dengan asumsi semua kendaraan berat yang melewati wilayah kota Kediri melintas lewat jalan tengah kota sehingga berdampak pada polusi udara. 3. Menurunnya kualitas lahan karena alih fungsi lahan seperti menjadi permukiman, pertanian, kawasan industri) menyebabkan degradasi fisik, kimia, dan biologis lahan sehingga menurunkan nilai kualitas lahan.	pengelolaan air limbah domestik maupun air limbah industri. 2. Penanaman pohon di sekitar lajur jalan tol ketika kegiatan konstruksi sudah selesai. 3. Pembangunan memanfaatkan lahan yang ada untuk ruang terbuka hijau serta melestarikan ruang terbuka hijau.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Keberhasilan : 1. DLHKP rutin melakukan pemantauan dan uji kualitas air (limbah cair industri, limbah domestik sanimas, Lindi tpa, sumur/sumber, uji udara ambien, sungai / air permukaan). 2. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Kediri membantu memperbaiki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan dengan menyerap polutan udara secara alam.	

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data yang disajikan, sebagai bagian dari proses evaluasi dan upaya perbaikan ke depan, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan yang telah terjadi.



Dengan melaksanakan analisis dan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, diharapkan kinerja di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

Tabel 3. 11 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi (Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya ekonomi yang merata dan infrastruktur berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	3.5-4.5	1,74	43,50%	Permasalahan : 1. Sektor industri pengolahan yang menjadi sektor dominan hanya tumbuh 0,05 persen, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. 2. Struktur ekonomi Kota Kediri sangat bergantung pada sektor industri pengolahan tembakau, sehingga ketika sektor tersebut mengalami perlambatan maka pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan ikut terpengaruh.	Solusi : 1. Mengembangkan sektor ekonomi potensial di luar industri pengolahan seperti perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, pariwisata, dan ekonomi digital. 2. Mendorong pengembangan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal. 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor baru. 4. Mendorong investasi pada sektor ekonomi baru yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Mengembangkan sektor



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						3. Meskipun sektor non-industri tumbuh cukup tinggi, kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil sehingga belum mampu mengimbangi dominasi sektor industri pengolahan. Keberhasilan : 1. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri pada sektor non-industri pengolahan mencapai 7,33 persen, yang menunjukkan adanya perkembangan pada sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, jasa, informasi dan komunikasi, serta sektor akomodasi dan makan minum. 2. Sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB	ekonomi alternatif yang mampu menjadi sumber pertumbuhan baru.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kota Kediri yaitu sebesar 78,55 persen, yang menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah. 3. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 10,77 persen, menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dan mendukung perputaran ekonomi daerah. 4. Sektor informasi dan komunikasi yang menyumbang 2,34 persen menunjukkan adanya perkembangan ekonomi berbasis digital yang semakin mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.	



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.		Indeks Gini	0.327- 0.364	0,334	103,33%	Permasalahan : 1. Distribusi pendapatan di masyarakat belum sepenuhnya merata 2. Masih menghadapi keterbatasan akses terhadap permodalan, keterampilan, dan kesempatan usaha pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah Keberhasilan : Meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro kecil menengah berkontribusi dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat sehingga mampu mengurangi kesenjangan pendapatan	Solusi : 1. Mendorong pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas wirausaha, serta perluasan akses permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Melalui program pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, serta pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 3. Mendorong investasi serta pengembangan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas. 4. Memastikan program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah. 5. Mengoptimalkan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar agar kesempatan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.
3.	Meningkatnya Daya Saing Kota di Level Nasional	Indeks Daya Saing Daerah	3.75	3,74	99,73%	Permasalahan : 1. Tingkat persaingan dan efisiensi pasar produk di daerah masih perlu ditingkatkan 2. Akses terhadap pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, masih perlu diperkuat Keberhasilan : 1. Tingginya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas pemerintahan, bisnis, dan masyarakat. 2. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik serta dukungan kebijakan	Solusi : 1. Mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal melalui pengembangan industri kreatif, promosi produk daerah, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha. 2. Mendorong kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memperluas akses permodalan bagi UMKM serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih inklusif. 3. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						yang kondusif bagi pembangunan daerah. 3. Kualitas sumber daya manusia di Kota Kediri cukup mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. 4. Potensi ekonomi daerah yang cukup besar serta tingginya aktivitas ekonomi masyarakat	dalam pengembangan inovasi daerah serta pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi. 4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri agar mampu mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.
4.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6.45-6.32%	6,04%	105,40%	Permasalahan : 1. Masih terdapat jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan Pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Kota Kediri masih mencapai 17,93 ribu jiwa, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu terus diperkuat. 2. Kerentanan terhadap guncangan ekonomi	Solusi : 1. Penguatan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi Mendorong pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan masyarakat, serta perluasan akses permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Peningkatan kualitas perlindungan sosial



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sebagian masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan masih rentan kembali menjadi miskin apabila terjadi tekanan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau penurunan pendapatan. 3. Keterbatasan kesempatan kerja yang produktif Sebagian penduduk miskin masih bekerja pada sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah sehingga peningkatan kesejahteraan belum optimal. 4. Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi Sebagian kelompok masyarakat masih memiliki keterbatasan akses terhadap permodalan, peluang usaha,	Memperkuat program bantuan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin guna menjaga daya beli masyarakat. 3. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja Mendorong investasi dan pengembangan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas. 4. Peningkatan akses terhadap layanan dasar Memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. 5. Penguatan basis data



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						serta peningkatan keterampilan kerja. Keberhasilan: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,02 pada tahun 2024 menjadi 0,62 pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. 2. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menurun dari 0,25 menjadi 0,21, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang.	kemiskinan yang terintegrasi Pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial secara lebih optimal agar program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.87- 3.54%	3,76%	98,52%	Permasalahan : 1. Pertumbuhan lapangan kerja belum sepenuhnya sebanding dengan penambahan jumlah	Solusi : 1. Melalui penguatan program pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar kerja serta peningkatan sertifikasi



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						angkatan kerja baru setiap tahun. 2. Masih terdapat kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri sehingga sebagian tenaga kerja belum terserap secara optimal. 3. Sebagian tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah. Keberhasilan : 1. Meningkatnya kemampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja yang dipengaruhi oleh berkembangnya sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berperan	kompetensi bagi tenaga kerja. 2. Mendorong pertumbuhan sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti UMKM, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif. 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik investor untuk membuka usaha baru yang dapat menciptakan lapangan kerja. 4. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta pendampingan usaha bagi masyarakat.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. 2. Program pemerintah daerah seperti pelatihan keterampilan tenaga kerja, peningkatan kompetensi angkatan kerja, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja turut berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menekan tingkat pengangguran di daerah	
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Produktif	Indeks Pembangunan Manusia	82.77	82,71	99,93%	Permasalahan: 1. Pertumbuhan dimensi pendidikan masih relatif kecil. Peningkatan Harapan Lama Sekolah hanya 0,01 tahun, menunjukkan bahwa percepatan peningkatan akses pendidikan masih terbatas. 2. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar	Solusi : 1. Penguatan kualitas pendidikan • Meningkatkan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. • Penguatan program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. • Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kelompok Masyarakat. Masih terdapat kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan tinggi dan layanan kesehatan berkualitas. 3. Ketergantungan peningkatan standar hidup pada pertumbuhan ekonomi tertentu. Peningkatan pengeluaran per kapita belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. 4. Tantangan keberlanjutan peningkatan IPM. Karena IPM Kota Kediri sudah berada pada kategori sangat tinggi, peningkatan selanjutnya akan semakin sulit dicapai tanpa inovasi kebijakan yang lebih	pendidikan. 2. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat • Penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan. • Program pencegahan penyakit serta peningkatan gizi masyarakat. • Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup sejak dini. 3. Penguatan ekonomi masyarakat dan pengurangan kesenjangan • Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. • Penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi dan pengembangan sektor unggulan daerah. • Program pemberdayaan ekonomi masyarakat



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						progresif. Keberhasilan: 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Terlihat dari meningkatnya angka harapan hidup menjadi 76,28 tahun, naik 0,34 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya akses layanan kesehatan, program promotif dan preventif, serta penguatan pelayanan fasilitas kesehatan. 2. Perbaikan kualitas pendidikan masyarakat Terjadi peningkatan pada indikator pendidikan, yaitu: • Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi	berpenghasilan rendah. 3. Peningkatan integrasi program pembangunan manusia • Memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. • Pemanfaatan data terpadu untuk penentuan sasaran program secara lebih tepat.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						15,72 • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat menjadi 11,09 Kondisi ini menunjukkan semakin terbukanya akses pendidikan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Dimensi standar hidup layak mengalami peningkatan dengan rata-rata pengeluaran riil per kapita naik sebesar Rp. 614 ribu atau 4,49%, yang menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat serta pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah. 4. Sinergi program pembangunan antar	



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						perangkat daerah Program di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan cukup efektif sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.	
7.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	86.5	N/A	N/A	Permasalahan : 1. Belum meratanya pemahaman terhadap RB Tematik, khususnya keterkaitan antara program/kegiatan Perangkat Daerah dengan isu prioritas. 2. Kualitas pengelolaan kinerja dan SAKIP antar Perangkat Daerah belum merata, sehingga mempengaruhi konsistensi capaian RB secara keseluruhan. 3. Pemanfaatan teknologi	Solusi : 1. Penguatan implementasi RB Tematik, dengan memastikan seluruh Perangkat Daerah mengaitkan program dan kegiatan terhadap sasaran prioritas pembangunan daerah dan isu strategis nasional. 2. Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan SAKIP, melalui pendampingan, klinik kinerja, serta penguatan peran APIP



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						informasi dan digitalisasi birokrasi belum sepenuhnya terintegrasi lintas Perangkat Daerah. Keberhasilan : 1. Ketersediaan regulasi dan pedoman pelaksanaan RB, baik nasional maupun daerah, sebagai acuan yang jelas bagi seluruh Perangkat Daerah. 2. Peran aktif Tim Reformasi Birokrasi Daerah. 3. Sinergi lintas Perangkat Daerah, terutama dalam implementasi RB Tematik dan peningkatan kualitas pelayanan public. 4. Pemanfaatan teknologi informasi, yang mendukung transparansi, efisiensi, dan integrasi tata kelola pemerintahan.	dalam melakukan reviu dan pengendalian mutu. 3. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui standarisasi pelayanan, inovasi layanan, dan peningkatan kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan. 5. Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian internal, termasuk implementasi SPIP dan peningkatan maturitas pengendalian risiko. 6. Monitoring dan evaluasi RB secara berkala, serta penetapan rencana aksi perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						5. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, melalui survei kepuasan, pengaduan, dan keterlibatan dalam evaluasi pelayanan public.	
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	72.99	74,14	101,58%	Permasalahan : 1. Masih ditemukan indikator kinerja yang belum relevan atau belum cukup kuat untuk menjawab kondisi sasaran strategis yang diharapkan. 2. Pohon kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan logis (sebab-akibat) yang menunjang kinerja di atasnya secara langsung dan belum dijabarkan hingga level operasional. 3. Kolaborasi lintas sektor (crosscutting) atau	Solusi : 1. Melakukan reviu perencanaan kinerja level Kota dan PD dengan memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang relevan di RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2025-2029. 2. Menjabarkan pohon kinerja secara logis dari level strategis hingga operasional dan memanfaatkannya dalam penyusunan RPJMD serta Renstra PD Thun 2025-2029. 3. Menyempurnakan pemetaan aktivitas crosscutting guna mengidentifikasi dukungan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						hubungan aktivitas antar bidang/instansi belum terbangun secara memadai. 4. Formulasi perhitungan atau data yang digunakan pada beberapa Perangkat Daerah (PD) dinilai belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. 5. Belum adanya integrasi antara aplikasi pengukuran kinerja individu (PUSDASIP) dengan aplikasi pengukuran kinerja organisasi (APKPD), sehingga capaian individu belum tentu mencerminkan capaian organisasi. 6. Belum terdapat sistem informasi kinerja yang andal dan terintegrasi, sehingga data kinerja mudah diakses dan dianalisis. 7. Kualitas laporan kinerja	yang diperlukan dari entitas atau PD lain. 4. Memastikan formulasi perhitungan dan keandalan data sesuai dengan kondisi yang ingin dicapai, serta melakukan reviu ulang jika data sulit diukur. 5. Pemerintah Kota Kediri akan membangun sistem/aplikasi APKPD kinerja individu selaras dan menunjang keberhasilan kinerja organisasi. 6. Perangkat Daerah melakukan analisis keberhasilan kegagalan serta solusi atas kinerja secara berkala. 7. Melaksanakan klinik pendampingan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas dokumen pelaporan kinerja.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Perangkat Daerah belum memiliki kualitas yang merata, terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum memberikan analisis faktor kegagalan serta solusinya secara mendalam dan substantif. 8. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam melakukan monev atas kinerja secara berkala. Keberhasilan : 1. Telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 baik untuk Kepala Daerah maupun PD secara tepat waktu.	8. Melakukan pembangunan/ pengembangan sistem yang menyajikan informasi kinerja.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Terdapat peningkatan kualitas dokumen perencanaan jangka pendek (Perjanjian Kinerja) dibanding tahun sebelumnya dalam hal perumusan kinerja, indikator maupun target kinerjanya. 3. Telah disusun pohon kinerja baik level kota hingga Perangkat Daerah beserta cascading kinerjanya. 4. Telah dilakukan perbaikan pada dokumen Renstra PD dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan detail formulasi perhitungan dan penanggung jawab data yang jelas. 5. Ketersediaan regulasi dan pedoman teknis yang jelas sebagai acuan penyusunan laporan kinerja.	



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						6. Kompetensi SDM pengelola SAKIP yang cukup memadai. 7. Peran aktif APIP dan Bagian Organisasi dalam pendampingan, reviu, dan pengendalian kualitas laporan kinerja. 8. Koordinasi dan komunikasi lintas Perangkat Daerah yang efektif dalam penyusunan dan evaluasi laporan kinerja.	
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	62.00	70,98	114,48%	Permasalahan : 1. Lemahnya manajemen waktu yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan. 2. Pengalokasian anggaran APBD yang belum sesuai dengan mandatory	Solusi : 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran dan pelaksanaan program. 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara perangkat daerah dan legislatif untuk mengatasi keterlambatan APBD.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						spending. 3. Penyerapan anggaran yang lambat dan rendah. 4. Rendahnya kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif. Keberhasilan : 1. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 2. Penyajian dokumen pengelolaan keuangan (APBD, laporan realisasi) secara terbuka dan mudah diakses publik melalui sistem informasi pemerintahan.	3. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pendapatan daerah agar dapat meningkatkan kemampuan daerah. 4. Mempercepat penyerapan anggaran. 5. Memastikan ketepatan penginputan data pada system pengukuran IPKD dan memanfaatkan asistensi dari kemendagri.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						3. Adanya sinkronisasi yang tinggi antara dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS/APBD). 4. Peningkatan PAD 5. Penggunaan teknologi informasi dalam operasional keuangan untuk meminimalisir human error dan meningkatkan efisiensi.	
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69.79	63,26	90,64%	Permasalahan : 1. Rendahnya kesadaran masyarakat/ pelaku usaha terkait pengelolaan air limbah. 2. Adanya pembangunan jalan tol yang berdampak pada kualitas udara, karena Kota Kediri tidak ada ring road/ jalan lingkar dengan asumsi semua kendaraan berat	Solusi : 1. Sosialisasi dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik maupun air limbah industry. 2. Penanaman pohon di sekitar lajur jalan tol ketika kegiatan konstruksi sudah selesai. 3. Pembangunan memanfaatkan lahan yang ada untuk ruang terbuka hijau serta



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						yang melewati wilayah kota kediri melintas lewat jalan tengah kota sehingga berdampak pada polusi udara. 3. Menurunnya kualitas lahan karena alih fungsi lahan seperti menjadi permukiman, pertanian, kawasan industri) menyebabkan degradasi fisik, kimia, dan biologis lahan sehingga menurunkan nilai kualitas lahan. Keberhasilan : 1. DLHKP rutin melakukan pemantauan dan uji kualitas air (limbah cair industri, limbah domestik sanimas, Lindi tpa, sumur/sumber, uji udara ambien, sungai / air permukaan).	melestarikan ruang terbuka hijau.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Kediri membantu memperbaiki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan dengan menyerap polutan udara secara alam.	
11.	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	73-70	75,10	94,97%	Permasalahan : 1. Belum optimalnya kekuatan efektivitas mitigasi bencana terutama penerapan bangunan tahan gempa bumi dan mitigasi struktural tanah longsor di daerah aliran sungai yang padat penduduk. 2. Rendahnya pengembangan kebijakan penanggulangan bencana yang mendukung peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana. 3. Rendahnya kapasitas sistem pemulihan bencana.	Solusi : 1. Merekomendasikan penyusunan kebijakan yang mengatur tentang bangunan tahan gempa. 2. Merekomendasikan program atau kegiatan berkelanjutan untuk mitigasi struktural tanah longsor pada daerah aliran sungai yang padat penduduk yang beresiko tinggi terjadi tanah longsor. 3. Menyusun dan melegalkan serta uji coba rencana kontijensi untuk setiap jenis potensi bencana. 4. Menyusun dan melegalkan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Keberhasilan : 1. Telah tersusun kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan terdapat kelembagaan yang secara khusus menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah. 2. Daerah telah memetakan Kawasan rawan bencana yang terdapat dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027. 3. BPBD telah menyiagakan PUSDALOPS PB dan URC PB 24/7 jam untuk penyebarluasan informasi peringatan dini, mendukung komunikasi dan koordinasi	prosedur operasi standar rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pascabencana, rencana pemulihan infrastruktur penting pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (pre disaster recovery plan).



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						lintas sektor serta pelaksanaan penanganan darurat kejadian bencana. 4. Secara rutin memberikan edukasi dan pelatihan (membentuk Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana) serta melaksanakan gladi kesiapsiagaan bencana lintas sektor setiap tahun.	

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025

2.3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi (Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah									
1.1	Meningkatnya Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	314	306	97,45%	Program Kepegawaian Daerah	1.515.058.870	1.423.757.334	93,97%	-
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.052.874.143	907.955.909	86,24%	-
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggara n pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	70,98	101,40%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	14.991.166.640	7.570.026.900	50,50%	1,01%
						Program Pengelolaan Barang Milik daerah	900.144.896	685.213.554	76,12%	0,33%
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.885.553.004	4.574.704.839	93,64%	0,08%
		Nilai SAKIP	73	74,14	101,56%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.092.506.200	1.749.173.791	83,59%	0,21%
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.161.048.480	1.836.538.647	84,98%	0,20%
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95.886.980	45.202.576	47,14%	1,15%
						Program Penyelenggaraan	1.276.412.670	912.845.023	71,52%	0,42%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
						Pengawasan				
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.351.445.020	1.157.539.050	85,65%	0,19%
1.3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah	Indeks Reformasi Hukum	98,25	98,60	100,36%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17,390,431,967	10,790,287,640	62.05%	0,62%
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.780.886.964	12.835.313.442	86,84%	0,16%
1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,70	3,59	97,03%	Program Pelayanan Penanaman Modal	393.500.000	162.159.494	41,21%	-
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	195.000.000	140.915.434	72,26%	-
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	82.295.700	81.163.397	98,62%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	315.512.392	265.296.412	84,08%	-
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	844.088.050	785.691.440	93,08%	-
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	168.704.445	150.691.375	89,32%	-
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	928.983.468	743.380.860	80,02%	-
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	64.021.028.999	55.667.777.118	86,95%	-
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81.712.374.345	66.096.385.856	80,89%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
		Indeks Inovasi Daerah	53	66,01	124,55%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.266.044.140	1.814.867.724	80,09%	0,56%
		Indeks SPBE	3,95	3,89*	98,48%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.567.797.085	3.267.082.888	91,57%	-
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	9.100.874.760	7.967.482.438	87,55%	-
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	129.655.300	121.671.740	93,84%	-
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia									
2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,80	0,81	101,25%	Program Pengelolaan Pendidikan	101.359.335.864	83.509.395.594	82,39%	0,23%
						Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	434.590.000	415.811.020	95,68%	0,06%
						Program Pembinaan Perpustakaan	877.853.410	854.148.584	97,30%	0,04%
						Program Pengelolaan Arsip	79.240.400	78.430.682	98,98%	0,02%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.768.495.078	1.739.170.567	98,34%	0,03%
2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	75,74	76,28	100,71%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.998.715.000	3.695.106.780	92,41%	0,09%
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.993.837.870	4.237.547.682	70,70%	0,42%
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	580.054.950	451.454.665	77,83%	0,29%
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	94,72	N/A	N/A	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.280.796.600	933.212.674	72,86%	-
						Program Perlindungan Perempuan	38.220.000	256.758.327	671,79%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	70.000.000	33.259.300	47,51%	-
						Program Pemenuhan Hak Anak	315.000.000	114.840.000	36,46%	-
						Program Perlindungan Khusus Anak	315.000.000	235.197.700	74,67%	-
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.480.009.953	1.676.828.086	67,61%	-
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.602.260.000	1.165.703.740	72,75%	-
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan									
3.1	Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa	Nilai Peningkatan PDRB	2,3-3,2T	1,6T	69,57%	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	9.000.000	6.645.850	73,84%	-
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	129.850.000	127.693.834	98,34%	-
						Program Pengembangan Ekspor	224.117.000	217.675.236	97,13%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	999.900.000	991.233.400	99,13%	-
						Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	216.000.000	211.415.448	97,88%	-
						Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	19.989.195.775	3.892.417.915	19,47%	-
						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	90.898.265	72.465.114	79,72%	-
						Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	62.277.665	51.384.920	82,51%	-
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	202.723.005	143.280.235	70,68%	-
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan	1.182.992.000	496.035.185	41,93%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
						Koperasi				
3.2	Meningkatnya jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE	Nilai Realisasi Investasi	1.414 M	1.622 M	114,71%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	31.181.846	31.004.095	99,43%	0,15%
						Program Promosi Penanaman Modal	318.216.847	218.142.674	68,55%	0,67%
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	371.739.500	360.298.970	96,92%	0,18%
3.3	Terkendalinya Harga Bahan kebutuhan pokok dan penting	Tingkat Inflasi	3±1	2,95	98,33%	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	436.950.000	414.182.447	94,79%	-
						Program Perekonomian dan Pembangunan	1.227.649.600	707.307.745	57,61%	-
		Indeks Ketahanan Pangan	74	70,41	95,15%	Program Peningkatan Diversifikasi Dan KetahananPangan Masyarakat	168.774.465	159.024.522	94,22%	-
						Program Pengawasan	35.712.200	28.478.717	79,75%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
						Keamanan Pangan				
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	33.651.650	33.453.379	99,41%	-
						Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,	1.211.080.664	246.486.515	20,35%	-
						Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	354.645.475	352.602.478	99,42%	-
						Program Penyuluhan Pertanian	7.674.755.362	493.946.247	6,44%	-
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	354.645.475	352.602.478	99,42%	-
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	482.452.498	269.334.962	55,83%	-
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	253.830.000	248.109.215	97,75%	-
3.4	Meningkatnya daya tarik wisata, budaya	Jumlah Kunjungan Wisata	1.800.0 00	1.893.76 5	105,21%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	469.487.145	458.843.628	97,73%	0,08%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
	dan olah raga					Program Pemasaran Pariwisata	496.266.000	472.722.900	95,26%	0,10%
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	59.906.800	58.823.038	98,19%	0,07%
						Program Pengembangan Kebudayaan	4.350.460.886	2.641.005.690	60,71%	0,73%
						Program Pengelolaan Permuseuman	794.688.000	746.817.513	93,98%	0,12%
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	21.013.214.215	17.450.262.090	83,04%	0,27%
4.	Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja									
4.1	Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan	100%	99,81%	99,81%	Program Rehabilitasi Sosisal	1.347.929.400	1.310.745.463	97,24%	-
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.621.160.600	9.819.460.727	55,73%	-
						Program Pemberdayaan Sosial	570.242.250	544.186.910	95,43%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
		sosial				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	33.000.000	31.530.242	95,55%	-
4.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,9%	3,76%	103,59%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	5.238.350	5.218.099	99,61%	0,03%
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.963.141.440	253.750.846	2,31%	40,65%
						Program Penempatan Tenaga Kerja	228.890.930	203.589.700	88,95%	0,08%
						Program Hubungan Industrial	2.202.963.756	1.520.900.261	69,04%	0,40%
5.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis									
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	88	85,58	97,25%	Program peningkatan ketenteraman dan Ketertiban umum	5.868.942.500	4.846.741.694	82,58%	-
						Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.276.085.510	1.104.192.280	86,53%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
						Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	259.453.500	244.690.400	94,31%	-
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.664.323.900	5.516.249.800	97,39%	-
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.125.112.100	1.090.091.600	96,89%	-
						Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	4.964.866.550	3.913.395.312	78,82%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
5.2	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,78	0,56	71,79%	Program penanggulangan bencana	910.185.200	882.652.290	96,98%	-
						Program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran	664.945.106	391.132.202	58,82%	-
						Program Penanganan Bencana	504.555.000	486.507.230	96,42%	-
6.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan									
6.1	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	84,60%	81,57%	96,42%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.316.890.100	1.049.555.960	79,70%	-
6.2	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	88	88,71	100,80%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.276.636.200	6.455.015.050	88,71%	0,14%
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	1.412.176.000	1.000.400.390	70,84%	0,42%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
						Minum				
						Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.099.600.768	1.423.013.450	67,78%	0,49%
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.399.948.686	7.981.784.584	76,75%	0,31%
						Program Penataan Bangunan Gedung	16.625.506.941	13.846.743.262	83,29%	0,21%
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	318.552.500	165.992.900	52,11%	0,93%
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	8.901.889.740	6.798.903.082	76,38%	0,32%
						Program Penyelenggaraan Jalan	31.978.022.983	18.170.229.892	56,82%	0,77%
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	14.780.886.964	12.835.313.442	86,84%	16,09%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
						Jalan (LLAJ)				
6.3	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	Persentase permukiman layak huni	89,71%	94%	104,78%	Program Kawasan Permukiman	9.461.958.990	8.130.841.928	85,93%	0,22%
						Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) umum	1.957.593.910	1.205.303.617	61,57%	0,70%
						Program penatagunaan tanah	52.979.000	29.952.200	56,54%	0,85%
						Program Pengembangan Perumahan	390.269.800	317.545.960	81,37%	0,29%
						Program Pengelolaan Persampahan	19.348.897.368	17.739.957.755	91,68%	0,14%
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,76	63,26	94,76%	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	49.662.800	40.125.800	80,80%	
						Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	16.693.190.280	15.795.078.341	94,62%	-
						Program Peningkatan	8.693.000	71.743.222	825,30%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10) =8/7*100	(11)
						Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	431.693.303	428.615.900	99,29%	-
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.031.522.234	1.005.384.941	97,47%	-
						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	133.362.700	119.218.500	89,39%	-

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel:



Berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Rumus Efisiensi sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Capaian Kinerja} \times \text{Pagu Anggaran}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100$$

Catatan : Dengan syarat capaian kinerja diatas 100%

Tabel 3. 13 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi
(Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realis asi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10)= 8/7*100	(11)
1.	Terwujudnya ekonomi yang merata dan infrastruktur berkelanjutan									
1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi strategis berbasis potensi lokal	Persentase Kontribusi Sektor Strategis Perdagangan, Pertanian Dan Perikanan Terhadap PDRB	10,97	10,997	100,25%	Program Pengembangan Ekspor	224.117.000	217.675.236	97,13%	0,32%
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	999.900.000	991.233.400	99,13%	0,01%
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	21.618.450.000	1.679.068.109	7,77%	11,9%
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	129.850.000	127.693.834	98,34%	0,02%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realis asi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10)= 8/7*100	(11)
						Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.182.992.000	496.035.185	41,93%	1,39%
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	202.723.005	143.280.235	70,68%	0,42%
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	19.989.195.775	3.892.417.915	19,47%	4,15%
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.211.080.664	246.486.515	20,35%	3,93%
						Program Penyuluhan Pertanian	7.674.755.362	493.946.247	6,44%	14,58%
						Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	354.645.475	352.602.478	99,42%	0,01%
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	354.645.475	352.602.478	99,42%	0,01%
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	482.452.498	269.334.962	55,83%	0,80%
						1.2	Meningkatnya	Indeks Daya	3.75	3,74



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realis asi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10)= 8/7*100	(11)
	Daya Saing Kota di Level Nasional	Saing Daerah				Modal				
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	371.739.500	360.298.970	96,92%	-
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	31.181.846	31.004.095	99,43%	-
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.276.636.200	6.455.015.050	88,71%	-
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.412.176.000	1.000.400.390	70,84%	-
						Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.099.600.768	1.423.013.450	67,78%	-
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.399.948.686	7.981.784.584	76,75%	-
						Program Penataan Bangunan Gedung	16.625.506.941	13.846.743.262	83,29%	-
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	8.901.889.740	6.798.903.082	76,38%	-
						Program Penyelenggaraan	31.978.022.983	18.170.229.892	56,82%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realis asi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10)= 8/7*100	(11)
						Jalan				
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.780.886.964	12.835.313.442	86,84%	-
						Program Pengembangan Perumahan	390.269.800	317.545.960	81,37%	-
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.957.593.910	1.205.303.617	61,57%	-
1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6.45-6.32%	6,04%	105,40%	Program Kawasan Permukiman	9.461.958.990	8.130.841.928	85,93%	0,23%
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.621.160.600	9.819.460.727	55,73%	0,90%
						Program Rehabilitasi Sosial	1.347.929.400	1.310.745.463	97,24%	0,08%
						Program Pemberdayaan Sosial	570.242.250	544.186.910	95,43%	0,10%
1.4	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.87-3.54%	3,76%	98,52%	Program Penempatan Tenaga Kerja	228.890.930	203.589.700	88.95%	-
						Program Hubungan Industrial	2.202.963.756	1.520.900.261	69.04%	-
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.963.141.440	253.750.846	2.31%	-
						Program Stabilisasi Harga	436.950.000	414.182.447	94.79%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realis asi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10)= 8/7*100	(11)
						Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
2.	Terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Rukun dan Toleran									
2.1	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	4,58	4,56	99,56%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.276.085.510	1.104.192.280	86,53%	
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	259.453.500	244.690.400	94,31%	
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	4.964.866.550	3.913.395.312	78,82%	
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.664.323.900	5.516.249.800	97,39%	
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.125.112.100	1.090.091.600	96,89%	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realis asi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10)= 8/7*100	(11)
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Produktif									
3.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8607	0,87	101,08%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	81.712.374.345	66.096.385.856	80,89%	0,25%
						Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	3.998.715.000	3.695.106.780	92,41%	0,09%
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.993.837.870	4.237.547.682	70,70%	0,43%
3.2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,81	0,81	100,00%	Program Pengelolaan Pendidikan	101.359.335.864	83.509.395.594	82,39%	0,21%
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	434.590.000	415.811.020	95,68%	0,05%
						Program Pembinaan Perpustakaan	877.853.410	854.148.584	97,30%	0,03%
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	21.013.214.215	17.450.262.090	83,04%	0,20%
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.768.495.078	1.739.170.567	98,34%	0,02%
3.3	Meningkatnya	Indeks	96,22	N/A	N/A	Program Pengarusutamaan	1.280.796.600	933.212.674	72,86%	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realis asi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10)= 8/7*100	(11)
	kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam pembangunan	Pembangunan Gender				Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	70.000.000	33.259.300	47,51%	-
						Program Perlindungan Khusus Anak	315.000.000	235.197.700	74,67%	-
						Program Perlindungan Perempuan	38.220.000	256.758.327	671,79%	-
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.480.009.953	1.676.828.086	67,61%	-
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	315.000.000	114.840.000	36,46%	-
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	70.428.300	56.394.009	80,07%	-
						Program Pengendalian Penduduk	1.852.826.000	1.499.171.275	80,91%	-
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal									
4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,25	4,66	109,65%	Program Pelayanan Penanaman Modal	173.561.500	162.159.494	93,43%	0,17%
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	195.000.000	140.915.434	72,26%	0,52%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realis asi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10)= 8/7*100	(11)
						Program Pendaftaran Penduduk	370.374.255	357.571.809	96,54%	0,14%
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	82.295.700	81.163.397	98,62%	0,11%
						Program Pengelolaan Arsip	79.240.400	78.430.682	98,98%	0,11%
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	315.512.392	265.296.412	84,08%	0,30%
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	844.088.050	785.691.440	93,08%	0,18%
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	348.128.300	306.375.423	88,01%	0,25%
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	168.704.445	150.691.375	89,32%	0,23%
						Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.567.797.085	3.267.082.888	91,57%	0,20%
						Program Pengelolaan	9.100.874.760	7.967.482.438	87,55%	0,25%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realis asi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10)= 8/7*100	(11)
						Aplikasi Informatika				
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	129.655.300	121.671.740	93,84%	0,17%
						Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	129.655.300	121.671.740	93,84%	0,17%
						Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.868.942.500	4.846.741.694	82,58%	0,33%
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.052.874.143	907.955.909	86,24%	0,27%
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	64.021.028.999	55.667.777.118	86,95%	0,26%
						Program Perekonomian dan Pembangunan	527.148.290	494.294.085	93,77%	0,17%
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	109.898.400	73.772.000	67,13%	0,63%
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.064.764.300	508.833.723	47,79%	1,29%
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14.709.517.550	8.928.834.789	60,70%	0,81%
						Program Penunjang Urusan	582.513.130	495.066.701	84,99%	0,29%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realis asi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10)= 8/7*100	(11)
						Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.366.617.230	3.989.841.535	91,37%	0,20%
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	21.744.037.518	19.026.254.842	87,50%	0,25%
4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	72.99	74,14	101,58%	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.092.506.200	1.749.173.791	83,59%	0,22%
						Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2.161.048.480	1.836.538.647	84,98%	0,20%
						Program penelitian dan pengembangan daerah	2,266.044.140	1.814.867.724	80,09%	0,27%
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	95.886.980	45.202.576	47,14%	1,15%
						Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1.351.445.020	1.157.539.050	85.65%	0,19%
						Program Penyelenggaraan	1.276.412.670	912.845.023	71,52%	0,42%

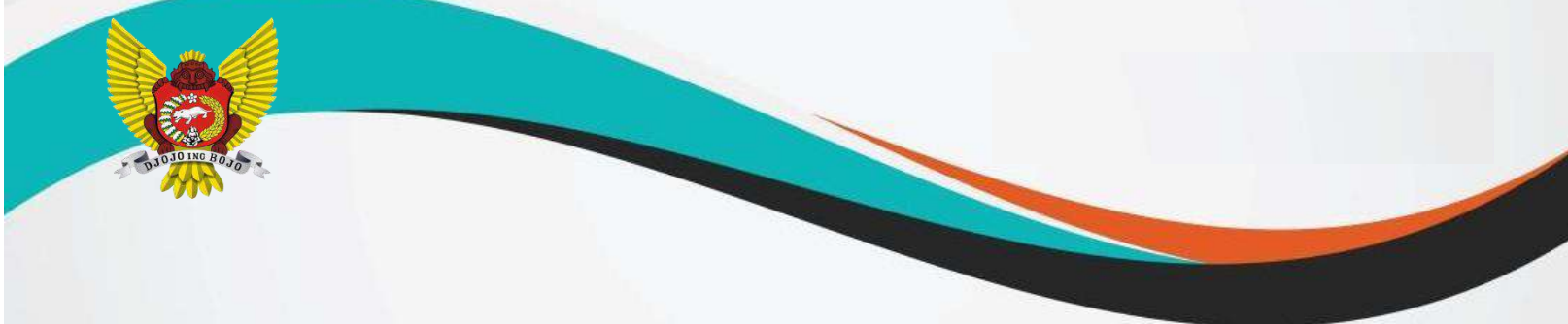


No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realis asi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10)= 8/7*100	(11)
						Pengawasan				
4.3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	62.00	70,98	114,48%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	14.991.166.640	7.570.026.900	50,50%	1,27%
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.885.553.004	4.574.704.839	93,64%	0,22%
4.4	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	73-70	75,10	94,97%	Program penanggulangan bencana	910.185.200	882.652.290	96,98%	-
						Program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran	664.945.106	391.132.202	58,82%	-
5.	Terwujudnya Kota Wisata yang Tertata, Nyaman dan Berkelanjutan									
5.1	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Kunjungan Wisata	1.800. 000	1.893. 765	105,21%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.316.890.100	1.049.555.960	79,70%	0,25%
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	469.487.145	458.843.628	97,73%	0,08%
						Program Pemasaran Pariwisata	496.266.000	472.722.900	95,26%	0,10%
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	59.906.800	58.823.038	98,19%	0,07%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi
			Target	Realis asi	% Capaian		Anggaran	Realisasi	% Capaian	
							(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 5/4*100	(7)	(8)	(9)	(10)= 8/7*100	(11)
						Program Pengembangan Kebudayaan	4.350.460.886	2.641.005.690	60,71%	0,73%
5.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69.79	63,26	90,64%	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau kerusakan Lingkungan Hidup	1.031.522.234	1.005.384.941	97,47%	
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	431.693.303	428.615.900	99,29%	
						Program peningkatan Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	8.693.000	71.743.222	825,30%	
						Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	133.362.700	119.218.500	89,39%	
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	16.693.190.280	15.795.078.341	94,62%	
						Program Pengelolaan Persampahan	19.348.897.368	17.739.957.755	91,68%	

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025



2.3.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3. 14 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program (Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah							
1.1	Meningkatnya Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	97,45%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan database kepegawaian	84,96%	Menunjang	Integrasi layanan dengan database kepegawaian meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi layanan
					Persentase Promosi dan Mutasi sesuai Hasil Talenpool ASN	84%	Menunjang	Pemanfaatan talent pool dalam promosi dan mutasi menjamin objektivitas, transparansi, dan kesesuaian kompetensi jabatan
					Persentase ASN yang	110,09%	Menunjang	Kepatuhan pelaporan kinerja



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					melaporkan kinerjanya tepat waktu			mendorong pengukuran kinerja yang objektif dan berkelanjutan
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	112,86%	Menunjang	Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional memperkuat kapasitas ASN sehingga menjadi dasar utama dalam pengembangan karir berbasis merit
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	101,40%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	119,34%	Menunjang	Pencapaian lebih besar dari target, hal ini menunjukkan adanya inefisiensi perencanaan dan keterlamatan pelaksanaan kegiatan (daya serap rendah)
					Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	145,77%	Menunjang	Pencapaian lebih besar dari target, hal ini menunjukkan adanya inefisiensi perencanaan dan keterlamatan pelaksanaan kegiatan (daya serap rendah)
					Rasio belanja langsung dalam APBD di luar	104,23%	Menunjang	Semakin tinggi realiasi mencerminkan tingginya komitmen pemerintah daerah



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					tranfer expenditure			pada pelayanan publik dan pembangunan infrastuktur
					Rasio penyerapan anggaran	94,08%	Menunjang	Realisasi kurang dari target, dikarenakan: Adanya kegiatan yang belum selesai sehingga belum bisa dibayar, efisien anggaran dan Adanya kendala di lapangan
				Program Pengelolaan Barang Milik daerah	Indeks pengelolaan aset daerah	N/A	Menunjang	Belum dilakukan pengukuran
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi	61,25%	Menunjang	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi menunjang Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
					Persentase Kepatuhan WP	102,77%	Menunjang	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan WP menunjang Meningkatnya Akuntabilitas



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								penyelenggaraan pemerintahan
					Persentase Objek/Subjek Pajak Baru yang Terdata menjadi OP/WP	100%	Menunjang	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Objek/Subjek Pajak Baru yang Terdata menjadi OP/WP menunjang Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
					Persentase Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang Tertagih	125,64%	Menunjang	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang Tertagih menunjang Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		Nilai SAKIP	101,56%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Dokumen Pengendalian yang Disusun Tepat Waktu	100%	Menunjang	Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menunjang sasaran meningkatnya Perencanaan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Daerah				Pembangunan yang Konsisten dan Akuntabel
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persetase Pemenuhan Kriteria Minimun SAKIP Komponen Pengukuran	100%	Menunjang	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah menunjang sasaran meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Konsisten dan Akuntabel
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Komponen Pelaporan	96,38%	Menunjang	Indikator kinerja Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Komponen Pelaporan menunjang Meningkatnya Implementasi SAKIP Komponen Pelaporan
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persetase OPD dengan nilai hasil evaluasi SAKIP minimal A	80%	Menunjang	Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator kinerja Persetase OPD dengan nilai hasil evaluasi SAKIP minimal A menunjang Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persetase perangkat daerah yang menyelenggarakan SPIP	100%	Menunjang	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan SPIP menunjang Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
1.3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah	Indeks Reformasi Hukum	100,36%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Layanan Hukum yang Terfasilitasi	98%	Menunjang	Indikator kinerja Persentase Layanan Hukum yang Terfasilitasi menunjang Meningkatnya kualitas pembentukan produk hukum daerah
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	89,98%	Menunjang	Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Ditindaklanjuti menunjang Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Persentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	60,70%	Menunjang	Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti Menunjang Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Akan tetapi Terdapat Beberapa Kebijakan atas Kegiatan Baru yang Belum Terlaksana
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketaatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Melaksanakan Uji KIR	99,02%	Menunjang	Wajib uji kendaraan bermotor telah melaksanakan uji KIR
					Persentase Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran	107,89%	Menunjang	Kegiatan penerbitan perparkiran telah sesuai yang direncanakan
1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,03%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Ijin Usaha dan Ijin Teknis yang Sesuai dengan SOP	97%	Menunjang	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang sesuai dengan SP dan SOP, serta memperbarui SP SOP dan Koordinasi dengan tim teknis



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Pelayanan Izin yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	102%	Menunjang	Memiliki backup layanan internet dan generator listrik
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persenatse Kualitas, Kuantitas Publik dan Dokumen Kependudukan	98,62%	Menunjang	Pelaksanaan program digitalisasi administrasi kependudukan berjalan efektif. Optimalnya pemanfaatan anggaran tersebut menunjang kelancaran aktivasi IKD serta peningkatan akses layanan kependudukan berbasis digital bagi masyarakat
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik yang Berkualitas	100%	Menunjang	Pelayanan publik sudah bagus, namun perlu ditingkatkan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Realisasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	Menunjang	Semua unsur LKK terlibat dalam pembangunan
				Program Koordinasi	Persentase Terasilitasinya	100%	Menunjang	Kegiatan fasilitasi ketentrman terlaksana



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi dan Sinergi Ketentraman dan Ketertiban Lingkup Kecamatan			dengan baik
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	Menunjang	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menunjang Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pembahasan Raperda	86,95%	Menunjang	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator kinerja Persentase pembahasan Raperda menunjang Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik
				Program Pemenuhan Upaya	Persentase sarana prasarana fasilitas	100%	Menunjang	Pemenuhan sarana prasarana belum



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	kesehatan yang berfungsi baik			sependukungnya berdampak pada penurunan angka kesakitan sehingga perlu penguatan upaya preventif
		Indeks Inovasi Daerah	124,55%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan dengan Kategori Layak Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	Menunjang	Program Penelitian dan pengembangan daerahmenunja ng sasaran Mewujudkan Penelitian Daerah dan Inovasi yang Berkualitas
		Indeks SPBE	98,48%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Kebijakan Daerah Yang Dipublikasikan	57,95% (s/d TW III)	Menunjang	Realisasi anggaran pada program dan kegiatan telah berhasil menunjang pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran meskipun tidak dilaksanakan penuh satu tahun (s/d TW III)
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase Aplikasi Informasi yang memiliki Tata Kelola yang Baik 2. Persentase Aplikasi E-Gov Yang Terintegrasi	30,66% (s/d TW III)	Menunjang	Realisasi anggaran pada program dan kegiatan telah berhasil menunjang pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran meskipun tidak dilaksanakan penuh satu tahun (s/d TW III)



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Informasi Yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi Yang Aman	1,56% (s/d TW III)	Menunjang	- Realisasi anggaran pada program dan kegiatan telah berhasil menunjang pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran meskipun tidak dilaksanakan penuh satu tahun (s/d TW III). - Ada perubahan kebijakan yang berpengaruh pada perubahan anggaran dan baru dapat dilaksanakan pada tribulan keempat (setelah PAK).
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia							
2.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	101,25%	Program Pengelolaan Pendidikan	1. APM SD/MI/Paket A (%) 2. APM SMP/MTs/Paket B (%) 3. APK TK (%) 4. Angka Melek Huruf diatas 15 tahun	106,87% 108,24% 104,88% 100,00%	Menunjang	Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlaksana dengan baik dan menunjang keberhasilan capaian kinerja melalui peningkatan efektifitas pemanfaatan Dana BOS yang
				Program Pendidik dan Tenaga	Persentase kualitas pendidik	95,68%	Menunjang	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pendidikan	dan tenaga kependidikan			tepat sasaran, pemenuhan perluasan akses pendidikan dasar secara merata, adanya bantuan seragam gratis, dan perluasan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran. Begitu juga dengan program PTK untuk menunjang capaian kinerja dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan sertifikasi pendidik.
				Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio kunjungan perpustakaan	201,9%	Menunjang	Keberhasilan dari Tujuan dan Sasaran Strategis ditunjang oleh keberhasilan indikator kinerja program yang sangat tinggi
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara buku	109%	Menunjang	Keberhasilan dari Tujuan dan Sasaran Strategis ditunjang oleh keberhasilan indikator kinerja program yang sangat tinggi
				Program Pengembangan	Persentase Pembinaan	111%	Menunjang	Dalam mengembangkan kapasitas daya saing



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan			pemuda, kegiatan yang dilaksanakan oleh Disbudparpora juga mampu menarik wisatawan, seperti Kirab Bendera Merah Putih Raksasa dan Napak Tilas Panglima Besar Jenderal Soedirman (Kediri-Bajulan). Namun untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan untuk saat ini belum menunjang peningkatan wisatawan karena berfokus pada SDM Pemuda Kota Kediri
2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	100,71%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	97,40%	Menunjang	Program pemberdayaan masyarakat mendukung peningkatan kesehatan keluarga melalui penguatan peran kader dan pelayanan dasar
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang	100%	Menunjang	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan mendukung



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	N/A	Daya Manusia Kesehatan	berkompeten			pemenuhan standar mutu dan keberhasilan akreditasi fasilitas
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes	100%	Menunjang	Ketersediaan obat yang optimal menunjang kelancaran dan mutu pelayanan kesehatan
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Anggaran Responsive Gender	55,10%	Menunjang	Memuaskan, termasuk capaian tinggi
				Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	N/A	Menunjang	Program Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja Rasio KDRT menunjang Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prevalensi Perkawinan Anak	N/A	Menunjang	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator kinerja Prevalensi Perkawinan Anak menunjang Meningkatnya



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pemenuhan Hak Anak	Cakupan Kelurahan Layak Anak	N/A	Menunjang	Program Pemenuhan Hak Anak dengan indikator kinerja Cakupan Kelurahan Layak Anak menunjang Meningkatnya Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani secara Komprehensif	N/A	Menunjang	Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator kinerja Presentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani secara Komprehensif menunjang Meningkatnya Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	MUKP : 22,2%	Menunjang	Memuaskan, diatas rata-rata Propinsi dan Nasional



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				(KS)				
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmeetneed Pelayanan KB Prevalensi metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) angka prevalensi penggunaan metode kontras epsi modern (modern contraceptive revalence rate/Mc pr)	Unmeetn eed : 7,8 MCPR : 70,6 CPR : 71,2 MKJP : 35,8	Menunjang	Memuaskan, diatas rata-rata propinsi dan Nasional
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan							
3.1	Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa	Nilai Peningkatan PDRB	69,57%	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	68,75%	Menunjang	Peningkatan layanan perizinan dan pemantauan izin memperkuat legalitas dan tata kelola usaha perdagangan. Meskipun capaian belum optimal, program ini berkontribusi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagai fondasi pertumbuhan sektor perdagangan.



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibina	15,07%	Menunjang	Persentase sarana distribusi yang dibina masih relatif rendah sehingga dampaknya terhadap ekspansi jaringan distribusi belum maksimal. Namun, kegiatan pembinaan yang dilakukan secara konsisten telah meningkatkan kualitas pengelolaan sarana distribusi
				Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir	26,15%	Menunjang	Fasilitasi promosi dan pembinaan ekspor meningkatkan akses pasar produk lokal, yang berdampak positif terhadap promosi produk potensial ekspor
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kenaikan Omzet Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitasi	26,36%	Menunjang	Intensitas promosi dan fasilitasi kemitraan berhasil meningkatkan eksposur dan omzet pelaku usaha, sehingga



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Kemitraan, Pameran dan Promosi Lainnya			mendukung capaian promosi produk lokal yang sangat tinggi
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat- Alat UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	65,56%	Menunjang	Pelaksanaan tera, tera ulang, dan pengawasan secara konsisten meningkatkan kepatuhan
				Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	102,98%	Menunjang	Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator kinerja Persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan menunjang Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang memiliki legalitas	100%	Menunjang	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator kinerja persentase koperasi yang memiliki legalitas menunjang meningkatnya produktivitas ekonomi daerah khususnya



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								sektor perdagangan dan jasa
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	199,75%	Menunjang	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang melaksanakan RAT menunjang meningkatnya produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang memperoleh diklat perkoperasian	353,5%	Menunjang	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang memperoleh diklat perkoperasian menunjang meningkatnya produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi mengalami peningkatan dalam tata kelola	74,54%	Menunjang	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator Persentase koperasi mengalami peningkatan dalam tata kelola menunjang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								meningkatnya produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa
3.2	Meningkatnya jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE	Nilai Realisasi Investasi	114,71%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	111,37%	Menunjang	Adanya pelatihan kerja yang diselenggarakan membutuhkan NIB dan adanya persyaratan NIB untuk pengajuan kredit
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	300%	Menunjang	Banyaknya penawaran promosi dari Pemerintah Daerah maupun Event Organizer
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Ketaatan Investor terhadap Ketentuan Penanaman Modal	133%	Menunjang	Pembinaan dan pendampingan agar investor paham dan taat pada peraturan per Undang-Undangan, serta dilakukan rapat koordnansi rencana pelaksanaan pengawasan/inspeksi lapangan dengan menyusun jadwal
3.3	Terkendalinya Harga Bahan kebutuhan pokok	Tingkat Inflasi	98,33%	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan	Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan	100%	Menunjang	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan penting			Pokok dan Barang Penting	bapokting			indikator kinerja Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting menunjang Terkendalinya Harga Bahan kebutuhan pokok dan penting
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindak lanjuti	80%	Menunjang	Indikator kinerja Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindak lanjuti menunjang Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian
		Indeks Ketahanan Pangan	95,15%	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penguatan cadangan pangan; Peningkatan PPH Konsumsi; PPH Ketersediaan	94%	Menunjang	Persentase ideal AKE adalah 100%, Semakin mendekati angka ideal (100%) semakin baik. Capaian ini utamanya disebabkan semakin lengkapnya identifikasi distribusi (keluar-masuk) bahan pangan di Kota Kediri
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan pengajuan ijin edar dan sertifikasi Prima PSAT-PDUK yang terbit	80%	Menunjang	Adanya Perubahan Dasar regulasi dari Permentan 22 Tahun 2021 ke Perbadan Bapanas No. 12 Tahun 2023



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dalam pengujian laboratorium Sertifikasi Prima 3 yang semula biaya uji laboratorium dihitung berdasarkan jumlah varietas, menjadi jumlah komoditas saja. Sehingga menyebabkan adanya SILPA
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Kelurahan Tahan Pangan	99%	Menunjang	Skor ideal PoU adalah 0 (nol), Tidak tercapainya target disebabkan meningkatnya jumlah penduduk, menurunnya konsumsi kalori dan jumlah pendapatan. Diperlukan upaya peningkatan pendapatan, menjaga kestabilan harga, dan promosi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), untuk mendukung akses pangan berkualitas.
				Program Penyediaan dan Pengembangan	Nilai Produktivitas Padi (ton/Ha); Nilai Produktivitas Jagung	384%; 380,68; 197,22	Menunjang	Hibah Uang pokmas tidak terealisasi karena



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Sarana Pertanian,	(ton/Ha); Nilai Produktivitas Tebu (ton/Ha)			pembatalan dari anggota dewan
					Produksi Hasil Peternakan (Ton)	132,72	Menunjang	
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan teknologi	94%	Menunjang	Banyaknya petani yang sudah lanjut usia berpengaruh pada daya ingat dan pemahaman terhadap informasi dan inovasi baru
				Program Penyuluhan Pertanian	Presentase Kelompok Tani yang dibina	6%	Menunjang	Pelaksanaan kegiatan belum dapat dimulai karena beberapa pihak ketiga/lembaga pelatihan yang biasa melakukan pelatihan di bidang pertanian di wilayah Kediri Raya menyatakan tidak siap menjadi pelaksana kegiatan (baik secara tertulis maupun lisan) dengan alasan keterbatasan waktu persiapan dan benturan jadwal internal



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	99%	Menunjang	Kurangnya kesadaran dari pemilik hewan terhadap kesehatan hewan, kebersihan kandang dan pengelolaan limbah kotoran hewan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan (ton)	56%	Menunjang	Hibah Uang pokmas tidak terealisasi karena pembatalan dari anggota dewan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita)	98%	Menunjang	Tidak semua pelaku usaha perikanan dapat mengikuti pelatihan
3.4	Meningkatnya daya tarik wisata, budaya dan olah raga	Jumlah Kunjungan Wisata	105,21%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang terpelihara dengan baik	96%	Menunjang	Destinasi wisata yang dikelola langsung oleh Disbudparpora (Kawasan Wisata Selomangleng dan GOR Jayabaya) perlu diberikan perbaikan secara bertahap untuk mendukung kunjungan wisata secara berkelanjutan. Dikarenakan untuk saat ini destinasi wisata tertopang oleh



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								destinasi wisata yang dikelola oleh perangkat daerah lain seperti taman-taman dan destinasi wisata milik swasta.
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan event pariwisata, budaya dan olahraga	479%	Menunjang	Salah satu tantangan Kota Kediri dalam hal pariwisata adalah minimnya destinasi tempat wisata, sehingga perlu adanya dukungan dalam bentuk event yang menarik wisatawan. Pada tahun 2025 kolaborasi Disbudparpora dengan Perangkat Daerah lain, pihak swasta dan masyarakat mampu meningkatkan terselenggaranya event pariwisata, budaya dan olahraga
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan kelompok budaya yang ditingkatkan	100%	Menunjang	Dengan adanya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan kelompok budaya diharapkan mampu



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Ekonomi Kreatif	kapasitasnya			meningkatkan pengalaman wisata dan pelayanan kepada wisatawan sehingga jumlah wisatawan meningkat dan akan berkunjung kembali ke Kota Kediri
				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	99%	Menunjang	Secara rutin Disbudparpora menggelar kegiatan pertunjukan seni dan budaya baik dalam rangka untuk tujuan wisata seperti yang rutin digelar di Kawasan Wisata Selomangleng, atau untuk agenda khusus seperti Hari Jadi Kota Kediri. Hal ini sebagai salah satu bentuk pelestarian seni budaya dan mendukung seniman terus berkarya sekaligus bisa dijadikan event wisata.
				Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase kenaikan kunjungan museum	101%	Menunjang	Kegiatan museum dapat menghadirkan daya tarik wisata edukatif dan budaya



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								melalui pameran, event, dan program interaktif yang meningkatkan minat kunjungan, memperkaya pengalaman wisata, serta mendukung promosi dan diversifikasi destinasi wisata. Salah satunya kegiatan Exhibition Museum.
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase peningkatan kegiatan olahraga yang diselenggarakan	200%	Menunjang	Berbagai kegiatan olahraga yang diselenggarakan Disbudparpora maupun kolaborasi dengan swasta dapat menarik wisatawan datang ke Kota Kediri. Seperti diselenggarakannya kompetisi olahraga hingga tingkat nasional. Hal ini menjadi potensi Kota Kediri sebagai destinasi sport tourism. Tentunya kesuksesan penyelenggaraan kegiatan tersebut dikarenakan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Kediri dengan organisasi keolahragaan, swasta dan masyarakat.
4.	Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja							
4.1	Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin yang menerima layanan perlindungan sosial	99,81%	Program Rehabilitasi Sosisal	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	97,24%	Menunjang	Program Rehabilitasi Sosisal dengan indikator kinerja Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial menunjang Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	55,73%	Menunjang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial menunjang Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	95,43%	Menunjang	Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja Persentase PSKS yang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								berperan aktif dalam menangani PPKS menunjang Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMPN yang dikelola	95,55%	Menunjang	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator kinerja Persentase TMPN yang dikelola menunjang Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial
4.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	103,59%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menyusun dokumen perencanaan tenaga kerja	100%	Menunjang	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja tidak menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi ini belum dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan, seiring dengan adanya efisiensi anggaran dan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan	0	Menunjang	
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terfasilitasi informasi kerja	100%	Menunjang	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan)	100%	Menunjang	perubahan jenis pelatihan kerja, sehingga merubah semua perencanaan (reschedule) termasuk mekanismenya, mulai dari pendaftaran, verifikasi peserta, penetapan peserta, proses pengadaan barang/jasa dan waktu pelaksanaannya terlalu mepet berdampak terhadap penyedia yang sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai sesuai batas akhir penyerapan anggaran. Selain itu, terdapat penyesuaian aspek teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan serta keselarasan materi pelatihan dengan arah kebijakan kinerja organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan pelatihan belum dapat



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dilaksanakan, sehingga anggaran yang dialokasikan belum terserap.
5.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis							
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	97,25%	Program peningkatan ketenteraman dan Ketertiban umum	Capaian Ruang Lingkup Indeks Ketenteraman dan Ketertiban yang berkategori baik	100%	Menunjang	Program ini menunjang Sasaran Meningkatnya penanganan gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan) di Kota Kediri
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	Menunjang	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan indikator kinerja Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan menunjang Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
				Program Pembinaan dan Pengembangan	Persentase laporan masyarakat terkait potensi konflik SARA	100%	Menunjang	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				dengan indikator kinerja Persentase laporan masyarakat terkait potensi konflik SARA menunjang Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pencegahan konflik politik di wilayah Kota Kediri	100%	Menunjang	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator kinerja Persentase pencegahan konflik politik di wilayah Kota Kediri menunjang Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase capaian Ormas melaporkan keberadaannya disertai dengan dokumen lengkap	100%	Menunjang	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator kinerja Persentase capaian Ormas melaporkan keberadaannya disertai dengan dokumen lengkap



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								menunjang Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
				Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase laporan tim kewaspadaan dini terkait potensi konflik di masyarakat	100%	Menunjang	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan indikator kinerja Persentase laporan tim kewaspadaan dini terkait potensi konflik di masyarakat menunjang Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
5.2	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	71,79%	Program penanggulangan bencana	Persentase capaian prioritas indeks ketahanan daerah berkategori rendah dan sedang	110,66%	Menunjang	Dukungan optimal dari lintas sektor baik internal maupun eksternal dalam pemenuhan data dukung untuk penilaian Indeks Ketahanan Daerah
				Program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan	Persentase Waktu Tanggap Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	77,14%	Menunjang	Program ini menunjang Sasaran Meningkatnya kecepatan layanan penanganan kebakaran



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				penyelamatan Non kebakaran	dalam Wilayah Managemen Kebakaran			
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	96,42%	Menunjang	Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah menunjang Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana
6.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan							
6.1	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	96,42%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	97,55%	Menunjang	• Sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh masyarakat di Kota Kediri • Tidak seluruh masyarakat dapat mengakses sistem berbasis website • Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kebijakan
6.2	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	100,80%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	103,51%	Menunjang	• Kondisi jaringan irigasi yang baik • Kemudahan akses area Sungai • Cuaca yang mendukung



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								untuk dilakukan normalisasi • Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan • Cuaca yang relatif stabil saat pelaksanaan pekerjaan
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	94,58%	Menunjang	• Anggaran perluasan jaringan distribusi dan sambungan rumah terbatas • Idle capacity PDAM semakin berkurang • Penolakan warga menjadi pelanggan PDAM • Belum ada peraturan terkait Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) • Belum ada pemisahan antara regulator dan operator IPLT • Belum ada peraturan tentang air limbah
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase peningkatan sistem pengolahan persampahan	90,00%	Menunjang	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	106,85%	Menunjang	
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pengelolaan bangunan gedung	86,04%	Menunjang	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	115,41%	Menunjang	domestic - Masih terdapat sengketa antara Pemerintah Kota Kediri dengan penyedia jasa terkait RTH Alun – Alun - Belum ada data valid mengenai jumlah tenaga kerja konstruksi
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase / Gorong- Gorong dalam kondisi baik	100,09%	Menunjang	Sampah dan lumpur yang mengendap di saluran drainase dan gorong-gorong
				Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap	104,17%	Menunjang	- Pemeliharaan saluran tertutup (bawah trotoar) yang kurang optimal menyebabkan kerusakan infrastruktur yang tidak terdeteksi sejak dini. - Kondisi jalan sempit dan di area permukiman warga serta adanya factor kesulitan pada saat mobilisasi dan pengangkutan material;



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								- Kondisi lalu lintas yang ramai yang mengakibatkan macet; - Potensi keluhan warga di sekitar Jl. Stasiun
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perlengkapan LLAJ dalam kondisi baik	99,94%	Menunjang	Rambu, APILL, Marka Jalan dalam kondisi baik
					Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik	98,70%	Menunjang	Terminal tipe-C, Halte, Bus Stop, Armada Bus dalam kondisi baik
					Persentase sarana prasarana keselamatan LLAJ dalam kondisi baik	99,89%	Menunjang	LPJU dan Perlintasan Sebidang dalam kondisi baik
6.3	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan	Persentase permukiman layak huni	104,78%	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	99,02%	Menunjang	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni
				Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) umum	Persentase PSU Perumahan yang terkelola	138,10%	Menunjang	Meningkatnya cakupan lingkungan yang didukung dengan PSU.
				Program penatagunaan	Persentase Ketersediaan Dokumen Data /	99,95%	Menunjang	Adanya Program Konsolidasi Tanah dari Kementerian ATR



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				tanah	Informasi Tanah Kosong			BPN Adanya kegiatan DAK Fisik dari sub kegiatan lain Adanya perbaikan jalan lingkungan
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang tertata	117,59%	Menunjang	• Pengelolaan dan pemeliharaan yang baik di Rusunawa Kota Kediri • Meningkatnya jumlah perumahan yang tertata
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola persentase	95,54 %	Menunjang	Program pengelolaan sampah di Kota Kediri dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Program ini diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, meningkatkan cakupan pelayanan pengumpulan sampah, serta mengoptimalkan pengolahan sampah sebelum berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA)



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	94,76%	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase sampah B3 yang ditangani (%)	57,14%	Menunjang	Program pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Kediri merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam melindungi kualitas lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat dari potensi pencemaran dan dampak negatif limbah berbahaya. Limbah B3 yang dihasilkan dari berbagai aktivitas, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, kegiatan industri, bengkel, laboratorium, serta usaha kecil dan menengah, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
				Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan	100%	Menunjang	Upaya strategis pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, dan meningkatkan keberlanjutan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								sumber daya hayati di tengah perkembangan wilayah perkotaan. Program ini diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem melestarikannserta mendukung kualitas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase Lembaga Yang Memiliki Wawasan Lingkungan	95%	Menunjang	Upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup. Program ini dirancang untuk membangun perilaku ramah lingkungan yang berkelanjutan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif di berbagai lapisan masyarakat.
				Program	Tingkat Ketersediaan	100%	Menunjang	Upaya strategis Pemerintah



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup			Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan. Program ini dirancang sebagai landasan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, sekaligus sebagai instrumen pengendali dampak lingkungan dari aktivitas pembangunan di wilayah Kota Kediri
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Mutu Air dan Udara Ambien	100%	Menunjang	Program ini diarahkan untuk mengendalikan sumber-sumber pencemaran serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas domestik, industri, transportasi, dan pembangunan perkotaan, seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimonitoring	41%	Menunjang	Upaya strategis pemerintah daerah dalam menjamin setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Program ini diarahkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga operasional kegiatan

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025

**Tabel 3. 15 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program
(Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya ekonomi yang merata dan infrastruktur berkelanjutan							
1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi strategis berbasis potensi lokal	Persentase Kontribusi Sektor Strategis Perdagangan, Pertanian Dan Perikanan Terhadap PDRB	100,25%	Program Pengembangan Ekspor	Net Ekspor Barang dan Jasa (Rp Milyar)	97,56%	Menunjang	Program Pengembangan Ekspor dengan indikator kinerja Net Ekspor Barang dan Jasa (Rp Milyar) menunjang Meningkatnya Volume Ekspor
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM Produk Lokal Yang Dipasarkan Melalui Fasilitas Kemitraan, Pameran dan Promosi Lainnya	493%	Menunjang	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan indikator kinerja Persentase UMKM Produk Lokal Yang Dipasarkan Melalui Fasilitas Kemitraan, Pameran dan Promosi Lainnya menunjang Persentase UMKM Produk Lokal Yang Dipasarkan Melalui Fasilitas Kemitraan, Pameran dan Promosi Lainnya
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	228%	Menunjang	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Industri menunjang Meningkatnya Pertumbuhan Industri
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibina	102%	Menunjang	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibina menunjang Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	% koperasi mengalami peningkatan dalam tatakelola	41%	Menunjang	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan indikator kinerja % koperasi mengalami peningkatan dalam tatakelola menunjang Meningkatnya kapasitas tata kelola koperasi
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	% koperasi yang memperoleh diklat perkoperasian	70,70%	Menunjang	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator kinerja % koperasi yang memperoleh diklat perkoperasian menunjang Meningkatnya



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kapasitas pengurus koperasi
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	56,95%	Menunjang	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator kinerja Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan menunjang Meningkatnya kapasitas pelaku usaha mikro
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman pangan (padi) (ton/ha	384%	Menunjang	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator produktivitas tanaman pangan padi dan jagung serta tanaman perkebunan tebu; jumlah peningkatan produksi komoditas peternakan menunjang Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan tanaman perkebunan
					Produktivitas tanaman pangan (jagung) (ton/ha)	380,68%		
					Produktivitas tanaman perkebunan (tebu) (ton/ha)	197,22%		
					Jumlah	132,72%		



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					peningkatan produksi komoditas peternakan (ton)			
				Program Penyuluhan Pertanian	% SDM pertanian (penyuluh pertanian dan petani) yang ditingkatkan	100%	Menunjang	Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator kinerja % SDM pertanian (penyuluh pertanian dan petani) yang ditingkatkan menunjang meningkatnya kapasitas SDM pertanian (penyuluh pertanian dan petani)
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	% penanganan bencana pertanian	100%	Menunjang	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator kinerja % penanganan bencana pertanian menunjang meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan	Persentase pengendalian Kesehatan hewan	99%	Menunjang	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	dan Kesehatan Masyarakat veteriner			Veteriner dengan indikator kinerja Persentase pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner menunjang meningkatnya pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan (ton)	56%	Menunjang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja Produksi Perikanan (ton) menunjang meningkatnya produksi perikanan
1.2	Meningkatnya Daya Saing Kota di Level Nasional	Indeks Daya Saing Daerah	99,73%	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100%	Menunjang	Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator kinerja Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal menunjang Meningkatnya promosi investasi
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan	100%	Menunjang	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Masyarakat atas pelayanan perizinan menunjang Meningkatnya pelayanan perizinan
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Skor Percepatan Pelayanan Berusaha (PPB)	N/A	Menunjang	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator kinerja Skor Percepatan Pelayanan Berusaha (PPB) menunjang Meningkatnya iklim investasi
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	109,93%	Menunjang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator kinerja Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjang meningkatnya kualitas jaringan irigasi
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	94,58%	Menunjang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Minum Perpipaan menunjang Meningkatnya kualitas air siap minum perpipaan
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase peningkatan sistem pengolahan persampahan	90,00%	Menunjang	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan indikator kinerja Persentase peningkatan sistem pengolahan persampahan menunjang Meningkatnya kuantitas sistem pengolahan persampahan
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik	106,85%	Menunjang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator kinerja Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik menunjang Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pengelolaan bangunan gedung	86,04%	Menunjang	Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator kinerja Persentase



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								pengelolaan bangunan gedung menunjang Meningkatnya ketaatan bangunan gedung terhadap aturan
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase / Gorong-Gorong dalam kondisi baik	100,09%	Menunjang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator kinerja Persentase Drainase/Gorong-Gorong dalam kondisi baik
				Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap	104,17%	Menunjang	Program Penyelenggaraan Jalan dengan indikator kinerja Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap menunjang Meningkatnya kualitas jalan perkotaan
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perlengkapan LLAJ dalam kondisi baik	99,94%	Menunjang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator kinerja Persentase perlengkapan LLAJ dalam kondisi baik menunjang Meningkatnya kualitas



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								fasilitas perlengkapan LLAJ
					Persentase Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran	107,89%	Menunjang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator kinerja Persentase Kegiatan Penegakan Peraturan dan Penertiban Perparkiran menunjang Terwujudnya ketertiban perparkiran di Tepi Jalan Umum
					Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik	98,70%	Menunjang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator kinerja Persentase sarana prasarana angkutan umum dalam kondisi baik menunjang Mewujudkan angkutan umum perkotaan yang nyaman
					Persentase Ketaatan Kendaraan Bermotor Wajib	99,02%	Menunjang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator kinerja Persentase



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Uji Melaksanakan Uji KIR			Ketaatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Melaksanakan Uji KIR menunjang Meningkatnya Ketaatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Melaksanakan Uji KIR
					Persentase sarana prasarana keselamatan LLAJ dalam kondisi baik	99,89%	Menunjang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator kinerja Persentase sarana prasarana keselamatan LLAJ dalam kondisi baik menunjang Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Keselamatan LLAJ
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang tertata	117,59%	Menunjang	Program Pengembangan Perumahan dengan indikator kinerja Persentase perumahan yang tertata menunjang Meningkatnya perumahan yang tertata
				Program Peningkatan	Persentase PSU Perumahan yang	138,10%	Menunjang	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	terkelola			Utilitas Umum (PSU) dengan indikator kinerja Persentase PSU Perumahan yang terkelola menunjang Meningkatnya PSU Perumahan yang terkelola dengan baik
1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	105,40%	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	106,26%	Menunjang	Berkurangnya luasan permukiman kumuh
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	55,73%	Menunjang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial menunjang Menurunnya Angka Kemiskinan
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan	97,24%	Menunjang	Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja Persentase PPKS yang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					rehabilitasi sosial			memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial menunjang Menurunnya Angka Kemiskinan
1.4	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	98,52%	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terfasilitasi informasi kerja	100%	Menunjang	Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Persentase pencari kerja yang terfasilitasi informasi kerja menunjang Menurunnya Angka Kemiskinan
				Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan)	100%	Menunjang	Program Hubungan Industrial dengan indikator kinerja Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) menunjang Menurunnya Angka Kemiskinan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas	Persentase pencari kerja yang mengikuti	0%	Tidak Menunjang	Indikator program “Persentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan”



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Tenaga Kerja	pelatihan			tidak menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi ini belum dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan, seiring dengan adanya efisiensi anggaran dan perubahan jenis pelatihan kerja, sehingga merubah semua perencanaan (reschedule) termasuk mekanismenya, mulai dari pendaftaran, verifikasi peserta, penetapan peserta, proses pengadaan barang/jasa dan waktu pelaksanaannya terlalu mepet berdampak terhadap penyedia yang sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sampai dengan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								selesai sesuai batas akhir penyerapan anggaran. Selain itu, terdapat penyesuaian aspek teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan serta keselarasan materi pelatihan dengan arah kebijakan kinerja organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan pelatihan belum dapat dilaksanakan, sehingga anggaran yang dialokasikan belum terserap.
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	4,31%	Menunjang	Stabilitas harga menjaga daya beli masyarakat dan kelancaran transaksi perdagangan, sehingga mendukung peningkatan PDRB sektor perdagangan
2.	Terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Rukun dan Toleran							
2.1	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	99,56%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan	Persentase Laporan Masyarakat	86,5%	Menunjang	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Karakter Kebangsaan	Terkait Potensi Konflik Radikalisme			indikator Persentase Laporan Masyarakat Terkait Potensi Konflik Radikalisme menunjang Meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase laporan masyarakat terkait potensi konflik SARA	94,3%	Menunjang	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator kinerja Persentase laporan masyarakat terkait potensi konflik SARA menunjang Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	Persentase laporan tim kewaspadaan dini terkait potensi konflik di masyarakat	78,8%	Menunjang	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indikator kinerja Persentase laporan tim kewaspadaan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penanganan Konflik Sosial				dini terkait potensi konflik di masyarakat menunjang Meningkatkan Penyelesaian Potensi Konflik Sosial di Wilayah
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pencegahan konflik politik di wilayah Kota Kediri	97,40%	Menunjang	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator kinerja Persentase pencegahan konflik politik di wilayah Kota Kediri menunjang meningkatnya kerukunan umat beragama
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase capaian Ormas melaporkan keberadaannya disertai dengan dokumen lengkap	96,90%	Menunjang	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator kinerja Persentase capaian Ormas melaporkan keberadaannya disertai dengan dokumen lengkap menunjang meningkatnya kerukunan umat beragama



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Produktif							
3.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	101,08%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase capaian kinerja pelayanan puskesmas dan RS Pemerintah Daerah	84,7%	Menunjang	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Persentase capaian kinerja pelayanan puskesmas dan RS Pemerintah Daerah menunjang meningkatnya kualitas Kesehatan perorangan dan masyarakat
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase UKBM yang di ukur dan dibina tingkat perkembanganya	100%	Menunjang	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan indikator Persentase UKBM yang di ukur dan dibina tingkat perkembanganya menunjang meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	110,2%	Menunjang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator kinerja Rasio



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kesehatan				tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi menunjang meningkatnya kuantitas SDM kesehatan
3.2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	100,00%	Program Pengelolaan Pendidikan	a. APM SD/MI/Paket A (%) b. APM SMP/MTs/Paket B (%) c. APK TK (%) d. Angka Melek Huruf diatas 15 tahun" 82,39%	106,87% 108,24% 104,88% 100,00%	Menunjang	Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator kinerja Indeks SPM Rapor Pendidikan menunjang Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	95,68%	Menunjang	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan indikator kinerja persentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan menunjang Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan
				Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio kunjungan perpustakaan	201,9%	Menunjang	Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator kinerja Rasio



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kunjungan perpustakaan menunjang meningkatnya layanan perpustakaan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan Kegiatan Olah raga yang diselenggarakan	200%	Menunjang	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Kegiatan Olah raga yang diselenggarakan menunjang meningkatnya pelaksanaan kegiatan olahraga
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pembinaan Kepemudaan	111%	Menunjang	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator kinerja Persentase Pembinaan Kepemudaan menunjang kapasitas kepemudaan
3.3	Meningkatnya kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam	Indeks Pembangunan Gender	N/A	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender	55,10%	Menunjang	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender menunjang meningkatnya komitmen



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	pembangunan							terhadap pengarusutamaan gender
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prevalensi Perkawinan Anak	N/A	Menunjang	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator kinerja Prevalensi Perkawinan Anak meunjang menurunnya angka perkawinan anak
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani secara komprehensif	N/A	Menunjang	Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani secara komprehensif menunjang meningkatnya layanan perlindungan anak
				Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT per 100,000 keluarga	N/A	Menunjang	Program Perlindungan Perempuan dengan indikatoor kinerja Rasio KDRT per 100,000 keluarga menunjang meningkatnya layanan perlindungan perempuan
				Program Pemberdayaan	Median Usia Kawin Pertama	MUKP : 22,2%	Menunjang	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Perempuan (MUKP)			Sejahtera (KS) dengan indikator kinerja Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) menunjang meningkatnya kualitas keluarga
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Kelurahan Layak Anak	N/A	Menunjang	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator kinerja Cakupan Kelurahan Layak Anak menunjang meningkatnya pemenuhan hak anak
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan OPD yang menyajikan data sektoral terpilah gender	92,67%	Menunjang	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dengan indikator kinerja Cakupan OPD yang menyajikan data sektoral terpilah gender menunjang meningkatnya kualitas data sektoral terpilah gender dan anak
				Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	95%	Menunjang	Program Pengendalian Penduduk dengan indikator kinerja total Fertility Rate (TFR); age Specific Fertiity
					Age Specific Fertiity Rate	109,89%		



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					(ASFR)			Rate (ASFR) menunjang terwujudnya pengendalian penduduk sesuai target
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal							
4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	109,65%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan	101,30%	Menunjang	Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan menunjang meningkatnya pelayanan perizinan
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	102%	Menunjang	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator kinerja Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal menunjang Meningkatnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal
				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kualitas dan kuantitas	97,51%	Menunjang	Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja Persentase layanan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					pelayanan publik dokumen kependudukan			dokumen kependudukan yg berkualitas menunjang Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kualitas data kependudukan yang valid	98,62%	Menunjang	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase kualitas data kependudukan yang valid menunjang Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	109%%	Menunjang	Program Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku menunjang Meningkatnya pengelolaan kearsipan
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase layanan publik yang berkualitas	100%	Menunjang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase layanan publik yang berkualitas menunjang Meningkatnya



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Layanan Masyarakat di Kecamatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%%	Menunjang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator kinerja Persentase Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menunjang Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	117,75%	Menunjang	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator kinerja Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) menunjang Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan	100%	Menunjang	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan menunjang Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	% Kebijakan daerah yang dipublikasikan	57,95% (s/d TW III)	Menunjang	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja % Kebijakan daerah yang dipublikasikan menunjang Meningkatnya kualitas publikasi kebijakan daerah
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	% aplikasi e -Gov yang terintegrasi	30,66% (s/d TW III)	Menunjang	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator kinerja % aplikasi e -Gov yang terintegrasi menunjang Meningkatnya pengelolaan aplikasi e-Gov yang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Terintegrasi
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Statistik Sektoral sesuai Prinsip SDI	87%	Menunjang	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Statistik Sektoral sesuai Prinsip SDI menunjang Meningkatnya Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang Memenuhi Prinsip SDI
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%informasi yang disampaikanmelalui jaringan komunikasi yang aman	1,56% (s/d TW III)	Menunjang	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator kinerja %informasi yang disampaikanmelalui jaringan komunikasi yang aman menunjang meningkatnya keamanan informasi
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Ruang Lingkup Indeks Ketenteraman dan Ketertiban yang	100%	Menunjang	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Capaian Ruang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					berkategori baik			Lingkup Indeks Ketenteraman dan Ketertiban yang berkategori baik menunjang Meningkatnya Upaya Penanganan dan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan yang berlaku
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase JPTP, JA, JF dan pelaksana yang mengikuti pengembangan kompetensi	112,86%	Menunjang	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja Persentase JPTP, JA, JF dan pelaksana yang mengikuti pengembangan kompetensi menunjang Meningkatnya kompetensi ASN
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pembahasan Raperda	103,51%	Menunjang	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator kinerja Persentase Pembahasan Raperda menunjang Terwujudnya dukungan pelaksanaan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								tugas dan fungsi DPRD
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	99,73%	Menunjang	Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) menunjang Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang menerapkan administrasi terstandar	80,87%	Menunjang	Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase kelurahan yang menerapkan administrasi terstandar menunjang Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase layanan Hukum yang terfasilitasi	100%	Menunjang	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja Persentase layanan Hukum yang terfasilitasi menunjang Meningkatnya kualitas layanan hukum
				Program	Persentase	63,89%	Menunjang	Program Pemerintahan dan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Tepat Sasaran			Kesejahteraan Rakyat dengan indikator kinerja Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Tepat Sasaran menunjang Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Hasil PEKPPP Yang Ditindaklanjuti	100%	Menunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil PEKPPP Yang Ditindaklanjuti menunjang Meningkatnya Rekomendasi Hasil PEKPPP Yang Ditindaklanjuti
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	IPP Bagian Prokompim	121,88%	Menunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja IPP Bagian Prokompim menunjang Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Kepala Daerah



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	IPP Bagian Umum	87,50%	Menunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja IPP Bagian Umum menunjang Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan dan Kesekretariatan Daerah
4.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	101,58%	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase target kinerja RKPD dengan RPJMD	100%	Menunjang	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menunjang sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian target program	100%	Menunjang	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menunjang sasaran Meningkatnya pengendalian daerah
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase inovasi yang ditetapkan sebagai inovasi daerah	122,44%	Menunjang	Program penelitian dan pengembangan daerah menunjang Mewujudkan perencanaan pembangunan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								daerah serta mendorong peningkatan pemanfaatan inovasi daerah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rata-rata Nilai AKIP Komponen Pelaporan PD	96,38%	Menunjang	Indikator kinerja Rata-rata Nilai AKIP Komponen Pelaporan PD menunjang Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
				Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Maturitas SPIP	89,00%	Menunjang	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerja maturitas SPIP menunjang Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	98,25%	Menunjang	Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 menunjang Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Pemerintahan Daerah
4.3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	114,48%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	119,34%	Menunjang	Pencapaian lebih besar dari target, hal ini menunjukkan adanya inefisiensi perencanaan dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan (daya serap rendah)
					Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	145,77%	Menunjang	Pencapaian lebih besar dari target, hal ini menunjukkan adanya inefisiensi perencanaan dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan (daya serap rendah)
					Rasio belanja langsung dalam APBD di luar transfer expenditure	104,23%	Menunjang	Semakin tinggi realisasi mencerminkan tingginya komitmen pemerintah daerah pada pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur
					Rasio penyerapan anggaran	94,08%	Menunjang	Realisasi kurang dari target, dikarenakan: Adanya kegiatan yang belum selesai sehingga belum bisa dibayar, efisien anggaran dan Adanya kendala di lapangan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi	61,25%	Menunjang	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi; PersentaseKepatuhan WP; Persentase Objek/Subjek Pajak Baru yang Terdata menjadi OP/WP; Persentase Jumlah PiutangPajak/ Retribusi yang Tertagih menunjang Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
					Persentase Kepatuhan WP	102,77%	Menunjang	
					Persentase Objek/Subjek Pajak Baru yang Terdata menjadi OP/WP	100%	Menunjang	
					Persentase Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang Tertagih	125,64%	Menunjang	
4.4	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	94,97%	Program penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,47%	Menunjang	1. Dukungan optimal dari lintas sektor baik internal maupun eksternal dalam pemenuhan data dukung untuk penilaian Indeks Ketahanan Daerah 2. Penetapan target jumlah sasaran penerima layanan memberikan kepastian ukuran/penilaian untuk
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	115,10%	Menunjang	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					kesiapsiagaan terhadap bencana			target untuk ingin dicapai 3. Antusiasme warga yang ingin mendapatkan layanan edukasi dan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 4. kesiapan personil dan telah terintegrasinya layanan panggilan darurat dengan 112 halo mbak wali
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Menunjang	
				Program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran	Persentase Waktu Tanggap Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Wilayah Managemen Kebakaran	74,55%	Menunjang	Program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran dengan indikator kinerja Persentase Waktu Tanggap Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Wilayah Managemen Kebakaran menunjang Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Terwujudnya Kota Wisata yang Tertata, Nyaman dan Berkelanjutan							
5.1	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Kunjungan Wisata	105,21%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	100%	Menunjang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menunjang meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang terpelihara dengan baik	96%	Menunjang	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator kinerja Persentase destinasi wisata yang terpelihara dengan baik menunjang meningkatnya kualitas destinasi wisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan event pariwisata, budaya dan olahraga	479%	Menunjang	Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator kinerja Persentase peningkatan event pariwisata, budaya dan olahraga menunjang meningkatnya kunjungan dalam event pariwisata



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan kelompok budaya yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	Menunjang	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator kinerja Persentase pelaku ekonomi kreatif dan kelompok budaya yang ditingkatkan kapasitasnya menunjang meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan kelompok budaya
				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	99%	Menunjang	Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator kinerja Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan menunjang meningkatnya cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan
5.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	90,64%	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Mutu Air dan Udara Ambien	100%	Menunjang	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Peningkatan Mutu Air dan Udara Ambien



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								menunjang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang	Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup menunjang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				Program peningkatan Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	95%	Menunjang	Program peningkatan Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menunjang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin	Persentase Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimonitoring	41%	Menunjang	Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimonitoring menunjang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan	100%	Menunjang	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan indikator kinerja Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan menunjang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	95,54%	Menunjang	Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja Persentase Timbulan Sampah yang terkelola menunjang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025



2.4 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 16 *Capaian Anggaran Program*

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4/3
1.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	109.898.400	73.772.000	67,13%
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	64.021.028.999	55.667.777.118	86,95%
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.202.963.756	1.520.900.261	69,04%
4.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.461.958.990	8.130.841.928	85,93%
5.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.515.058.870	1.423.757.334	93,97%
6.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.161.048.480	1.836.538.647	84,98%
7.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	168.704.445	157.068.975	93,10%
8.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	10.963.141.440	253.750.846	2,31%
9.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	173.561.500	162.159.494	93,43%
10.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0	0	0,00%
11.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	496.266.000	472.722.900	95,26%
12.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.125.112.100	1.090.091.600	96,89%
13.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.783.824.953	1.676.828.086	94,00%
14.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.182.992.000	496.035.185	41,93%
15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	348.128.300	306.375.423	88,01%
16.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.042.272.560	3.735.847.970	92,42%
17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.384.022.193	31.498.678.584	69,40%
18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	570.242.250	544.186.910	95,43%
19.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	19.989.195.775	3.892.417.915	19,47%
20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.080.379.765	14.592.295.739	96,76%
21.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	133.362.700	119.218.500	89,39%



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4/3
	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
22.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	259.453.500	244.690.400	94,31%
23.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.288.133.000	1.165.703.740	90,50%
24.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	877.853.410	854.148.584	97,30%
25.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	122.866.175	114.840.000	93,47%
26.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	199.222.547.430	168.641.348.223	84,65%
27.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.390.431.967	11.082.633.293	63,73%
28.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	504.555.000	486.507.230	96,42%
29.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	33.651.650	33.453.379	99,41%
30.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	910.185.200	882.652.290	96,98%
31.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	0	0,00%
32.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	16.625.506.941	13.846.743.262	83,29%
33.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	86.484.000	86.407.128	99,91%
34.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	664.945.106	391.132.202	58,82%
35.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	370.374.255	357.571.809	96,54%
36.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	434.590.000	415.811.020	95,68%
37.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	202.723.005	143.280.235	70,68%
38.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.265.744.140	1.814.867.724	80,10%
39.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	228.890.930	203.589.700	88,95%
40.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.132.837.300	933.212.674	82,38%
41.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	90.898.265	72.465.114	79,72%
42.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	35.712.200	28.478.717	79,75%
43.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	9.100.874.760	7.967.482.438	87,55%
44.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	79.240.400	78.430.682	98,98%
45.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	900.144.896	685.213.554	76,12%
46.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.399.948.686	7.981.784.584	76,75%
47.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	8.901.889.740	6.798.903.082	76,38%



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4/3
	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
48.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.412.176.000	1.000.400.390	70,84%
49.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	142.773.800	140.915.434	98,70%
50.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	82.295.700	81.163.397	98,62%
51.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.567.797.085	3.267.082.888	91,57%
52.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	16.693.190.280	16.125.602.644	96,60%
53.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14.991.166.640	7.570.026.900	50,50%
54.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.885.553.004	4.574.704.839	93,64%
55.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	119.417.310.429,9	99.875.745.390	83,64%
56.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	482.452.498	269.334.962	55,83%
57.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	794.688.000	746.817.513	93,98%
58.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.348.897.368	17.980.431.690	92,93%
59.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	61.249.100	56.394.009	92,07%
60.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	710.100.000	469.011.848	66,05%
61.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.276.636.200	6.455.015.050	88,71%
62.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	33.000.000	31.530.242	95,55%
63.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	52.979.000	29.952.200	56,54%
64.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	224.177.000	217.675.236	97,10%
65.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	31.181.846	31.004.095	99,43%
66.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	318.552.500	165.992.900	52,11%
67.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	21.013.214.215	17.020.763.127	81,00%
68.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.768.495.078	1.739.170.567	98,34%
69.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.350.460.886	2.641.005.690	60,71%
70.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	390.269.800	317.545.960	81,37%
71.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.099.600.768	1.423.013.450	67,78%
72.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.052.874.143	907.955.909	86,24%
73.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	59.906.800	58.823.038	98,19%



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4/3
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
74.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	49.662.800	40.125.800	80,80%
75.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	55.394.920	52.187.375	94,21%
76.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	354.645.475	352.602.478	99,42%
77.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	371.739.500	360.298.970	96,92%
78.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.031.522.234	1.005.384.941	97,47%
79.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.998.972.000	1.962.925.875	98,20%
80.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	999.900.000	991.233.400	99,13%
81.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	253.830.000	248.109.215	97,75%
82.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.276.085.510	1.104.192.280	86,53%
83.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	62.277.665	51.384.920	82,51%
84.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	469.487.145	458.843.628	97,73%
85.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	168.774.465	159.024.522	94,22%
86.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.431.837.870	5.306.885.521	71,41%
87.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.868.942.500	4.846.741.694	82,58%
88.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.964.866.550	3.913.395.312	78,82%
89.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	42.260.525	33.259.300	78,70%
90.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	86.930.000	71.743.222	82,53%
91.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.664.323.900	5.516.249.800	97,39%
92.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.957.593.910	1.205.303.617	61,57%
93.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	129.850.000	127.693.834	98,34%



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4/3
94.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.045.544.520.403,55	881.175.371.052	84,28%
95.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.211.080.664	246.486.515	20,35%
96.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	31.978.022.983	18.170.229.892	56,82%
97.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	14.780.886.964	12.835.313.447	86,84%
98.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	315.512.392	298.323.555	94,55%
99.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.316.890.100	1.049.555.960	79,70%
100.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.276.412.670	912.845.023	71,52%
101.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	512.197.150	435.784.102	85,08%
102.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	129.655.300	121.671.740	93,84%
103.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.795.542.049	1.676.488.116	93,37%
104.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.674.755.362	493.946.247	6,44%
105.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.351.746.440	1.542.843.333	65,60%
106.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	21.681.450.000	1.679.068.109	7,74%
107.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	431.693.303	428.615.900	99,29%
108.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	5.238.350	5.218.099	99,61%
109.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.103.756.600	1.715.449.181	81,54%
110.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	9.000.000	6.645.850	73,84%
111.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	17.621.160.600	9.819.460.727	55,73%
112.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	6.210.000	6.177.920	99,48%
113.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	242.878.400	235.197.700	96,84%
114.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	290.373.835	256.758.327	88,42%
115.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.351.445.020	1.157.539.050	85,65%
116.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	318.216.847	218.142.674	68,55%
117.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.347.929.400	1.310.745.463	97,24%
118.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	580.054.950	451.454.665	77,83%
119.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	436.950.000	414.182.447	94,79%
120.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	216.000.000	211.415.448	97,88%



Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, lalu dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota/kabupaten, serta dari pemerintah kota/kabupaten ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

.Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pemerintah pusat kemudian menjadi milik pemerintah daerah. Sedangkan dalam asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Pada asas Tugas Pembantuan, terjadi penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Terkait dengan urusan pemerintahan, urusan yang ditugas pembantuankan adalah urusan konkuren, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun tujuan asas Tugas pembantuan ini adalah untuk lebih mempercepat pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum baik dilingkup daerah maupun secara agregat di tingkat nasional, karena rentang kendalanya lebih pendek. Secara pendanaan, Tugas Pembantuan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah Pemerintah Pusat, namun jika pemberi penugasan adalah Pemerintah Daerah Provinsi maka



pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi).

Pola tanggung jawab dalam Tugas pembantuan ini pada dasarnya adalah penerima tugas pembantuan wajib bertanggung jawab kepada pemberi penugasan. Namun jika Tugas pembantuan itu berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Walikota, maka selain Bupati/Walikota harus bertanggung jawab kepada pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga, mereka juga diwajibkan melaporkan kepada Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Tugas pembantuan dapat menjadi terminal ke arah “penyerahan penuh” suatu urusan pada daerah atau tugas pembantuan ialah langkah awal sebagai persiapan ke arah penyerahan penuh. Kaitan tugas antara tugas pembantuan dengan desentralisasi dalam melihat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seharusnya bertolak dari :

1. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi. Jadi, pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
2. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan karena dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi, daerah punya cara-cara sendiri melaksanakan tugas pembantuan.
3. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, yang mengandung unsur penyerahan, bukan penugasan. Yang dapat dibedakan secara mendasar bahwa kalau otonomi adalah penyerahan penuh, maka tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.



4. Penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Pemerintah Kota Kediri sejak tahun 2017 **tidak memperoleh alokasi dana untuk penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah pusat** karena sudah dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dari pemerintah pusat sebagai berikut.

Dasar hukum pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
- b. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148);
- c. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2017 tentang tata cara pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.

Instansi Pemberi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Non fisik tahun 2025 yang diterima oleh Pemerintah Kota Kediri diberikan oleh kementerian dan lembaga yang berkedudukan di pusat. Kementerian dan lembaga pemberi Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Kementerian/ lembaga pemberi Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Instansi Pemberi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Jenisnya

No.	Instansi Pemberi Dana Alokasi Fisik	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK)
1	Kementerian Pendidikan Dasar	DAK Fisik Bidang Pendidikan



No.	Instansi Pemberi Dana Alokasi Fisik	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK)
	dan Menengah	- Subbidang PAUD
		DAK Non Fisik Bidang Bantuan Operasional Satuan Pendidikan(BOSP) - Subbidang Batuan Operasional Sekolah - Subbidang Batuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - Subbidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
		DAK Non Fisik Bidang Tunjangan Guru ASN Daerah - Subbidang Tunjangan Profesi Guru - Subbidang Tambahan Penghasilan Guru
2	Kementerian Kesehatan	DAK Non Fisik Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Subbidang Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kab/Kota - Subbidang Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas - Subbidang Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan
3	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN	DAK Non Fisik Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana
4	Kementerian Pekerjaan Umum	DAK Fisik Bidang Air Minum Subbidang Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
		DAK Fisik Bidang Sanitasi - Subbidang Sanitasi - Subbidang Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
5	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Perumahan dan Permukiman - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DAK Non Fisik Bidang Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya Subbidang BOP Museum

Sumber : BAPPEDA Kota Kediri

3.1.1 Perangkat Daerah Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada tahun anggaran 2025 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non fisik dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, sebagai berikut.



Tabel 3. 2 Perangkat Daerah Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Jenisnya

No.	Instansi Pemberi Dana Alokasi Fisik	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK)
1	Dinas Pendidikan	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Subbidang PAUD
		DAK Non Fisik Bidang Bantuan Operasional Satuan Pendidikan(BOSP) - Subbidang Batuan Operasional Sekolah - Subbidang Batuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - Subbidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
		DAK Non Fisik Bidang Tunjangan Guru ASN Daerah - Subbidang Tunjangan Profesi Guru - Subbidang Tambahan Penghasilan Guru
2	Dinas Kesehatan	DAK Non Fisik Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Subbidang Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kab/Kota - Subbidang Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas - Subbidang Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK Non Fisik Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DAK Fisik Bidang Air Minum Subbidang Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
		DAK Fisik Bidang Sanitasi - Subbidang Sanitasi - Subbidang Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Perumahan dan Permukiman - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	DAK Non Fisik Bidang Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya Subbidang BOP Museum

Sumber : BAPPEDA Kota Kediri



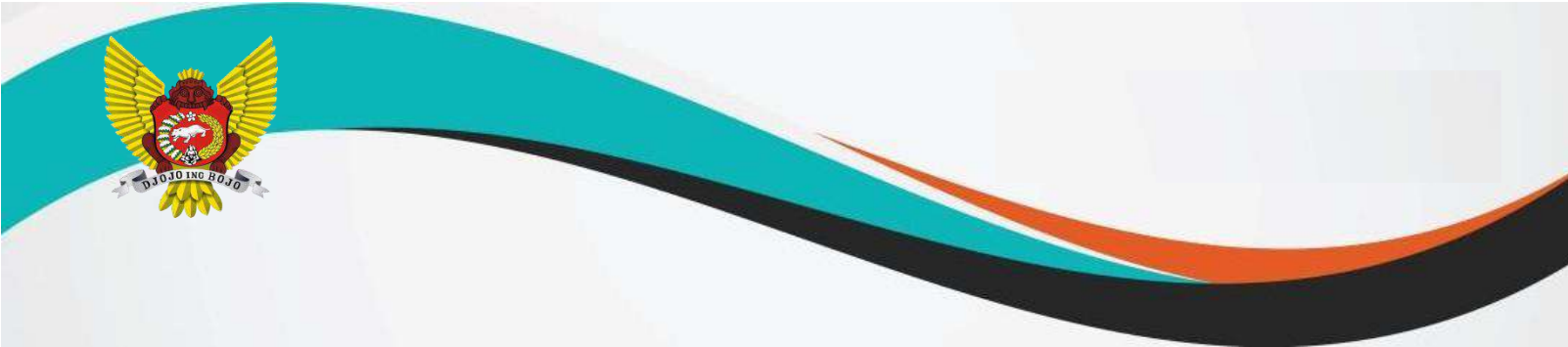


3.1.2 Sub Bidang, Kegiatan dan Keluaran DAK

Pelaksanaan DAK berdasarkan perangkat daerah, sub bidang, kegiatan dan keluarannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Sub Bidang, Kegiatan dan Keluaran

No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
DAK FISIK				
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Revitalisasi PAUD	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran: TK Melati Dharma Wanita Mojoroto, TK Dharma Wanita Singonegaran III, TK Dharma Wanita Rejomulyo, TK Dharma Wanita Pakunden II, TK Dharma Wanita Campurejo, TK Dharma Wanita Banjarmлатi, TK Darma Wanita Tamanan, TK Dharma Wanita Bangsal, TK Dharma Wanita Kleco, TK Dharma Wanita Ngletih.
2	DPUPR	Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah: Kelurahan Ketami
		Sanitasi	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Individu/Komunal	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK: Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Manisrenggo, Kelurahan Banjaran, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Jamsaren
		Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Peningkatan/ Rehabilitasi TPS3R: Kelurahan Ketami



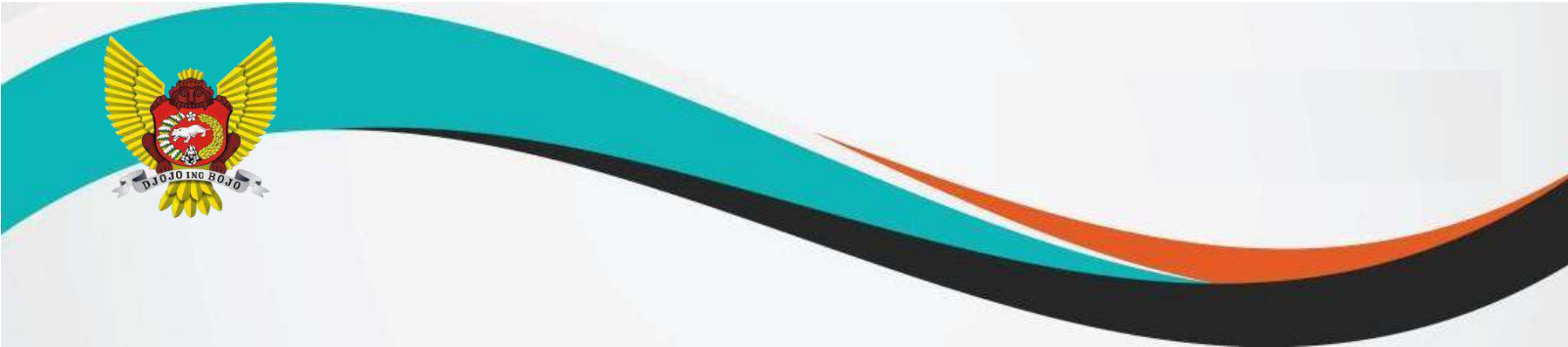
No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
		Kumuh Terpadu	Persampahan - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Perumahan dan Permukiman - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu melalui Peremajaan, Pemugaran, Relokasi, dan Pembangunan Permukiman Baru	Pembangunan Baru Rumah Swadaya: Kelurahan Ketami
				Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: Kelurahan Ketami
				Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan: Kelurahan Ketami
DAK NON FISIK				
1	Dinas Pendidikan	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	Bantuan Operasional Sekolah	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Tunjangan Guru ASN Daerah	Tunjangan Profesi Guru	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Guru ASN
			Tambahan Penghasilan Guru	Penyediaan Tambahan Penghasilan Guru ASN
2	Dinas Kesehatan	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bantuan Operasional Kesehatan - Dinas Kab/Kota	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup; Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit; Penguatan Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
				Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); Penguatan Koordinasi Tata Kelola UKM Sekunder; Kefarmasian dan BMHP; Pembinaan Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas; Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan untuk Topik Prioritas
			BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 - 6 bulan penerbitan SPPIRT; Pengawasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga
			BOK Puskesmas	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal; Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup; Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit; Manajemen Puskesmas; Insentif UKM; Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD
3	DP3AP2KB	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja; Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Miniloka karya (Minilok); Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang; Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana,
			Pendayagunaan	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
			Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pedesaan (IMP)
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
			Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga; Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB; Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
			Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/kota	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kb ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya; Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
			keluarga	Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS); Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita); Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)
4	DISBUDPARPORA	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Museum: Kajian Koleksi Museum, Kajian Pengunjung Museum, Seminar Kajian Koleksi Museum, Registrasi, Reventarisasi Koleksi, Bahan Konservasi, Pemeliharaan Tata Pamer Program Publik: Publikasi Museum melalui Media Cetak dan/atau Elektronik, Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Koleksi, Pameran Museum, Lomba Tari, Lomba Mewarnai, Belajar Bersama di Museum Pemeliharaan Sarana dan Prasarana: Pemeliharaan Museum

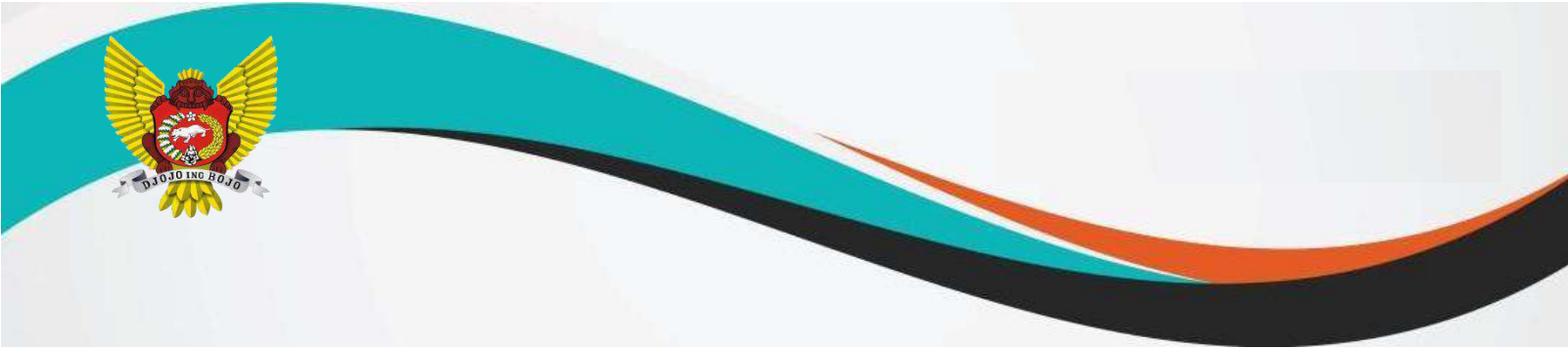
Sumber : BAPPEDA Kota Kediri

3.1.3 Anggaran dan Realisasi DAK

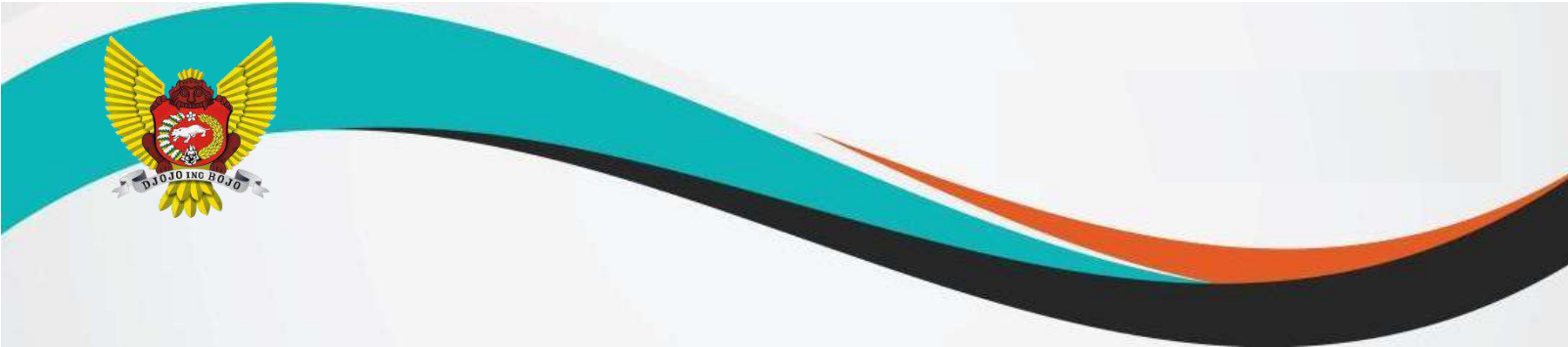
Anggaran dan realisasi DAK berdasarkan perangkat daerah, sub bidang dan kegiatan tahun anggaran 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi DAK TA 2025

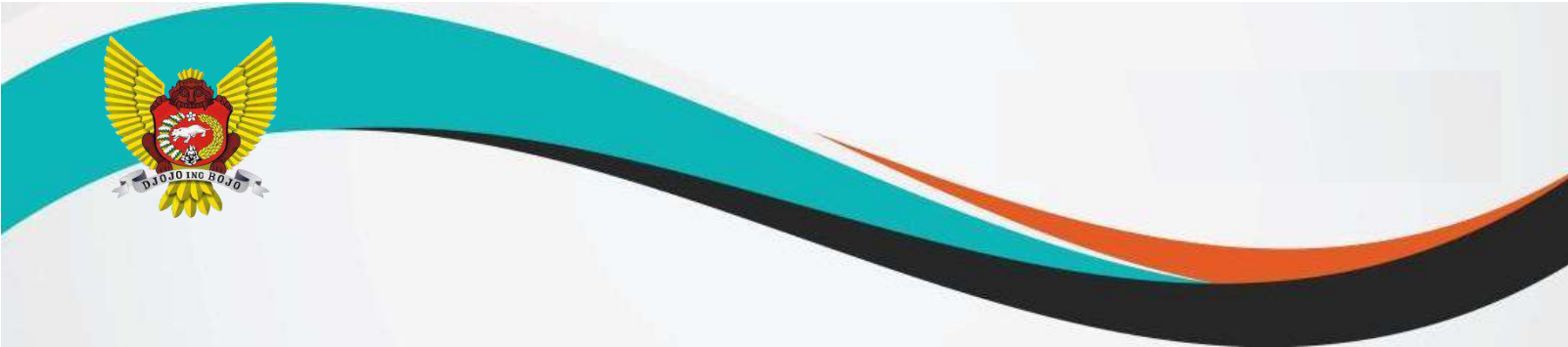
No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	PAGU Kontraktual	Realisasi	
					(Rp)	%
DAK FISIK						
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Revitalisasi PAUD	499.957.000	497.049.420	99,42%
2	DPUPR	Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	589.822.000	589.822.000	100%



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	PAGU Kontraktual	Realisasi	
					(Rp)	%
		Kumuh Terpadu				
		Sanitasi	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Individu/Komunal	3.998.000.000	3.998.000.000	100%
		Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	598.500.000	598.500.000	100%
3	Dinas Perkim	Perumahan dan Permukiman - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu melalui Peremajaan, Pemugaran, Relokasi, dan Pembangunan Permukiman Baru	3.029.201.878	3.022.364.879	99,77%
DAK NON FISIK						
1	Dinas Pendidikan	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	Bantuan Operasional Sekolah	54.203.042.200	47.300.091.822	87,26%
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD			
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan			
		Tunjangan Guru ASN Daerah	Tunjangan profesi guru	55.388.657.000	52.844.625.700	95,41%
			Tambahan penghasilan guru	756.106.000	392.500.000	51,91%
2	Dinas Kesehatan	Bantuan Operasional Kesehatan	BOK Dinas Kab/Kota	4.302.939.317	3.903.701.493	90,72%
			BOK Pengawasan Obat Dan	151.867.000	104.880.939	69,06%



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	PAGU Kontraktual	Realisasi	
					(Rp)	%
			Makanan			
			BOK Puskesmas	4.973.448.965	4.871.011.472	97,94%
3	DP3AP2KB	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	485.000.000	450.018.000	92,79%
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	133.600.000	130.719.000	97,84%
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	89.000.000	67.254.200	75,57%
			Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota	170.400.000	140.113.400	82,23%
			Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/kota	444.059.000	393.261.640	88,56%
			Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	1.598.200.000	1.538.010.986	96,23%



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	PAGU Kontraktual	Realisasi	
			keluarga		(Rp)	%
4	DISBUDPARPORA	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum	655.188.000	603.384.600	92,09%

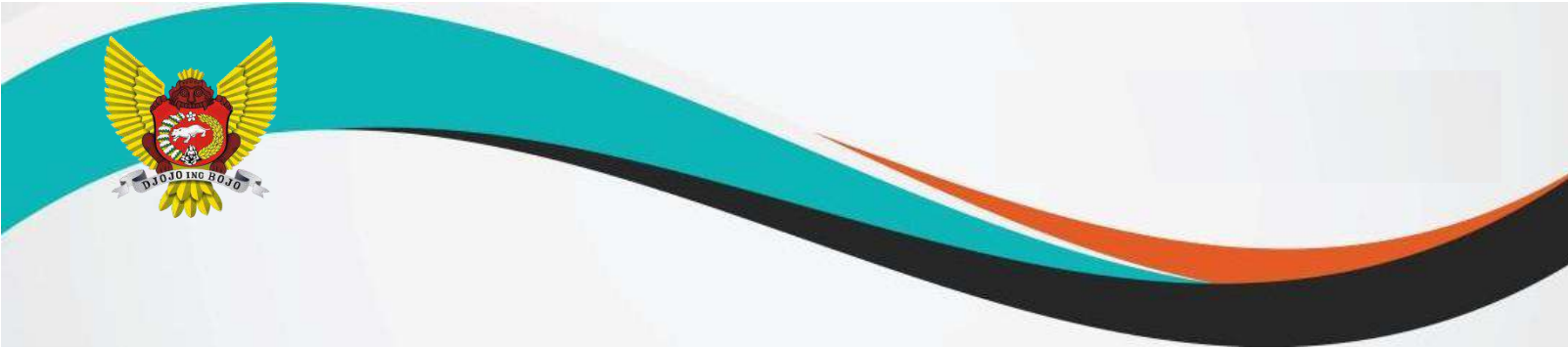
Sumber : BPPKAD Kota Kediri

4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Upaya Penyelesaian

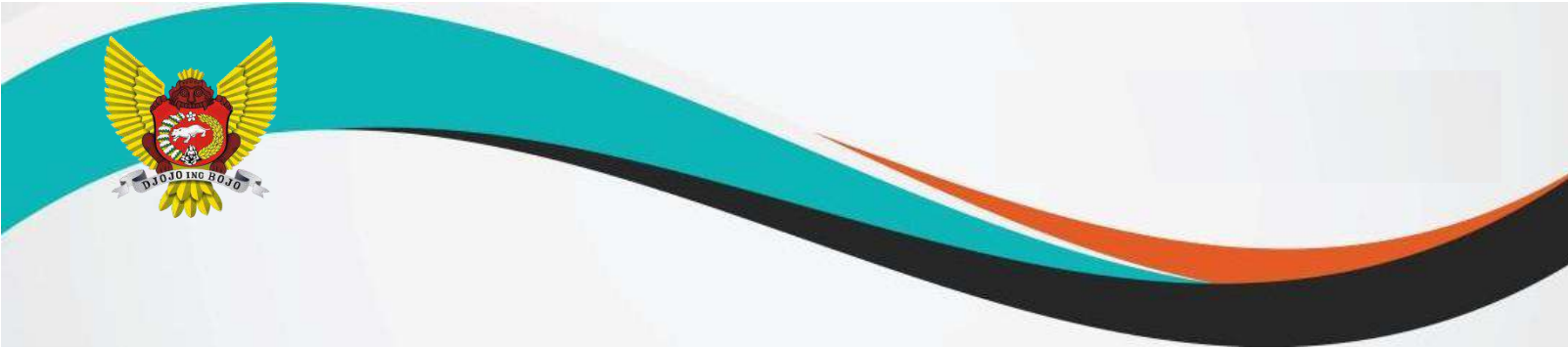
Hambatan/permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan DAK serta upaya penyelesaiannya diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Hambatan/Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya

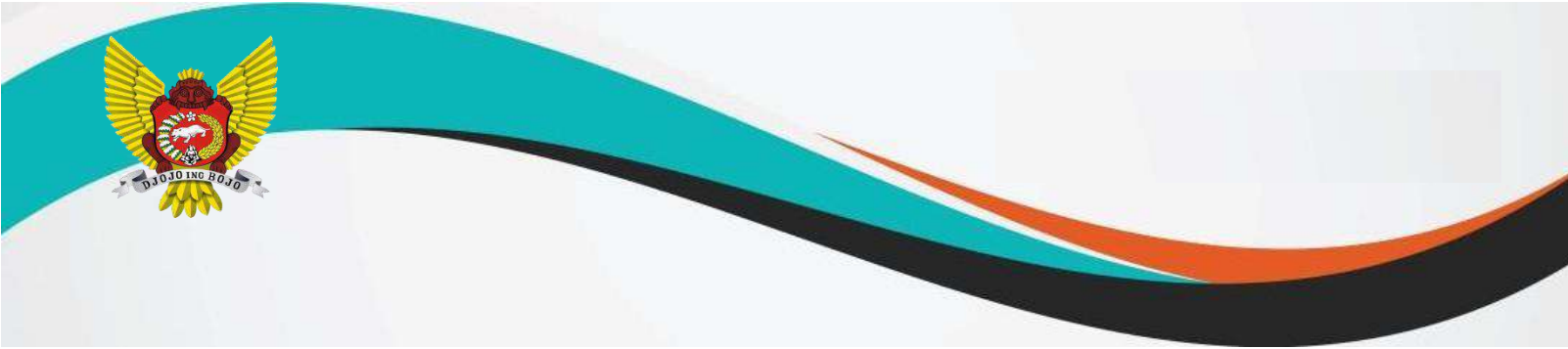
No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Hambatan / Permasalahan	Upaya Penyelesaian
DAK FISIK					
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Revitalisasi PAUD	Tidak terdapat kendala.	
2	DPUPR	Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Tidak terdapat kendala.	
		Sanitasi	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Individu/Komunal	Tidak terdapat kendala.	
		Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh	Tidak terdapat kendala.	



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Hambatan / Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			Terpadu		
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Perumahan dan Permukiman - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu melalui Peremajaan, Pemugaran, Relokasi, dan Pembangunan Permukiman Baru	Terdapat sisa anggaran DAK karena pembayaran dilakukan sesuai kontrak	
DAK NON FISIK					
1	Dinas Pendidikan	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	Bantuan Operasional Sekolah	Tidak terdapat kendala.	
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	Tidak terdapat kendala.	
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Tidak terdapat kendala.	
		Tunjangan Guru ASN Daerah	Tunjangan Profesi Guru	Tidak terdapat kendala.	
			Tambahan Penghasilan Guru	Tidak terdapat kendala.	
2	Dinas Kesehatan	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Bantuan Operasional Kesehatan - Dinas Kab/Kota	Tidak terdapat kendala.	
			BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Tidak terdapat kendala.	
			BOK Puskesmas	Tidak terdapat kendala.	
3	DP3AP2KB	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	Tidak terdapat kendala.	



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Hambatan / Permasalahan	Upaya Penyelesaian
			Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tidak terdapat kendala.	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Tidak terdapat kendala.	
			Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota	Tidak terdapat kendala.	
			Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/kota	Tidak terdapat kendala.	
			Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Tidak terdapat kendala.	



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Hambatan / Permasalahan	Upaya Penyelesaian
4	DISBUDPARPORA	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum	Tidak terdapat kendala.	

Sumber : BAPPEDA Kota Kediri



BAB
IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAK

4.1 URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis

Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian SPM Kota Kediri Bidang Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Tahun 2025
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100%	Tahun 2025
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Tahun 2025





4.1.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk pelaksanaan Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 58,409,318,401 (lima puluh delapan milyar empat ratus Sembailan juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA KEDIRI	1,819,197,816,097
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	374,455,550,742
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	58,409,318,401
	APBD	58,409,318,401
	A. APBD MURNI	55,950,782,401
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	516,126,000
	D. APBD DAK NON FISIK	1,942,410,000
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: e-SPM 2025

4.1.4 Hasil Capaian

Hasil Capaian Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan pada Tahun 2025 adalah 92,56 % (tuntas utama) dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			92.56 %	
1	Pendidikan Dasar Usia Dini					95.55 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	97.42.00	2.58	97.42 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	77.94 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8706	8482	224	97.43 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	17.61 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/	Jumlah Mutu Yang Terlayani/	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total	AKSI
						Pencapaian	
-1	-2	-3	-4	-5			-8
			Dipenuhi	Terpenuhi			
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					88.07 %	
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	100	82.79	172.100	82.79 %	
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	100	93.34.00	66.600	93.34 %	
2	Pendidikan Dasar					99.91 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	101.59.00	-1.59	101.59 %	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	113.27.00	-13.27	113.27 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	43323	45817	-2494	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.91 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.54 %	
	SD (2025)					100.00 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	86.96	88.85	-18.900	100.00 %	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	75.01.00	82.37.00	-72.700	100.00 %	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74.28.00	76.73	-24.500	100.00 %	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75.04.00	76.87	-18.300	100.00 %	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.06.00	59.59.00	-29.900	100.00 %	
	SMP (2025)					99.09 %	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	89.29.00	91.62	-23.300	100.00 %	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	84.26.00	87.51.00	-32.500	100.00 %	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	71.65	72.65	-10.000	100.00 %	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75.82	72.37.00	34.500	95.45 %	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.32.00	61.24.00	-0.9200	100.00 %	
3	Pendidikan Kesetaraan					82.21 %	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	82.22.00	0,7625	82.22 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5			-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	65.77 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1349	1109	240	82.21 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.44 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					82.22 %	
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	100	82.22.00	177.800	82.22 %	

Sumber: e-SPM 2025

1. Indikator Pendidikan Dasar Usia Dini pada tahun 2025 mendapat capaian 95,55 % dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Perhitungan Penerima Layanan Indikator Pendidikan Dasar Usia Dini

Jumlah Warga Penerima Pelayanan
warga negara usia 5 – 6 tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan
warga negara usia 5 – 6 tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

$\times 100$

Realisasi Penerima Layanan Indikator Pendidikan Dasar Usia Dini

I.1.1

$\frac{8.706}{8.482} \times 100\% = 97,43\%$

Capaian layanan warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD tahun 2025 capaiannya adalah 97,43%. Hal ini dikarenakan orang tua yang anak - anaknya berada pada usia PAUD menganggap masuk jenjang PAUD itu bukanlah hal wajib. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pendidikan Dasar Usia Dini sebesar 80% dikalikan 97,43% sehingga hasilnya 77,94%.

- b. Mutu layanan untuk Indikator Pendidikan Dasar Usia Dini

Hasil untuk Mutu layanan pada Sub Urusan Pendidikan Dasar Usia Dini adalah sebagai berikut:

- Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B target tahun 2025 adalah 100% dan realisasi tahun 2025 adalah 82,79%

➤ Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV) target tahun 2025 adalah 100% dan realisasi tahun 2025 adalah 93,34%

Dari sub indikator mutu di atas didapatkan hasil sebesar 88,07%, dalam perhitungan SPM mutu layanan pada indikator layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan sub urusan Pendidikan Dasar Usia Dini adalah Sebesar 17,61% sehingga capaian SPM untuk Sub urusan Pendidikan Dasar Usia Dini adalah 77,94 % ditambah 17,61% yaitu sebesar 95,55%

2. Indikator Pendidikan Dasar pada tahun 2025 mendapat capaian 99,91 % dengan perhitungan sebagai berikut:



a. Perhitungan Penerima Layanan Indikator Pendidikan Dasar

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)}} \times 100\%$$

I.1.2 Realisasi Penerima Layanan Indikator Pendidikan Dasar

I.1.3 $\frac{45.817}{43.323} \times 100\% = 105,76\%$

I.1.4 Capaian layanan warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS) tahun 2025
capaannya adalah 105,76%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 jumlah peserta didik di pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS) lebih besar dari pada target penerima dikarenakan ada peserta didik yang berdomisili di luar kota kediri sedangkan target yang disampaikan adalah peserta didik yang berdomisili di Kota Kediri saja. Dalam penghitungan pada aplikasi e-SPM untuk capaian di atas 100% maka akan dihitung sama dengan 100%.
Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pendidikan Dasar sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pendidikan Dasar

I.1.5 SD (2025)

- Kemampuan literasi target nilai tahun 2025 adalah 86,96 dan realisasi nilai tahun 2025 adalah 88,85 pada aplikasi e-SPM untuk capaian di atas 100% maka akan dihitung sama dengan 100%
- Kemampuan numerasi target nilai tahun 2025 adalah 75,1 dan realisasi nilai tahun 2025 adalah 82,37 pada aplikasi e-SPM untuk capaian di atas 100% maka akan dihitung sama dengan 100%
- Indeks iklim keamanan target nilai tahun 2025 adalah 74,28 dan realisasi nilai tahun 2025 adalah 76,73 pada aplikasi e-SPM untuk capaian di atas 100% maka akan dihitung sama dengan 100%
- Indeks iklim kebhinekaan target nilai tahun 2025 adalah 75,04 dan realisasi nilai tahun 2025 adalah 76,87 pada aplikasi e-SPM untuk capaian di atas 100% maka akan dihitung sama dengan 100%
- Indeks iklim inklusivitas target nilai tahun 2025 adalah 56,6 dan realisasi nilai tahun 2025 adalah 59,59 pada aplikasi e-SPM untuk capaian di atas 100% maka akan dihitung sama dengan 100%



I.1.6 Total untuk capaian mutu layanan pada indikator SD (2025)

adalah 100% menurut perhitungan aplikasi e-SPM

I.1.7 SMP (2025)

- Kemampuan literasi target nilai tahun 2025 adalah 89,29 dan realisasi nilai tahun 2025 adalah 91,62 pada aplikasi e-SPM untuk capaian di atas 100% maka akan dihitung sama dengan 100%
- Kemampuan numerasi target nilai tahun 2025 adalah 84,26 dan realisasi nilai tahun 2025 adalah 87,51 pada aplikasi e-SPM untuk capaian di atas 100% maka akan dihitung sama dengan 100%
- Indeks iklim target nilai tahun 2025 adalah 71,65 dan realisasi nilai tahun 2025 adalah 72,65 pada aplikasi e-SPM untuk capaian di atas 100% maka akan dihitung sama dengan 100%
- Indeks iklim kebhinekaan target nilai tahun 2025 adalah 75,82 dan realisasi nilai tahun 2025 adalah 72,37 dengan capaian 95,45 menurut aplikasi e-SPM
- Indeks iklim inklusivitas target nilai tahun 2025 adalah 60,32 dan realisasi nilai tahun 2025 adalah 61,24 pada aplikasi e-SPM untuk capaian di atas 100% maka akan dihitung sama dengan 100%.

I.1.8 Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar

99,54%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai

20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan indikator

Pendidikan Dasar adalah Sebesar 19,91% sehingga capaian SPM

untuk Indikator Pendidikan Dasar adalah 80 % ditambah 19,91%

yaitu sebesar 99,91%

I.1.9

3. Indikator Pendidikan Kesenjangan pada tahun 2025 mendapat capaian 82,21% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Perhitungan Penerima layanan Sub Urusan Pendidikan Kesenjangan

$$\frac{\text{Jumlah warga Penerima Pelayanan warga negara usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah Target warga Penerima Pelayanan warga negara usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}} \times 100\%$$

I.1.10 Realisasi Penerima Layanan Indikator Pendidikan Kesenjangan

I.1.11 $\frac{1.109}{1.349} \times 100\% = 82,21\%$

Capaian layanan warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan tahun 2025 capainnya adalah 82,21%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pendidikan Kesenjangan sebesar 80% dikalikan 82,21% sehingga hasilnya 65,77%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pendidikan Kesenjangan



- Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan target tahun 2025 adalah 100% dan realisasi tahun 2025 adalah 82,22%.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 82,22%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pendidikan Dasar adalah Sebesar 16,44% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pendidikan Kesetaraan adalah 65,77% ditambah 16,44% yaitu sebesar 82,21%

4.1.5 Permasalahan, Kendala dan Solusi

Pembangunan bidang urusan pendidikan di Kota Kediri secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan Urusan Pendidikan

- 1. Kesulitan pencarian data pada tingkat kesetaraan dikarenakan banyak usia lanjut yang belum memiliki ijazah
- 2. Untuk anggaran dari kemenag (untuk anggaran SPM MI dan MTs) belum masuk ke laporan SPM
- 3. Ada form pada 4 tahapan yang belum terisi

Solusi Urusan Pendidikan

- 1. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens dengan pihak-pihak lain dalam hal ini untuk pendataan ke tingkat kelurahan
- 2. Perlu Koordinasi dengan kemenag
- 3. Perlu komitmen dari OPD teknis pengampu untuk diadakan perbaikan pengisian 4 tahapan SPM

4.2 URUSAN BIDANG KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Kediri, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan yang tertuang adalah sebagai berikut:

- d. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. Pelayanan kesehatan balita;
- h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;



- m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- o. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%), Adapun indikator Standar Pelayanan Minimal secara Nasional sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)
		INDIKATOR	NILAI	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Tahun 2025
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Tahun 2025
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Tahun 2025
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Tahun 2025
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Tahun 2025
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Tahun 2025
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Tahun 2025
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Tahun 2025
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Tahun 2025
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Tahun 2025



11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberculus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Tahun 2025
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Tahun 2025

4.2.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 25,259,118,734 (dua puluh lima milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang diperoleh dari data penganggaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA KEDIRI	1,819,197,816,097
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	431,387,640,969
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	25,259,118,734
	APBD	25,259,118,734
	A. APBD MURNI	1,314,099,569
	B. APBD DAU	20,267,674,007
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	3,112,363,990
	E. DANA BAGI HASIL	564,981,168
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: e-SPM 2025
1.1.11.1

4.2.4 Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar adalah tenaga medis, paramedis, dan non medis yang ada di Kota Kediri yang terdiri dari :

No.	Nama Sumber Daya Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter Spesialis SPOG	38
2.	Dokter Spesialis anak	35
3.	Dokter Spesialis Paru	9
4.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	12
5.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	40



6.	Dokter Umum	462
7.	Dokter Gigi	175
8.	Tenaga Kefarmasian	613
9.	Perawat	1749
10.	Bidan	562
11.	Gizi	68
12.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	56
13.	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	142
14.	Penata Rongent	44
15.	Kader Kesehatan	3355

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kediri

4.2.5 Hasil Capaian

Hasil Capaian Penerapan SPM Urusan Kesehatan pada Tahun 2025 adalah 97,07 % (tuntas utama) dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			97.07 %	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					91.88 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	73.14 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	3626	3315	311	91.42 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.74 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					93.72 %	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	363	332	31	91.46 %	
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	652680	596700	55980	91.42 %	
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	3626	3315	311	91.42 %	
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	3626	3315	311	91.42 %	
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	3626	3315	311	91.42 %	
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (greydisk pengandaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	544	497	47	91.36 %	
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis	Paket	3626	3315	311	91.42 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	dan HIV						
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3626	3315	311	91.42 %	
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3626	3315	311	91.42 %	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	8634	7534	1100	87.26 %	
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	241	221	20	91.70 %	
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:10000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	357	357	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	520	520	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	1241	1241	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	544	544	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	74	74	0	100.00 %	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	3626	3315	311	91.42 %	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					91.66 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	72.30 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	3626	3277	349	90.38 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.36 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96.79 %	
	1 . Formulir partograf	Formulir	3626	3277	349	90.38 %	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3626	3277	349	90.38 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3626	3277	349	90.38 %	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	81	81	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	357	357	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	520	520	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	1241	1241	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	544	544	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	74	74	0	100.00 %	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					90.84 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	71.86 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	3606	3239	367	89.82 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.98 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94.91 %	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	3606	3239	367	89.82 %	
	2 . Vitamin K1 Injeksi	Ampul	3606	3239	367	89.82 %	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	3606	3239	367	89.82 %	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	3606	3239	367	89.82 %	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	3606	3239	367	89.82 %	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3606	3239	367	89.82 %	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	3606	3239	367	89.82 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	354	354	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	520	520	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1241	1241	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	544	544	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	26	26	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	0	100.00 %	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	3355	3355	0	100.00 %	
4	Pelayanan Kesehatan Balita					96.56 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	77.08 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	16438	15838	600	96.35 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.48 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					97.41 %	
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	16438	15838	600	96.35 %	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	16438	15838	600	96.35 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	16438	15838	600	96.35 %	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	4213	3614	599	85.78 %	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	12225	12224	1	99.99 %	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	16438	15838	600	96.35 %	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	16438	15838	600	96.35 %	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	16438	15838	600	96.35 %	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	16438	15838	600	96.35 %	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	16438	15838	600	96.35 %	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	16438	15838	600	96.35 %	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	16438	15838	600	96.35 %	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	16438	15838	600	96.35 %	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	9	9	0	100.00 %	
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	240	240	0	100.00 %	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	335	335	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	520	520	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1241	1241	0	100.00 %	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	0	100.00 %	
	20 . Guru PAUD	Orang	150	150	0	100.00 %	
	21 . Kader kesehatan	Orang	3355	3355	0	100.00 %	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	39068	39068	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	39068	39068	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Poyandu remaja)	Form/Buku	1	1	0	100.00 %	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	39068	39068	0	100.00 %	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	217	217	0	100.00 %	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Poyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	1	1	0	100.00 %	
	6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 2 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok apotemyang ada di gang/korwasi kabupaten/kota)	Tablet	1253616	1253616	0	100.00 %	
	7 . Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ederajat)	Alat	78	78	0	100.00 %	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ederajat)	Strip	3223	3223	0	100.00 %	
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	9	9	0	100.00 %	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	12769	12769	0	100.00 %	
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	482	482	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	520	520	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1241	1241	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	544	544	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	63	63	0	100.00 %	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	217	217	0	100.00 %	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	3355	3355	0	100.00 %	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					93.89 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	74.15 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	194466	180244	14222	92.69 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)							
					-20%	19.75 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	-7	-8
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.73 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	36	36	0	100.00 %	
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	307	307	0	100.00 %	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	201	201	0	100.00 %	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	397	397	0	100.00 %	
	5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	78	78	0	100.00 %	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	123993	123993	0	100.00 %	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	9	9	0	100.00 %	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	1945	1617	328	83.14 %	
	9 . Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	55	55	0	100.00 %	
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	80430	80430	0	100.00 %	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	53	53	0	100.00 %	
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	30	30	0	100.00 %	
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	23	23	0	100.00 %	
	c. Vasektomi set	Unit	0	0	0	0.00 %	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	194466	180244	14222	92.69 %	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	404	404	0	100.00 %	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	335	335	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	520	520	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1241	1241	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	63	63	0	100.00 %	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3355	3355	0	100.00 %	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	37576	37576	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	307	307	0	100.00 %	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	307	307	0	100.00 %	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	307	307	0	100.00 %	
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	37576	37576	0	100.00 %	
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	37576	37576	0	100.00 %	
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	37576	37576	0	100.00 %	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2084	2084	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	335	335	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	520	520	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1241	1241	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	63	63	0	100.00 %	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3355	3355	0	100.00 %	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	23001	23001	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	18	18	0	100.00 %	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	23001	23001	0	100.00 %	
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	128	128	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	23001	23001	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	4005	4005	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	335	335	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	520	520	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1241	1241	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	26	26	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	544	544	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	63	63	0	100.00 %	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	10196	10196	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasilitas sesuai kebutuhan)	Paket	10196	10196	0	100.00 %	
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	178	178	0	100.00 %	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	10196	10196	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	10196	10196	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	27	27	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	335	335	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	520	520	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1241	1241	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	544	544	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	63	63	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	194	194	0	100.00 %	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	572	572	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	30	30	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	572	572	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	572	572	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	572	572	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	572	572	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	335	335	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	18	18	0	100.00 %	
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	45	45	0	100.00 %	
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	5	5	0	100.00 %	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	7428	7428	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	45	45	0	100.00 %	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	1	1	0	100.00 %	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	7428	7428	0	100.00 %	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	7428	7428	0	100.00 %	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	7428	7428	0	100.00 %	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	7427	7427	0	100.00 %	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	0	100.00 %	
	8 . Tuberkulin	Vial	50	50	0	100.00 %	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	364	364	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1241	1241	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	544	544	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	63	63	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	194	194	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	54	54	0	100.00 %	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	3355	3355	0	100.00 %	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	6628	6628	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9	9	0	100.00 %	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	6628	6628	0	100.00 %	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	6628	6628	0	100.00 %	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	6628	6628	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	364	364	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	520	520	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1241	1241	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	194	194	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	63	63	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	3355	3355	0	100.00 %	

Sumber: e-SPM 2025

4.2.5.1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil pada tahun 2025 mendapat capaian 91,88 % dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.

$$\frac{3.315}{3.626} \times 100\% = 91,42\%$$

Capaian layanan Kesehatan Ibu Hamil tahun 2025 capainnya adalah 91,42%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar 80% dikalikan 91,42% sehingga hasilnya 73,14%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- Vaksin Tetanus Difteri (Td) target tahun 2025 adalah 363 Ampul/Vial dan realisasi tahun 2025 adalah 332 Ampul/Vial dengan capaian 91.46 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tablet tambah darah target tahun 2025 adalah 652.680 Tablet dan realisasi tahun 2025 adalah 596.700 Tablet dengan capaian 91.42 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan target tahun 2025 adalah 3.626 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 3.315 Paket dengan capaian 91.42 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB target tahun 2025 adalah 3626 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 3315 Paket dengan capaian 91.42 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah target tahun 2025 adalah 3626 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 3315 Paket dengan capaian 91.42 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin target tahun 2025 adalah 544 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 497 Paket dengan capaian 91.36 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV target tahun 2025 adalah 3626 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 3315 Paket dengan capaian 91.42 % menurut aplikasi e-SPM.
- Kartu ibu/rekam medis ibu target tahun 2025 adalah 3626 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 3315 Paket dengan capaian 91.42 % menurut aplikasi e-SPM.
- Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) target tahun 2025 adalah 3626 Buku dan realisasi tahun 2025 adalah 3315 Buku dengan capaian 91.42 % menurut aplikasi e-SPM
- Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) target tahun 2025 adalah 8634 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 7534 Paket



dengan capaian 87.26 % menurut aplikasi e-SPM.

- Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG target tahun 2025 adalah 241 Bedol dan realisasi tahun 2025 adalah 241 Bedol dengan capaian 91.70 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi target tahun 2025 adalah 357 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 357 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Bidan target tahun 2025 adalah 520 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 520 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Perawat target tahun 2025 adalah 1241 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1241 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian target tahun 2025 adalah 544 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 544 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga gizi target tahun 2025 adalah 74 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 74 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) target tahun 2025 adalah 3626 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 3315 Orang dengan capaian 91.42 % menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 93,72%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Ibu Hamil adalah Sebesar 18,74% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Ibu Hamil adalah 73,14% ditambah 18,74% yaitu sebesar 91,88%.

4.2.5.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin pada tahun 2025 mendapat capaian 91,66 % dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.

$$\frac{3.277}{3.626} \times 100\% = 90,38\%$$

Capaian layanan Kesehatan Ibu Bersalin tahun 2025 capainnya adalah 90,38%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 80% dikalikan 90,38% sehingga hasilnya 72,30%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- Formulir partograf target tahun 2025 adalah 3626 Formulir dan realisasi tahun 2025 adalah 3277 Formulir dengan capaian 90.38 % menurut aplikasi e-SPM.
- Kartu ibu/rekam medis ibu target tahun 2025 adalah 3626 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 3277 Paket dengan capaian 90.38 % menurut aplikasi e-SPM.



- Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) target tahun 2025 adalah 3626 Buku dan realisasi tahun 2025 adalah 3277 Buku dengan capaian 90.38 % menurut aplikasi e-SPM.
- Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) target tahun 2025 adalah 81 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 81 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi target tahun 2025 adalah 357 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 357 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM
- Tenaga kesehatan : Bidan target tahun 2025 adalah 520 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 520 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Perawat target tahun 2025 adalah 1241 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1241 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian target tahun 2025 adalah 544 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 544 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga gizi target tahun 2025 adalah 74 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 74 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 96,79%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah Sebesar 19,36% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah 72,30% ditambah 19,36% yaitu sebesar 91,66%

4.2.5.3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir pada tahun 2025 mendapat capaian 90,84 % dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

$$\frac{3.239}{3.605} \times 100\% = 89,82\%$$

Capaian layanan Kesehatan Bayi Baru Lahir tahun 2025 capainnya adalah 89,82%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 80% dikalikan 89,82% sehingga hasilnya 71,86%.

- b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe) target tahun 2025 adalah 3606 Vaksin dan realisasi tahun 2025 adalah 3239 Vaksin dengan capaian 89.82 % menurut aplikasi e-SPM.
- Vitamin K1 Injeksi target tahun 2025 adalah 3606 Ampul dan realisasi tahun 2025 adalah 3239 Ampul dengan capaian 89.82 % menurut aplikasi e-SPM.
- Salep/tetes mata antibiotik target tahun 2025 adalah 3606 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 3239 Orang dengan capaian 89.82 % menurut aplikasi e-SPM.
- Formulir bayi baru lahir target tahun 2025 adalah 3606 Formulir dan realisasi tahun 2025 adalah 3239 Formulir dengan capaian 89.82 %



menurut aplikasi e-SPM.

- Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) target tahun 2025 adalah 3606 Formulir dan realisasi tahun 2025 adalah 3239 Formulir dengan capaian 89,82 % menurut aplikasi e-SPM.
- Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) target tahun 2025 adalah 3606 Buku dan realisasi tahun 2025 adalah 3239 Buku dengan capaian 89,82 % menurut aplikasi e-SPM.
- Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) target tahun 2025 adalah 3606 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 3239 Paket dengan capaian 89,82 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak target tahun 2025 adalah 354 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 354 Orang dengan capaian 100,00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Bidan target tahun 2025 adalah 520 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 520 Orang dengan capaian 100,00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Perawat target tahun 2025 adalah 1241 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1241 Orang dengan capaian 100,00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian target tahun 2025 adalah 544 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 544 Orang dengan capaian 100,00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku target tahun 2025 adalah 26 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 26 Orang dengan capaian 100,00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi target tahun 2025 adalah 74 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 74 Orang dengan capaian 100,00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Kader Kesehatan target tahun 2025 adalah 3355 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 3355 Orang dengan capaian 100,00 % menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 94,91%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah sebesar 18,98% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah 71,86% ditambah 18,98% yaitu sebesar 90,84%

4.2.5.4 Pelayanan Kesehatan Balita

Indikator Pelayanan Kesehatan Balita pada tahun 2025 mendapat capaian 90,84 % dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Pelayanan Kesehatan Balita.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Balita}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Balita}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Kesehatan Balita.

$$\frac{15.838}{16.438} \times 100\% = 96,35\%$$

Capaian layanan Kesehatan Balita tahun 2025 capainnya adalah 96,35%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 80% dikalikan 96,35% sehingga hasilnya 77,08%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Balita

- Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku target tahun 2025 adalah 16438 Formulir dan realisasi



tahun 2025 adalah 15838 Formulir dengan capaian 96.35 % menurut aplikasi e-SPM.

- Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) target tahun 2025 adalah 16438 Formulir dan realisasi tahun 2025 adalah 15838 Formulir dengan capaian 96.35 % menurut aplikasi e-SPM.
- Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) target tahun 2025 adalah 16438 Buku dan realisasi tahun 2025 adalah 15838 Buku dengan capaian 96.35 % menurut aplikasi e-SPM.
- Vitamin A Biru target tahun 2025 adalah 4213 Kapsul dan realisasi tahun 2025 adalah 3614 Kapsul dengan capaian 85.78 % menurut aplikasi e-SPM.
- Vitamin A Merah target tahun 2025 adalah 12225 Kapsul dan realisasi tahun 2025 adalah 12224 Kapsul dengan capaian 99.99 % menurut aplikasi e-SPM.
- Vaksin imunisasi dasar: BCG target tahun 2025 adalah 16438 Vaksin dan realisasi tahun 2025 adalah 15838 Vaksin dengan capaian 96.35 % menurut aplikasi e-SPM.
- Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes target tahun 2025 adalah 16438 Vaksin dan realisasi tahun 2025 adalah 15838 Vaksin dengan capaian 96.35 % menurut aplikasi e-SPM.
- Vaksin imunisasi dasar: IPV target tahun 2025 adalah 16438 Vaksin dan realisasi tahun 2025 adalah 15838 Vaksin dengan capaian 96.35 % menurut aplikasi e-SPM.
- Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib target tahun 2025 adalah 16438 Vaksin dan realisasi tahun 2025 adalah 15838 Vaksin dengan capaian 96.35 % menurut aplikasi e-SPM.
- Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella target tahun 2025 adalah 16438 Vaksin dan realisasi tahun 2025 adalah 15838 Vaksin dengan capaian 96.35 % menurut aplikasi e-SPM.
- Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib target tahun 2025 adalah 16438 Vaksin dan realisasi tahun 2025 adalah 15838 Vaksin dengan capaian 96.35 % menurut aplikasi e-SPM.
- Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella target tahun 2025 adalah 16438 Vaksin dan realisasi tahun 2025 adalah 15838 Vaksin dengan capaian 96.35 % menurut aplikasi e-SPM.
- Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) target tahun 2025 adalah 16438 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 15838 Unit dengan capaian 96.35 % menurut aplikasi e-SPM.
- Peralatan Anafilaktik target tahun 2025 adalah 9 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 9 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Formula terapi gizi buruk target tahun 2025 adalah 240 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 240 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga medis : Dokter target tahun 2025 adalah 335 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 335 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Bidan target tahun 2025 adalah 520 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 520 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Perawat target tahun 2025 adalah 1241 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1241 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi target tahun 2025 adalah 74 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 74 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.



- Guru PAUD target tahun 2025 adalah 150 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 150 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Kader kesehatan target tahun 2025 adalah 3355 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 3355 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 97,41%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Kesehatan Balita adalah Sebesar 19,48% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Balita adalah 77,08% ditambah 19,48% yaitu sebesar 96,56%.

4.2.5.5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar pada tahun 2025 mendapat capaian 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Pada Usia Pendidikan Dasar}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Pada Usia Pendidikan Dasar}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar.

$$\frac{39.068}{39.068} \times 100\% = 100\%$$

Capaian layanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar tahun 2025 capainnya adalah 100%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

- b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

- Form pencatatan/buku rapor kesehatanku target tahun 2025 adalah 39068 Form/Buku dan realisasi tahun 2025 adalah 39068 Form/Buku dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan target tahun 2025 adalah 1 Form/Buku dan realisasi tahun 2025 adalah 1 Form/Buku dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Kuesioner skrining kesehatan target tahun 2025 adalah 39068 Dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 39068 Dokumen dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah target tahun 2025 adalah 217 Formulir dan realisasi tahun 2025 adalah 217 Formulir dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah target tahun 2025 adalah 1 Formulir dan realisasi tahun 2025 adalah 1 Formulir dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah target tahun 2025 adalah 1253616 Tablet dan realisasi tahun 2025 adalah 1253616 Tablet dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat pemeriksaan Hb target tahun 2025 adalah 78 Alat dan realisasi tahun 2025 adalah 78 Alat dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 target tahun 2025 adalah 3223 Strip dan realisasi tahun 2025 adalah 3223 Strip dengan capaian 100.00 %



- menurut aplikasi e-SPM.
- Media promosi kesehatan target tahun 2025 adalah 9 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 9 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) target tahun 2025 adalah 12769 Vaksin dan realisasi tahun 2025 adalah 12769 Vaksin dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi target tahun 2025 adalah 482 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 482 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga kesehatan : Bidan target tahun 2025 adalah 520 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 520 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga kesehatan : Perawat target tahun 2025 adalah 1241 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1241 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi target tahun 2025 adalah 74 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 74 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian target tahun 2025 adalah 544 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 544 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat target tahun 2025 adalah 63 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 63 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru target tahun 2025 adalah 217 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 217 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor target tahun 2025 adalah 3355 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 3355 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 100%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah Sebesar 20% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah 80% ditambah 20% yaitu sebesar 100%.

4.2.5.6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif pada tahun 2025 mendapat capaian 93,89% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Balita}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Balita}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.

$$\frac{180.244}{194.466} \times 100\% = 92,69\%$$

Capaian layanan Kesehatan Pada Usia Produktif tahun 2025 capainnya adalah 92,69%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebesar 80% dikalikan 92,69% sehingga hasilnya



b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

- Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) target tahun 2025 adalah 36 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 36 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA) target tahun 2025 adalah 307 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 307 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat : Tensimeter target tahun 2025 adalah 201 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 201 Unit dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat : Glukometer target tahun 2025 adalah 397 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 397 Unit dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat : Alat pemeriksa Hb target tahun 2025 adalah 78 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 78 Unit dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol target tahun 2025 adalah 123993 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 123993 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat : KIT IVA Tes target tahun 2025 adalah 9 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 9 Unit dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Strip dan Reagen pemeriksaan Hb target tahun 2025 adalah 1945 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 1617 Unit dengan capaian 83.14 % menurut aplikasi e-SPM.
- Kit Ophthalmologi komunitas target tahun 2025 adalah 55 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 55 Unit dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Kuesioner PUMA target tahun 2025 adalah 80430 Dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 80430 Dokumen dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat Pelayanan KB target tahun 2025 adalah 53 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 53 Unit dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) target tahun 2025 adalah 30 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 30 Unit dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM
- b. Set pemasangan dan pencabutan Implan target tahun 2025 adalah 23 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 23 Unit dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- c. Vasektomi set target tahun 2025 adalah 0 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 0 Unit dengan capaian 0.00 % menurut aplikasi e-SPM
- Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) target tahun 2025 adalah 194466 Dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 180244 Dokumen dengan capaian 92.69 % menurut aplikasi e-SPM.
- Vaksin Tetanus Difteri (Td) target tahun 2025 adalah 404 Ampul/Vial dan realisasi tahun 2025 adalah 404 Ampul/Vial dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga medis : Dokter target tahun 2025 adalah 335 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 335 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Bidan target tahun 2025 adalah 520 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 520 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.



- Tenaga kesehatan : Perawat target tahun 2025 adalah 1241 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1241 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi target tahun 2025 adalah 74 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 74 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat target tahun 2025 adalah 63 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 63 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu target tahun 2025 adalah 3355 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 3355 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 98,73%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah Sebesar 19,75% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah 74,15% ditambah 19,75% yaitu sebesar 93,90%.

1.1.11.2

4.2.5.7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut pada tahun 2025 mendapat capaian 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Balita}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Balita}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut.

$$\frac{37.576}{37.576} \times 100\% = 100\%$$

Capaian layanan Kesehatan Pada Usia Lanjut tahun 2025 capainnya adalah 100%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

- Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter target tahun 2025 adalah 307 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 307 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Glukometer/alat pemeriksaan gula darah target tahun 2025 adalah 307 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 307 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Alat pemeriksaan kolesterol target tahun 2025 adalah 307 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 307 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol target tahun 2025 adalah 37576 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 37576 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel) target tahun 2025 adalah 37576 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 37576 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya target tahun 2025 adalah 37576 Buku dan realisasi tahun 2025 adalah 37576 Buku dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.



- Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) target tahun 2025 adalah 2084 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 2084 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga medis : Dokter target tahun 2025 adalah 335 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 335 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Bidan target tahun 2025 adalah 520 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 520 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Perawat target tahun 2025 adalah 1241 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1241 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi target tahun 2025 adalah 74 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 74 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat target tahun 2025 adalah 63 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 63 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu target tahun 2025 adalah 3355 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 3355 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.

Indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 100%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah Sebesar 20% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah 80% ditambah 20% yaitu sebesar 100%.

1.1.11.3

4.2.5.8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi pada tahun 2025 mendapat capaian 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.

$$\frac{23.001}{23.001} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tahun 2025 capainnya adalah 100%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

- Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) target tahun 2025 adalah 18 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 18 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Obat Hipertensi target tahun 2025 adalah 23001 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 23001 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tensimeter target tahun 2025 adalah 128 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 128 Unit dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.



- Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku) target tahun 2025 adalah 23001 Dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 23001 Dokumen dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) target tahun 2025 adalah 4005 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 4005 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga medis : Dokter target tahun 2025 adalah 335 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 335 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Bidan target tahun 2025 adalah 520 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 520 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Perawat target tahun 2025 adalah 1241 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1241 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi target tahun 2025 adalah 74 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 74 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku target tahun 2025 adalah 26 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 26 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian target tahun 2025 adalah 544 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 544 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat target tahun 2025 adalah 63 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 63 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.

1.1.11.4 Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 100%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah Sebesar 20% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah 80% ditambah 20% yaitu sebesar 100%.

1.1.11.5

4.2.5.9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus pada tahun 2025 mendapat capaian 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.

$$\frac{10.196}{10.196} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus tahun 2025 capainnya adalah 100%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

- b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

- Obat Diabetes Melitus target tahun 2025 adalah 10196 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 10196 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.



- Fotometer atau Glukometer target tahun 2025 adalah 178 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 178 Unit dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet target tahun 2025 adalah 10196 Unit dan realisasi tahun 2025 adalah 10196 Unit dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) target tahun 2025 adalah 10196 Formulir dan realisasi tahun 2025 adalah 10196 Formulir dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) target tahun 2025 adalah 27 Pedoman dan realisasi tahun 2025 adalah 27 Pedoman dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga medis : Dokter target tahun 2025 adalah 335 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 335 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Bidan target tahun 2025 adalah 520 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 520 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Perawat target tahun 2025 adalah 1241 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1241 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian target tahun 2025 adalah 544 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 544 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat target tahun 2025 adalah 63 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 63 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi target tahun 2025 adalah 74 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 74 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) target tahun 2025 adalah 194 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 194 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.

1.1.11.6 *Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 100%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah Sebesar 20% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah 80% ditambah 20% yaitu sebesar 100%.*

1.1.11.7

4.2.5.10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus pada tahun 2025 mendapat capaian 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.

$$\frac{572}{572} \times 100\% = 100\%$$



Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tahun 2025 capainnya adalah 100%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima

layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

- Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) target tahun 2025 adalah 30 Buku dan realisasi tahun 2025 adalah 30 Buku dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan Psikofarmaka target tahun 2025 adalah 572 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 572 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi target tahun 2025 adalah 572 Formulir dan realisasi tahun 2025 adalah 572 Formulir dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan target tahun 2025 adalah 572 Formulir dan realisasi tahun 2025 adalah 572 Formulir dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) target tahun 2025 adalah 572 Media dan realisasi tahun 2025 adalah 572 Media dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga medis : Dokter target tahun 2025 adalah 335 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 335 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa target tahun 2025 adalah 18 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 18 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga profesional lainnya target tahun 2025 adalah 45 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 45 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa target tahun 2025 adalah 5 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 5 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.

1.1.11.8 Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 100%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20%

sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah Sebesar 20% sehingga capaian

SPM untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah 80% ditambah 20% yaitu sebesar 100%.

1.1.11.9

4.2.5.11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus pada tahun 2025 mendapat capaian 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.

$$\frac{7.428}{7.428} \times 100\% = 100\%$$



Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis tahun 2025 capainya adalah 100%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

- Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) target tahun 2025 adalah 45 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 45 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Reagen Zn TB target tahun 2025 adalah 1 Kit dan realisasi tahun 2025 adalah 1 Kit dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Masker bedah dan Masker N95 target tahun 2025 adalah 7428 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 7428 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering target tahun 2025 adalah 7428 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 7428 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Katrid tes cepat molekuler target tahun 2025 adalah 7428 Tes dan realisasi tahun 2025 adalah 7428 Tes dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Formulir pencatatan dan pelaporan target tahun 2025 adalah 7427 Dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 7427 Dokumen dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) target tahun 2025 adalah 1 Dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 1 Dokumen dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tuberkulin target tahun 2025 adalah 50 Vial dan realisasi tahun 2025 adalah 50 Vial dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru target tahun 2025 adalah 364 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 364 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Perawat target tahun 2025 adalah 1241 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1241 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian target tahun 2025 adalah 544 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 544 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat target tahun 2025 adalah 63 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 63 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) target tahun 2025 adalah 194 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 194 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tenaga kesehatan : Radiografer target tahun 2025 adalah 54 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 54 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Kader Kesehatan target tahun 2025 adalah 3355 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 3355 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.

I.1.11.10 *Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 100%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah Sebesar 20% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah 80% ditambah 20% yaitu sebesar 100%.*

I.1.11.11

4.2.5.12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human



Immunodeficiency Virus (HIV)

Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus pada tahun 2025 mendapat capaian 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus (HIV).

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus (HIV))}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus (HIV))}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus (HIV).

$$\frac{6.628}{6.628} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus (HIV) tahun 2025 capainnya adalah 100%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus (HIV) sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

- b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus (HIV)
- Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) target tahun 2025 adalah 9 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 9 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama target tahun 2025 adalah 6628 Tes dan realisasi tahun 2025 adalah 6628 Tes dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai target tahun 2025 adalah 6628 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 6628 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK target tahun 2025 adalah 6628 Paket dan realisasi tahun 2025 adalah 6628 Paket dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin target tahun 2025 adalah 364 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 364 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga kesehatan : Bidan target tahun 2025 adalah 520 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 520 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga kesehatan : Perawat target tahun 2025 adalah 1241 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1241 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) target tahun 2025 adalah 194 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 194 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat target tahun 2025 adalah 63 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 63 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.



- Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi sebagai pendamping dan penjangkauan target tahun 2025 adalah 3355 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 3355 Orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SIP

1.1.11.12 Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 100%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah Sebesar 20% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah 80% ditambah 20% yaitu sebesar 100%.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

1.1.11.13 Permasalahan

1. Masih digunakan data proyeksi kemenkes untuk indikator usia produktif, hipertensi, diabetes melitus dan ODGJ sehingga hasil capaian belum maksimal
2. Terdapat target penerima layanan yang berdomisili di luar kota Kediri sehingga capaian pelayanan tidak maksimal.
3. Pengaruh capaian KB aktif (Akseptor yang terus menerus memakai kontrasepsi sampai sekarang) yang cukup tinggi pada tahun 2025 dimana sasaran harusnya hamil kedua / hamil berikutnya masih ikut KB secara aktif, sehingga menurunkan sasaran penduduk hamil.
4. Tingginya mobilitas Ibu hamil penduduk yang ber KTP Kota Kediri berdomisili di luar Wilayah yang awalnya melakukan ANC di Kota pindah tempat periksa ke luar wilayah atau pindah domisili sehingga cakupan K6 tidak tercapai.
5. Adanya kasus Abortus/gagal hamil dan kelahiran prematur sehingga belum mencapai kriteria K6 Ibu hamil

Solusi

Dari permasalahan yang ada bisa ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya pendataan dari level paling bawah dalam hal ini pendataan untuk setiap indikator disetiap kelurahan yang ada sangat membantu dalam menentukan penerapan SPM yang ada di kota Kediri. Dalam hal capaian yang kurang maksimal Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi untuk perubahan target pada setiap tahun maksimal pada triwulan ke tiga.

4.3 URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang

Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Tahun 2025
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Tahun 2025

4.3.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2025 sebesar Rp. 11.812.124.686 (Sebelas milyar delapan ratus dua belas juta seratus dua puluh empat enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA KEDIRI	1,819,197,816,097
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	101,407,038,860
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	11,812,124,686
	APBD	11,812,124,686
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	7,130,499,686
	C. APBD DAK FISIK	4,681,625,000
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: e-SPM 2025

4.3.4 Hasil Capaian

Hasil Capaian Penerapan SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum pada Tahun 2025 adalah 90,30 % (tuntas utama) dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			90.30 %	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					81.10 %	
			Rekap Target (Harus	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			Dilayani)				
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	0	0	0	0.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	63.20 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3696	2920	776	79.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				20%	17.90 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					89.50%	
	JARINGAN PERPIPAAN					79.00%	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	924	730	194	79.00%	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	924	730	194	79.00 %	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					100.00%	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	0	100.00%	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	0	100.00%	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					99.49 %	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN	Orang	0	0	0	0.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)						
	<i>*tidak masuk dalam hitungan</i>						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	79.59 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1560	1552	8	99.49 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					-20%	19.90 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.49 %	
	KUANTITAS SPALD					99.49 %	
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	390	388	2	99.49 %	
	KUALITAS SPALD					99.49 %	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)							
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0	100.00%	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua							
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	390	388	2	99.49 %	
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	0	100.00%	

4.3.4.1 Pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Sumber: e-SPM 2025

Indikator Pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2025 mendapat capaian 81,10% dengan perhitungan sebagai berikut:



a. Penghitungan Pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

$$\frac{2.920}{3.696} \times 100\% = 79,00\%$$

Capaian Pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tahun 2025 capainnya adalah 79,00%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 80% dikalikan 79,00% sehingga hasilnya 63,20%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Jaringan Perpipaan

Kuantitas SPAM

- Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon) target tahun 2025 adalah 924 Rumah Tangga dan realisasi tahun 2025 adalah 730 Rumah Tangga dengan capaian 79.00 % menurut aplikasi e-SPM.

Kualitas SPAM

- Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023) target tahun 2025 adalah 924 Rumah Tangga dan realisasi tahun 2025 adalah 730 Rumah Tangga dengan capaian 79.00 % menurut aplikasi e-SPM.

Bukan Jaringan Perpipaan

Kuantitas SPAM

- Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon) OPD teknis pengampu tidak memiliki data, sehingga tidak ada yang ditampilkan sehingga OPD memilih untuk menutup mutu ini sehingga capaian untuk mutu ini 100%.

Kualitas SPAM

- Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. OPD teknis pengampu tidak memiliki data, sehingga tidak ada yang ditampilkan sehingga OPD memilih untuk menutup mutu ini sehingga capaian untuk mutu ini 100%.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 89,50%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah Sebesar 17,90% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah 63,20% ditambah 17,90% yaitu sebesar 81,10%.



4.3.4.2 Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Indikator Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2025 mendapat capaian 81,10% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

$$\frac{1.552}{1.560} \times 100\% = 99,49\%$$

Capaian Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tahun 2025 capainnya adalah 99,49%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar 80% dikalikan 99,49% sehingga hasilnya 79,59%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

KUANTITAS SPALD

- Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik target tahun 2025 adalah 390 Rumah Tangga dan realisasi tahun 2025 adalah 388 Rumah Tangga dengan capaian 99.49 % menurut aplikasi e-SPM.

KUALITAS SPALD

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

- Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota OPD teknis pengampu tidak memiliki data, sehingga tidak ada yang ditampilkan sehingga OPD memilih untuk menutup mutu ini sehingga capaian untuk mutu ini 100%

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

- Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota target tahun 2025 adalah 390 Rumah Tangga dan realisasi tahun 2025 adalah 388 Rumah Tangga dengan capaian 99.49 % menurut aplikasi e-SPM
- Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar, OPD teknis pengampu tidak memiliki data, sehingga tidak ada yang ditampilkan sehingga OPD memilih untuk menutup mutu ini sehingga capaian untuk mutu ini 100%.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 99,49%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah Sebesar 19,90% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah 79,59% ditambah 19,90% yaitu sebesar 99,49%.



Kendala dan Permasalahan

- a. Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri dilaksanakan oleh PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga Dinas PUPR memerlukan koodinasi dengan instansi PDAM, karena saat ini anggaran yang ada di PDAM belum masuk ke dalam pelaporan SPM.
- b. Adanya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum, terutama terkait lokasi dan lahan yang dapat disetujui untuk pelaksaasn kegiatan IPAL komunal di Lingkungan Permukiman yang sudah direncanakan.
- C. Belum adanya komitmen dari pemangku kebijakan terkait penganggaran SPM, sehingga anggaran untuk pemenuhan pelayanan SPM kurang maksimal.
- d. Belum maksimal dalam penyusunan 4 tahapan penerapan SPM karena terkendala anggaran dan data yang diperlukan.

Solusi

- a. Perlu ada koordinasi yang intensif dengan PDAM sehingga data yang dibutuhkan bisa di penuhi.
- b. Sosialisasi lebih intensif tentang IPAL komunal, sehingga masyarakat memahami kelebihan dan manfaat IPAL komunal dibandingkan dengan saptic tank konvesional.
- c. Perlu koordinasi dengan BAPPEDA sebagai pengusul penyediaan anggaran untuk pemenuhan pelaksanaan SPM
- d. Perlu melibatkan pihak-pihak di level paling bawah dalam hal ini kelurahan untuk pememnuhan data yang dibutuhkan.

4.4 URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

I.1.12

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab/Kota dengan ketentuan :
 - Pada saat masa pasca bencana
 - Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota
 - Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota
 - Definisi Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam rangka mendukung:
 - Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha
 - Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada dilahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat



menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET),

Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

4.4.2 Target Pencapaian SPM Kota Kediri

I.1.12.1 O	I.1.12.2 JENIS PELAYANAN DASAR	I.1.12.3 ILAI	I.1.12.4 INDIKATOR	I.1.12.5 BATAS WAKTU PENCAPAIAN
I.1.12.6	I.1.12.7 Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	I.1.12.8 00%	I.1.12.9 Prosentase realisasi Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	I.1.12.10 Tahun 2025
I.1.12.11	I.1.12.12 Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	I.1.12.13 00%	I.1.12.14 Prosentase realisasi Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	I.1.12.15 Tahun 2025

I.1.12.16

4.4.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2025

secara spesifik pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Kediri Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) berikut tabel

anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2025 secara spesifik pada Rencana Kerja

Dinas Perumahan Rakyat Kota Kediri

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA KEDIRI	1,819,197,816,097
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	25,358,957,730
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	100,000,000
	APBD	100,000,000
	A. APBD MURNI	100,000,000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: R-SPM 2025

4.4.4 Hasil Capaian

Hasil Capaian Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2025 adalah 100 % (tuntas paripurna) dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	



1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi; c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.						
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)							
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				-100%	100.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %	
	1.PENDATAAN					100.00 %	
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG					100%	



	LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA						
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%	
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA					100%	
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)					100%	
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100%	
	2.PERHITUNGAN					100.00 %	
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%	

	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :					100%	
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100%	
	3.PERENCANAAN					100.00 %	
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%	
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :					100%	
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %	
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi : a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)						
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah							



Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				-100%	100.00 %	
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %	
1.PENDATAAN					100.00 %	
FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100%	
FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100%	

FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA						100%	
FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)						100%	
FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA						100%	
2.PERHITUNGAN						100.00 %	
FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA						100%	
FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :						100%	
FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :						100%	
FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN						100%	



	RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA						
	3.PERENCANAAN					100.00 %	
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100%	
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :					100%	

Sumber: e-SPM 2025

4.4.4.1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota

a. Perhitungan Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota

$$\frac{\text{Jumlah Warga penerima layanan Penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana}}{\text{Jumlah Target Warga penerima layanan Penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana}} \times 100\%$$

b. Realisasi Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota

Capaian penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota di Kota Kediri adalah 100%. Pada tahun 2025 dikota Kediri tidak terjadi bencana, maka pada aplikasi eSPM organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pengampu harus mengupload 4 tahapan pelaksanaan SPM pada aplikasi eSPM. Sehingga capaian untuk indikator Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota adalah 100%

4.4.4.2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota

a. Penghitungan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota

1.1.12.17
$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Layanan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah}}{\text{Jumlah target Warga Penerima layanan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah}} \times 100\%$$

b. Realisasi Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota di Kota Kediri adalah 100%. Pada tahun 2025 dikota Kediri tidak ada relokasi yang dilakukan, maka pada aplikasi eSPM organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pengampu harus mengupload 4 tahapan pelaksanaan SPM pada aplikasi eSPM. Sehingga capaian untuk indikator Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 100%.



Kendala dan Permasalahan

4 tahapan pelaksanaan SPM belum maksimal dikarenakan anggaran data yang belum tersedia.

1.1.12.18 Upaya Solusi yang dilakukan, sebagai berikut :

Perlu adanya komitmen dari OPD teknis pengampu untuk melakukan 4 tahapan pelaksanaan SPM sehingga perbaikan data dan realisasi anggaran bisa di laksanakan.

4.5 URUSAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.1.13

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar.

- a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan indikator kegiatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota
- b. Sub Urusan Kebencanaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Pelayanan informasi rawan bencana
 - 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- c. Sub Urusan Pemadam Kebakaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)..

4.5.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

No	Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100 %	2025
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten/Kota yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	2025
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten/Kota yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2025
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2025
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	2025

4.5.3 Alokasi Anggaran



Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2025 sebesar Rp. 7.300.252.256 (*tujuh milyar tiga ratus juta dua ratus lima puluh dua ribu duaratus lima puluh enam rupiah*). Berikut tabel anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2025.

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA KEDIRI	1,819,197,816,097
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	19,930,737,806
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	7,300,252,256
	APBD	7,250,252,256
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	5,199,331,256
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	2,050,921,000
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	50,000,000

Sumber: e-SPM 2025

Alokasi anggaran untuk sub urusan trantibum sebesar 5.868.942.500 (*lima milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai OPD teknis pengampu untuk Sub Urusan Trantibum. Alokasi anggaran untuk Sub Urusan Kebencanaan sebesar 766.364.650 (*tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagai OPD teknis pengampu untuk Sub Urusan Kebencanaan. Alokasi anggaran untuk Sub Urusan Pemadam Kebakaran (DAMKAR) sebesar 664.945.106 (*enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus enam rupiah*). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai OPD teknis pengampu untuk Sub Urusan DAMKAR.

4.5.4 Hasil Capaian

Hasil Capaian Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2025 adalah 97,56 % (tuntas utama) dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						96.15 %	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					96.15 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total	AKSI
						Pencapaian	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	192	192	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	16.15 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					80.77 %	
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	26	22	4	84.62 %	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	11	11	0	100.00 %	
	Data Dukung : 3571-20251013085955SOP SATPOL PER 2023 SDH TTD (2)_removed.pdf Status : Approved Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	46	46	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total	AKSI
						Pencapaian	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	0	1	0.00 %	
Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.							
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	100.00 %	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	100.00 %	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						96.83 %	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					94.73 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3550	3550	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	14.73 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					73.64 %	
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	50.00 %	
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	0	0	0	0.00 %	
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	97.28 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total	AKSI
						Pencapaian	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					91.85 %	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	1	1	0	100.00 %	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	46	31	15	67.39 %	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %	
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	5	5	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00 %	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00 %	
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					95.75 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	550	550	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					-20%	15.75 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total	AKSI
						Pencapaian	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					78.75 %	
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	50.00 %	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	0	0	0	0.00 %	
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	100.00 %	
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	90.00 %	
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %	
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					80.00 %	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0.00 %	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12	0	100.00 %	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %	
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %	
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total	AKSI
						Pencapaian	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %	
	2) . Gladi Lapangan *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %	
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	82.50 %	
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					80.00 %	
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	4	4	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	0	0	0	0.00 %	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00 %	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	0	100.00 %	
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	100.00 %	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	100.00 %	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	100.00 %	
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					50.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total	AKSI
						Pencapaian	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	50.00 %	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00 %	
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	10	10	0	100.00 %	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				-100%	100.00 %	
Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%		
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %	
	1.PENDATAAN					100.00 %	
	FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total	AKSI
						Pencapaian	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KERAWANAN DESA						
	FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA (Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	2.PERHITUNGAN					100.00 %	
	FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Kadaan Darurat)					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	3.PERENCANAAN					100 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total	AKSI
						Pencapaian	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
	FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA					100%	DOWNLOAD UPLOAD KEMBALI
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						99.71%	
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					99.71 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	488	684	-196	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					-20%	19.71 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.55 %	
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	42	56	-14	100.00 %	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	3	3	0	100.00 %	
Data Dukung : 3571-202510100852463571-20250414102813SOP SATPOL PER 2023 SDH TTD (1)_removed.pdf Status : Approved Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.							
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	6	6	0	100.00 %	
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	23	21	2	91.30 %	
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	2	0	2	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total	AKSI
						Pencapaian	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	42	67	-25	100.00 %	

Sumber: e-SPM 2025

4.5.4.1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) (Satpol PP)

Indikator Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) pada tahun 2025 mendapat capaian 96,15% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM).

$$\frac{\text{Jumlah Warga Pelayanan Warga Negara yang memperoleh Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum}}{\text{Jumlah Target Warga Pelayanan Warga Negara yang memperoleh Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM).

$$\frac{192}{192} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) tahun 2025 capainnya adalah 100%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)

- Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP target tahun 2025 adalah 26 unit dan realisasi tahun 2025 adalah 22 unit dengan capaian 84.62 % menurut aplikasi e-SPM.
- Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 target tahun 2025 adalah 11 dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 11 dokumen dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** target tahun 2025 adalah 46 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 46 orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material target tahun 2025 adalah 1 dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 0 dokumen dengan capaian 0.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil target tahun 2025 adalah 0 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 0 orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM karena OPD teknis menutup mutu ini sehingga hasilnya 100%.



- Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan target tahun 2025 adalah 0 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 0 orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM karena OPD teknis menutup mutu ini sehingga hasilnya 100%..

1.1.13.1 Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 80,77%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) adalah Sebesar 16,15% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) adalah 80% ditambah 16,15% yaitu sebesar 96,15%.

1.1.13.2

4.5.4.2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)

Indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) pada tahun 2025 mendapat capaian 94,73% dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Penghitungan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN).

$$\frac{\text{Jumlah warga Penerima Pelayanan Informasi Bencana}}{\text{Target Jumlah Warga Penerima Pelayanan Informasi Bencana}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN).

$$\frac{3.550}{3.550} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) tahun 2025 capainnya adalah 100%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

- b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana tahun 2025 dengan capaian 50.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta target tahun 2025 adalah 1 dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 1 dokumen dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta target tahun 2025 adalah 0 dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 0 dokumen dengan capaian 0.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana tahun 2025 dengan capaian 97,28% menurut aplikasi e-SPM.
 - 1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana tahun 2025 dengan capaian 91,85 % menurut aplikasi e-SPM.
 - e. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta) target tahun 2025 adalah 1 eksemplar dan realisasi tahun 2025 adalah 1 eksemplar dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - f. Terlaksananya sosialisasi tatap muka target tahun 2025 adalah 46 desa dan realisasi tahun 2025 adalah 31 desa dengan capaian 67.39 % menurut aplikasi e-SPM.
 - g. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 12 orang dan realisasi tahun 2025



- adalah 12 orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- h. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 2 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 2 orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- 2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia target tahun 2025 adalah dan realisasi tahun 2025 adalah dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 5 media dan realisasi tahun 2025 adalah 5 media dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 1 buah dan realisasi tahun 2025 adalah 1 buah dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 2 unit dan realisasi tahun 2025 adalah 2 unit dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 4 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 4 orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 4 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 4 orang dengan capaian 100 % menurut aplikasi e-SPM.
- 3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik tahun 2025 dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan) tahun OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 73,64%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) adalah Sebesar 14,73% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) adalah 80% ditambah 14,73% yaitu sebesar 94,73%.

4.5.4.3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)

Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) pada tahun 2025 mendapat capaian 94,73% dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN).

$$\frac{\text{Jumlah warga penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana}}{\text{Jumlah Target warga penerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana}} \times 100\%$$



$$\frac{3.550}{3.550} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) tahun 2025 capainnya adalah 100%. Dalam perhitungan SPM capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2025 capaian 50.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - 1) Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara target tahun 2025 adalah 0 dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 0 dokumen dengan capaian 0.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - 2) Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara target tahun 2025 adalah 1 dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 1 dokumen dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM
- Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi target tahun 2025 adalah 0 dan realisasi tahun 2025 adalah 0 dengan capaian 90.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - 1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur tahun 2025 adalah dan realisasi tahun 2025 dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - 2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu target tahun 2025 adalah dan realisasi tahun 2025 adalah dengan capaian 80.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 2 paket dan realisasi tahun 2025 adalah 2 paket dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 2 paket dan realisasi tahun 2025 adalah 2



paket dengan capaian 100 % menurut aplikasi e-SPM.

- c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 0 buah dan realisasi tahun 2025 adalah 0 buah dengan capaian 0.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 12 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 12 orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 2 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 2 orang dengan capaian 100.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana target tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- 1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) tahun 2025 adalah capaian 100% menurut aplikasi e-SPM
 - a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 1 dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 1 dokumen dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 1 paket dan realisasi tahun 2025 adalah 1 paket dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 2 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 2 orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM
 - 2) Gladi Lapangan tahun 2025 dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 1 dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 1 dokumen dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 1 paket dan realisasi tahun 2025 adalah 1 paket dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 2 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 2 orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana target tahun 2025 adalah 0 dan realisasi tahun 2025 adalah 0 dengan capaian 82.50 % menurut aplikasi e-SPM.
- 1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana tahun 2025 dengan capaian 80.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun) target tahun 2025 adalah 365 hari dan realisasi tahun 2025 adalah 365 hari dengan capaian 100 % menurut aplikasi e-SPM.
 - b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 4 pertemuan dan realisasi tahun 2025 adalah 4 pertemuan dengan capaian 100 % menurut aplikasi e-SPM.
 - c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1) target tahun 2025 adalah 0 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 0 orang dengan capaian 0.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 1 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1 orang dengan capaian 100 % menurut aplikasi e-SPM.
 - e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 3 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 3 orang dengan capaian 100 % menurut aplikasi e-SPM.
 - 2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan tahun 2025 dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.



- a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan) tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- 3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast realisasi tahun 2025 dengan capaian 50.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 0 paket dan realisasi tahun 2025 adalah 0 paket dengan capaian 0.00 % menurut aplikasi e-SPM.
 - b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 1 paket dan realisasi tahun 2025 adalah 1 paket dengan capaian 100 % menurut aplikasi e-SPM.
- 4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat realisasi tahun 2025 dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM
- a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 1 paket dan realisasi tahun 2025 adalah 1 paket dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 1 paket dan realisasi tahun 2025 adalah 1 paket dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana realisasi tahun 2025 dengan capaian 50.00 % menurut aplikasi e-SPM
- Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 1 paket dan realisasi tahun 2025 adalah 1 paket dengan capaian 100 % menurut aplikasi e-SPM
- Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 0 paket dan realisasi tahun 2025 adalah 0 paket dengan capaian 0.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 0 paket dan realisasi tahun 2025 adalah 0 paket dengan capaian 0.00 % menurut aplikasi e-SPM.
- Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan) target tahun 2025 adalah 10 unit dan realisasi tahun 2025 adalah 10 unit dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 78,75%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) adalah Sebesar 15,75% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) adalah 80% ditambah 15,75% yaitu sebesar 95,75%.

4.5.4.4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)



Indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) pada tahun 2025 mendapat capaian 94,73% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN).

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN).

Capaian Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) di Kota Kediri adalah 100%. Pada tahun 2025 dikota Kediri tidak terjadi bencana, maka pada aplikasi eSPM organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pengampu harus mengupload 4 tahapan pelaksanaan SPM pada aplikasi eSPM. Sehingga capaian untuk indikator Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) adalah 100%

4.5.4.5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

Indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) pada tahun 2025 mendapat capaian 99,71% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR).

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran}} \times 100\%$$

Realisasi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR).

$$\frac{684}{488} \times 100\% = 140,16\%$$

Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) tahun 2025 capainnya adalah 140,16%. Dalam perhitungan SPM jika capaian melebihi 100% maka capaian dihitung sama dengan 100%. Capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

- Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi target tahun 2025 adalah 42 layanan dan realisasi tahun 2025 adalah 56 layanan dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi target tahun 2025 adalah 3 dokumen dan realisasi tahun 2025 adalah 3 dokumen dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran target tahun 2025 adalah 6 unit dan realisasi tahun 2025 adalah 6 unit dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia target tahun 2025 adalah 23 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 21 Orang dengan capaian 91.30 % menurut aplikasi e-SPM.



- Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran tahun 2025 OPD teknis pengampu menutup mutu ini sehingga capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran target tahun 2025 adalah 42 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 67 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 98,55%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) adalah Sebesar 19,71% sehingga capaian SPM untuk Indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) adalah 80% ditambah 19,71% yaitu sebesar 99,71%.

4.5.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Belum maksimalnya penerapan 4 tahapan pelaksanaan SPM karena kendala biaya dan keterbatasan sumber daya tenaga yang ada
2. Respon Time yang lebih lama untuk menjangkau wilayah Barat Kota karena terkendala pos pemadam kebakaran hanya ada di wilayah timur kota
3. Jumlah personil Damkar belum memenuhi kriteria sesuai Surat Kemendagri Nomor 800/2329/BAK tanggal 10 Mei 2022 Perihal Penghitungan Kebutuhan JF Damkar dan JF Analisis Kebakaran.
4. Belum adanya ketentuan terkait Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Solusi

1. Perlu komitmen dari OPD teknis pengampu untuk lebih memperhatikan penerapan 4 tahapan pelaksanaan SPM, selain dari itu perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan SPM lebih maksimal. Sebagai contoh untuk penelusuran data bisa melibatkan kelurahan sebagai penghimpun data yang valid dan untuk urusan anggaran bisa berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BPPKAD.
2. Perlu dibangun pos pemadam kebakaran tambahan agar respon time bisa dicapai sesuai peraturan
3. Perlu adanya pelatihan bagi personil untuk peningkatan kapasitas personil.
4. Diharapkan Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkadabisa direalisasikan tahun 2026 mendatang.

4.6 URUSAN BIDANG SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Pant
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pant
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia telantar di Luar Pant
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Pant
- e. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah



No	ayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Tahun 2025
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Tahun 2025
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Tahun 2025
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga negara/gelandangan dan pengeis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	Tahun 2025
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	Tahun 2025

4.6.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial pada Tahun 2025 sebesar Rp.

3.022.684.800 (tiga milyar dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai

berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA KEDIRI	1,819,197,816,097
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	26,937,183,272
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	3,022,684,800
	APBD	2,541,571,800
	A. APBD MURNI	645,571,800
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	1,896,000,000
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0



NO	PENDANAAN	PAGU
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	481,113,000

Sumber: e-SPM 2025

4.6.4 Hasil Capaian

Hasil Capaian Penerapan SPM Urusan Bidang Sosial pada Tahun 2025 adalah 100 % (tuntas Paripurna) dengan rincian sebagai berikut

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	371	371	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	108	108	00.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	30	30	00.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	140	140	00.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	109	109	00.00	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	120	120	00.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	12	12	00.00	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	12	12	00.00	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	6	6	00.00	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	120	120	00.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	6	6	00.00	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6	6	00.00	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	45	45	00.00	100.00 %	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	90	90	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	60	60	00.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	6	6	00.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	35	35	00.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	12	12	00.00	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	60	60	00.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	60	60	00.00	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	12	12	00.00	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	12	12	00.00	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	4	4	00.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6	6	00.00	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	6	6	00.00	100.00 %	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	581	581	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	10	10	00.00	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	12	12	00.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	581	581	00.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10	10	00.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	8	8	00.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	12	12	00.00	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	12	12	00.00	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	00.00	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	12	12	00.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	10	00.00	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	00.00	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	10	10	00.00	100.00 %	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	120	120	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	120	120	00.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	40	40	00.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	36	36	00.00	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	00.00	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	30	30	00.00	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	38	38	00.00	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	38	38	00.00	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	6	6	00.00	100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	30	30	00.00	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	18	18	00.00	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	12	12	00.00	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	18	18	00.00	100.00 %	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
Ya Terjadi Bencana							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	10	10	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	10	10	00.00	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	2	2	00.00	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	2	2	00.00	100.00 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1	1	00.00	100.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	4	4	00.00	100.00 %	

Sumber: e-SPM 2025

4.6.4.1 Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti pada tahun 2025 mendapat capaian 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.

Jumlah Warga Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti

Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti

× 100%

Realisasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.

371

371

× 100% = 100%

Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti tahun 2025 capainnya adalah 100%. Capaian penerima

layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas



Terlantar di Luar Panti sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

- Layanan data dan pengaduan target tahun 2025 adalah 108 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 108 Orang dengan capaian 100 % menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat target tahun 2025 adalah 30 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 30 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan permakanan target tahun 2025 adalah 140 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 140 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan sandang target tahun 2025 adalah 1 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan alat bantu target tahun 2025 adalah 109 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 109 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan perbekalan kesehatan target tahun 2025 adalah 120 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 120 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial target tahun 2025 adalah 12 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 12 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar target tahun 2025 adalah 12 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 12 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK target tahun 2025 adalah 6 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 6 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar target tahun 2025 adalah 120 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 120 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga target tahun 2025 adalah 6 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 6 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga target tahun 2025 adalah 6 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 6 Orang dengan capaian 100. % menurut aplikasi e-SPM.
- Layanan rujukan target tahun 2025 adalah 45 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 45 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 100%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti adalah Sebesar 100% sehingga capaian SPM untuk Indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti adalah 80% ditambah 20% yaitu sebesar 100%.

4.6.4.2 Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti

Indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti pada tahun 2025 mendapat capaian 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti.



Jumlah Warga Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar

Anak Terlantar di luar panti

Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar

Anak Terlantar di luar panti

× 100%

Realisasi Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti.

371

371

× 100% = 100%

Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti tahun 2025 capainnya adalah 100%. Capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti

- Layanan data dan pengaduan target tahun 2025 adalah 60 orang dan realisasi tahun 2025 adalah 60 orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat target tahun 2025 adalah 6 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 6 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan permakanan target tahun 2025 adalah 35 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 35 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan sandang target tahun 2025 adalah 1 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti target tahun 2025 adalah 12 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 12 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial target tahun 2025 adalah 60 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 60 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar target tahun 2025 adalah 60 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 60 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK target tahun 2025 adalah 12 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 12 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar target tahun 2025 adalah 12 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 12 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga target tahun 2025 adalah 4 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 4 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga target tahun 2025 adalah 6 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 6 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Layanan rujukan target tahun 2025 adalah 6 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 6 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 100%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti adalah Sebesar 100% sehingga capaian SPM untuk Indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti adalah 80% ditambah 20% yaitu sebesar 100%.



Indikator Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti pada tahun 2025 mendapat capaian 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghitungan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti}} \times 100\%$$

Realisasi Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.

$$\frac{581}{581} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti tahun 2025 capainnya adalah 100%. Capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

b. Mutu layanan untuk Indikator Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

- Layanan data dan pengaduan target tahun 2025 adalah 10 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 10 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat target tahun 2025 adalah 12 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 12 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan permakanan target tahun 2025 adalah 581 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 581 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan sandang target tahun 2025 adalah 10 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 10 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan alat bantu target tahun 2025 adalah 1 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Penyediaan perbekalan kesehatan target tahun 2025 adalah 8 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 8 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial target tahun 2025 adalah 12 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 12 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar target tahun 2025 adalah 12 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 12 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK target tahun 2025 adalah 10 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 10 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar target tahun 2025 adalah 12 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 12 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga target tahun 2025 adalah 10 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 10



- Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga target tahun 2025 adalah 10 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 10 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - Layanan rujukan target tahun 2025 adalah 10 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 10 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 100%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti adalah Sebesar 100% sehingga capaian SPM untuk Indikator Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti adalah 80% ditambah 20% yaitu sebesar 100%.

4.6.4.4 Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Indikator Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti pada tahun 2025 mendapat capaian 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti}}{\text{Jumlah Target Warga Penerima Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti}} \times 100\%$$

Realisasi Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

$$\frac{120}{120} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti tahun 2025 capainnya adalah 100%.

Capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

- b. Mutu layanan untuk Indikator Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- Layanan data dan pengaduan target tahun 2025 adalah 120 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 120 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat target tahun 2025 adalah 40 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 40 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - Penyediaan permakanan target tahun 2025 adalah 36 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 36 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - Penyediaan sandang target tahun 2025 adalah 5 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 5 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - Penyediaan perbekalan kesehatan target tahun 2025 adalah 30 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 30 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial target tahun 2025 adalah 38 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 38 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis target tahun 2025 adalah 38 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 38



Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.

- Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Keluarga target tahun 2025 adalah 6 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 6 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar target tahun 2025 adalah 30 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 30 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga target tahun 2025 adalah 18 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 18 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga target tahun 2025 adalah 12 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 12 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
- Layanan rujukan target tahun 2025 adalah 18 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 18 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 100%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti adalah Sebesar 100% sehingga capaian SPM untuk Indikator Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti adalah 80% ditambah 20% yaitu sebesar 100%.

4.6.4.5 Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota

Indikator Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota pada tahun 2025 mendapat capaian 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota.

$$\frac{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana}}{\text{Jumlah Warga Penerima Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana}} \times 100\%$$

Realisasi Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota.

$$\frac{371}{371} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota tahun 2025 capainnya adalah 100%. Capaian penerima layanan memiliki nilai 80% dari total capaian sehingga capaian untuk indikator Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota sebesar 80% dikalikan 100% sehingga hasilnya 80%.

- b. Mutu layanan untuk Indikator Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota
- Penyediaan permakanan target tahun 2025 adalah 10 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 10 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - Penyediaan sandang target tahun 2025 adalah 2 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 2 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - Penyediaan tempat penampungan pengungsi target tahun 2025 adalah 2 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 2 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.
 - Penanganan khusus bagi kelompok rentan target tahun 2025 adalah 1 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 1 Orang dengan capaian 100%



menurut aplikasi e-SPM.

- Pelayanan dukungan Psikososial target tahun 2025 adalah 4 Orang dan realisasi tahun 2025 adalah 4 Orang dengan capaian 100% menurut aplikasi e-SPM.

Dari indikator mutu di atas didapatkan hasil capaian sebesar 100%, dalam perhitungan SPM mutu layanan memiliki nilai 20% sehingga hasil capaian pada mutu layanan Indikator Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota adalah Sebesar 100% sehingga capaian SPM untuk Indikator Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota adalah 80% ditambah 20% yaitu sebesar 100%.

4.6.5 Permasalahan

1. Penerapan 4 tahapan pelaksanaan SPM belum maksimal.
2. Anggaran pemenuhan SPM menggunakan anggaran biaya tidak terduga.
3. Penganggaran untuk memenuhi mutu layanan masih kurang.

Solusi

Perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait berkenaan dengan pendataan penerima layanan dan pemenuhan anggaran untuk pelaksanaan SPM



4.7 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.7.1 URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
								58,409,318,401	47,003,811,490	80.47 %	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412						11,061,549,038	8,967,789,561	81.07 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0051	515,179,800	489,685,116	95.05 %	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011	0	0	0.00 %	
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015	7,484,832,800	7,227,406,326	96.56 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025	8,650,000	8,470,500	97.92 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0030	0	0	0.00 %	
		6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0040	0	0	0.00 %	
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041	1,111,626,438	0	0.00 %	
Kekhususan PAUD											
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0045	0	0	0.00 %	
		2	Pengadaan Alat	Paket	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0	874,957,000	845,846,519	96.67 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				046				
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016	774,950,000	117,382,500	15.15 %	
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017	259,043,000	254,031,700	98.07 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidik an	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023	16,155,000	12,483,450	77.27 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan an	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024	16,155,000	12,483,450	77.27 %	
		7	Sosialisasi dan	Dokume	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0	0	0	0.00 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	n			026				
		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029	0	0	0.00 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				11,061,549,038	8,967,789,561	81.07 %				
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629						13,052,766,252	9,056,134,129	69.38 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan Unit	Unit	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	0	0	0.00 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Sekolah Baru (USB)								
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0054	0	0	0.00 %	
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	97,838,483	71,098,300	72.67 %	
		4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	3,025,651,100	2,649,541,703	87.57 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	169,444,448	114,663,464	67.67 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Baru								
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	738,668,561	519,130,099	70.28 %	
Literasi											
		1	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	2,036,671,510	505,439,685	24.82 %	
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	6,534,764,000	4,942,824,990	75.64 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	22,669,000	22,524,840	99.36 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pendidikan Sekolah Dasar								
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	10,224,000	10,166,760	99.44 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	10,224,000	10,166,760	99.44 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	10,224,000	10,166,760	99.44 %	
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	0.00 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	0.00 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	67,614,150	45,505,068	67.30 %	
Numerasi											
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	0	0	0.00 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama								
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	0	0	0.00%	
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	0	0	0.00%	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSENTASE	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.037	0	0	0.00%	
		5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.041	0	0	0.00%	
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.050	0	0	0.00%	
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.045	0	0	0.00%	
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.055	0	0	0.00%	
		9	Pengembangan	Konten	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0	0	0	0.00%	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			konten digital untuk pendidikan	Digital			036				
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	
Keamanan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	15,165,000	0	0.00 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			s Bidang Pendidikan								
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	313,608,000	154,905,700	49.39 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %	
Kebhinekaan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	0	0	0.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00 %	
Inklusifitas											



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.036	0	0	0.00 %	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.049	0	0	0.00 %	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.028	0	0	0.00 %	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.043	0	0	0.00 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
JUMLAH INDIKATOR					13,052,766,252	9,056,134,129	69.38 %				
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647						10,153,032,266	8,326,603,880	82.01 %	
Angka Partisipasi Sekolah											
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.001	0	0	0.00 %	
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.014	878,968,480	647,642,954	73.68 %	
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.032	0	0	0.00 %	
		4	Koordinasi, Perencanaan	Dokumen	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.051	9,150,000	9,070,500	99.13 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			aan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059	0	0	0.00 %	
		6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0062	5,866,518,510	4,980,726,106	84.90 %	
Literasi											
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	287,747,376	173,239,302	60.21 %	
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	2,857,498,000	2,421,373,900	84.74 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			h Pertama								
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	15,360,000	11,696,400	76.15 %	
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.2.02	1.01.02.2.02.0048	7,680,000	6,861,150	89.34 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.2.02	1.01.02.2.02.0049	7,680,000	6,861,150	89.34 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	7,680,000	6,861,150	89.34 %	
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	0.00 %	
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	120,249,900	62,271,268	51.78 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	
		10	Perlengkapan	Buku	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00	0	0	0.00 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				061				
Numerasi											
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.039	0	0	0.00 %	
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.040	0	0	0.00 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			h Pertama								
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	0	0	0.00 %	
		4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	0.00 %	
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	0.00 %	
		6	Penyenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	0	0	0.00 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00 %	
		8	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Paket	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	0	0	0.00 %	
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00 %	
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00 %	
Keamanan											
		1	Pengembangan	Konten	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.00	0	0	0.00 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			konten digital untuk pendidikan	Digital			049				
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00%	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	94,500,000	0	0.00%	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Keluarga	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00%	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			kekerasan, dan intoleransi								
Kebhinekaan											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00%	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00%	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	0	0	0.00%	
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00%	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
Inklusifitas											
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00%	
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00%	
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	0	0	0.00%	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Sekolah								
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	01.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				10,153,032,266	8,326,603,880	82.01 %				
	4	Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20250805052437						434,590,000	415,811,020	95.68 %	
Angka Partisipasi Sekolah											



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	01.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.001	73,570,000	71,510,300	97.20 %	
		1	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	01.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.002	361,020,000	344,300,720	95.37 %	
JUMLAH INDIKATOR					434,590,00	415,811,02	95.68 %				



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
					0	0					
	5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah K20250807081842						0	0	0.00 %	
Literasi											
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	01.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.005	0	0	0.00 %	
Numerasi											
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	01.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.005	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %				
	JUMLAH PROGRAM				34,701,937,556	26,766,338,590	77.13 %				



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
KEGIATAN LAINNYA											
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA							22,537,214,595	19,804,574,583	88%	
	1	Literasi									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LITERASI LAINYA											
	2	Numerasi									
		01.00						942,891,750	306,461,817	32.50 %	
		02.00						227,274,500	126,436,500	55.63 %	
	3	Inklusifitas									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN INKLUSIFITAS LAINYA											
	4	Kebhinekaan									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN KEBHINEKAAN LAINYA											
	5	Keamanan									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN KEAMANAN LAINYA											
	1	4 2025 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (APS PAUD) 1180742						415,470,200.00	415,167,357.00	99.93 %	
	2	4 2025 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (APS SD) 1180777						582,906,675.00	450,925,427.00	77.36 %	
	3	4 2025 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (APS						1,666,000,000.00	1,423,497,430.00	85.44 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		SD) 1180779									
	4	4 2025 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (APS SD) 1180780						663,74 2,895.00	404,17 9,907.00	60.89 %	
	5	4 2025 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (APS SMP) 1180793						219,89 7,750.00	217,50 0,000.00	98.91 %	
	6	4 2025 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (APS SMP) 1180794						1,751,9 72,962.00	1,325,3 22,269.00	75.65 %	
	7	4 2025 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (APS KESETARAAN) 1180807						2,798,1 33,000.00	1,826,0 40,000.00	65.26 %	
	8	4 2025 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (APS KESETARAAN) 1180808						11,423, 947,200.00	11,278, 787,520.00	98.73 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI ANGGARAN (Rupiah)	PERSentase	AKSI
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	9	4 2025 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan (APS KESETARAAN) 1180809						132,49 4,000.00	109,30 9,963.00	82.5 0 %	
	10	4 2025 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (APS KESETARAAN) 1180810						2,767,9 79,913.00	2,339,4 86,710.00	84.5 2 %	
	11	4 2025 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan (APS KESETARAAN) 1180811						114,67 0,000.00	14,358, 000.00	12.5 2 %	

Sumber: e-SPM K

4.7.2 URUSAN BIDANG KESEHATAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA KEDIRI				25,259,118,734	18,028,779,035	71.38 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				6,379,254,329	5,181,275,957	81.22 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			6,379,254,329	5,181,275,957	81.22 %



N o	PROGRAM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237					
	1.02.02.2.02. 0001	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	856,453,00 0	820,709,76 1	95.83 %
	1.02.02.2.02. 0002	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	115,688,00 0	107,160,24 8	92.63 %
	1.02.02.2.02. 0003	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	569,870,00 0	509,845,63 3	89.47 %
	1.02.02.2.02. 0004	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	663,399,00 0	506,861,91 1	76.40 %
	1.02.02.2.02. 0005	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	370,100,80 0	293,538,82 5	79.31 %
	1.02.02.2.02. 0006	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1,205,411, 000	1,110,012, 613	92.09 %
	1.02.02.2.02. 0007	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	321,450,25 0	276,094,75 0	85.89 %
	1.02.02.2.02. 0008	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	895,609,90 0	738,086,69 0	82.41 %
	1.02.02.2.02. 0009	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes	Orang	525,340,55 0	123,133,28 0	23.44 %



N o	PROGRAM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Melitus				
	1.02.02.2.02. 0010	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	100,356,20 0	54,757,650	54.56 %
	1.02.02.2.02. 0011	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosi s	Orang	423,300,07 9	333,200,86 6	78.72 %
	1.02.02.2.02. 0012	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	332,275,55 0	307,873,73 0	92.66 %
	JUMLAH INDIKATOR				6,379,254, 329	5,181,275, 957	81.22 %
	JUMLAH PROGRAM				6,379,254, 329	5,181,275, 957	81.22 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		01.00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		30,505,000	25,599,000	83.92 %
		02.00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosi s		101,570,00 0	87,714,597	86.36 %



N o	PROGRAM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		03.00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		91,278,500	64,065,883	70.19 %
		04.00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		6,315,370,585	4,540,067,914	71.89 %
		05.00	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Medis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Fasilitas Kesehatan		253,012,310	223,475,380	88.33 %
		06.00	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas		4,845,438,292	2,902,525,167	59.90 %



N o	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Pelayanan				
		07.00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart		5,417,015,000	3,792,430,955	70.01 %
		08.00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1,825,674,718	1,211,624,182	66.37 %

Sumber: e-SPM 2025

4.1 URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

N o	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA KEDIRI				11,812,124,686	8,982,184,974	76.04 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1,412,176,000	1,000,400,390	70.84 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			1,412,176,000	1,000,400,390	70.84 %
	1.03.03.2.01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0002	2	Supervisi pembangunan/peningkatan /perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
	1.03.03.2.01.0003	3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di	Liter/Detik	0	0	0%



N o	PROGR AM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAA N DAN PELAKSANAAN		SER APA N
- 1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			kawasan Perkotaan				
	1.03.03.2 .01.0004	4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0005	5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/D etik	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0006	6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/D etik	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0007	7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0008	8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0009	9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyele nggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0010	10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0011	11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelomp ok Masyar akat	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0012	12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0013	13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0014	14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyele nggara SPAM	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0015	15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0016	16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan	Unit	0	0	0%



N o	PROGR AM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAA N DAN PELAKSANAAN		SER APA N
- 1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Perdesaan				
	1.03.03.2 .01.0017	17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0018	18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0019	19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0020	20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0021	21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0022	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0023	23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lemba ga	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0024	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0025	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokum en	237,500 ,000	226,51 8,990	95.38 %
	1.03.03.2 .01.0026	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/D etik	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0027	27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%



N o	PROGR AM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAA N DAN PELAKSANAAN		SER APA N
- 1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.03.03.2 .01.0028	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/D etik	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0029	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	248,476 ,000	55,172, 000	22.20 %
	1.03.03.2 .01.0030	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0031	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	1.03.03.2 .01.0032	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	926,200 ,000	718,70 9,400	77.60 %
	1.03.03.2 .01.0033	33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,412,1 76,000	1,000,4 00,390	70.84 %
	JUMLAH PROGRAM				1,412,1 76,000	1,000,4 00,390	70.84 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				10,399, 948,686	7,981,7 84,584	76.75 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			10,399, 948,686	7,981,7 84,584	76.75 %
	1.03.05.2 .01.0001	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokum en	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0002	2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan	Dokum en	0	0	0%



No	PROGR AM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAA N DAN PELAKSANAAN		SER APA N
					-6	-7	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota				
	1.03.05.2 .01.0003	3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0004	4	Rehabilitasi/peningkatan/pe rluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0005	5	Rehabilitasi/peningkatan/pe rluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0006	6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0007	7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0008	8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelomp ok Masyar akat	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0009	9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0010	10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0011	11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokum en	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0012	12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala	Rumah Tangga	0	0	0%



N o	PROGR AM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAA N DAN PELAKSANAAN		SER APA N
- 1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			permukiman				
	1.03.05.2 .01.0013	13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0014	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0015	15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Har i	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0016	16	Rehabilitasi/peningkatan/p erluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Har i	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0017	17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokum en	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0018	18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0019	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0020	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Har i	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0021	21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Har i	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0022	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Har i	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0023	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	M ³ /Har i	0	0	0%



N o	PROGR AM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAA N DAN PELAKSANAAN		SER APA N
- 1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				
	1.03.05.2 .01.0024	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0025	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Har i	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0026	26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0027	27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Har i	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0028	28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Har i	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0029	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0030	30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Har i	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0031	31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Har i	5,537,7 76,000	4,820,2 96,100	87.04 %
	1.03.05.2 .01.0032	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah	M ³ /Har i	0	0	0%



N o	PROGR AM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAA N DAN PELAKSANAAN		SER APA N
- 1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				
	1.03.05.2 .01.0033	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0034	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0035	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyele nggara	99,300, 000	44,438, 400	44.75 %
	1.03.05.2 .01.0036	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Har i	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0037	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0038	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	4,440,3 72,686	2,810,9 32,184	63.30 %
	1.03.05.2 .01.0039	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.03.05.2 .01.0040	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	322,500 ,000	306,11 7,900	94.92 %
	1.03.05.2 .01.0041	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokum en	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				10,399, 948,686	7,981,7 84,584	76.75 %
	JUMLAH PROGRAM				10,399, 948,686	7,981,7 84,584	76.75 %



N o	PROGR AM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAA N DAN PELAKSANAAN		SER APA N
- 1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: e-SPM 2025

4.2 URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA KEDIRI				100,000,000	93,278,300	93.28 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				100,000,000	93,278,300	93.28 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			100,000,000	93,278,300	93.28 %
	1.04.02.2.01.0001	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0002	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0003	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0004	4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0005	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program	Dokumen	0	0	0%



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Kabupaten/Kota				
	1.04.02.2.01.0006	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0007	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0008	8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	30,000,000	27,919,300	93.06 %
	1.04.02.2.01.0009	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.01.0010	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	70,000,000	65,359,000	93.37 %
	JUMLAH INDIKATOR				100,000,000	93,278,300	93.28 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			0	0	0.00 %
	1.04.02.2.03.0001	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0002	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0003	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.04.02.2.03.0004	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0005	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0006	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0007	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0008	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0009	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0010	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0011	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	1.04.02.2.03.0012	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	JUMLAH PROGRAM				100,000,000	93,278,300	93.28 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: e-SPM 2025



4.3 URUSAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS

N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA KEDIRI				7,300,252,256	5,981,035,224	81.93 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				5,868,942,500	4,846,741,694	82.58 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			3,684,666,500	3,538,845,749	96.04 %
	1.05.02.2.01.0003	1	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Doku men	128,944,300	128,196,300	99.42 %
	1.05.02.2.01.0004	2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Doku men	36,775,000	34,946,750	95.03 %
	1.05.02.2.01.0005	3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	13,355,800	12,939,300	96.88 %
	1.05.02.2.01.0006	4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan	Doku men	0	0	0%



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum				
	1.05.02.2.01 .0007	5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
	1.05.02.2.01 .0008	6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Doku men	11,900,00 0	11,900,00 0	100.00 %
	1.05.02.2.01 .0009	7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Lapor an	0	0	0%
	1.05.02.2.01 .0010	8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01 .0011	9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan	Doku men	0	0	0%



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					-6	-7	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Fungsional Pol PP				
	1.05.02.2.01.0012	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0013	11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0014	12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
	1.05.02.2.01.0015	13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.02.2.01 .0015	14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Lapor an	3,186,880 ,000	3,054,152 ,400	95.84 %
	1.05.02.2.01 .0016	15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Lapor an	17,660,00 0	17,294,40 0	97.93 %
	1.05.02.2.01 .0016	16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
	1.05.02.2.01 .0017	17	Penyediaan Layanan dasar	Lapor an	4,550,000	0	0%



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				
	1.05.02.2.01 .0018	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Unit	284,601,4 00	279,416,5 99	98.18 %
	JUMLAH INDIKATOR				3,684,666 ,500	3,538,845 ,749	96.04 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			2,162,901 ,000	1,286,520 ,945	59.48 %
	1.05.02.2.02 .0001	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Lapor an	0	0	0%
	1.05.02.2.02 .0002	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Lapor an	0	0	0%
	1.05.02.2.02 .0003	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Lapor an	0	0	0%



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.02.2.02 .0004	4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Lapor an	0	0	0%
	1.05.02.2.02 .0005	5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepal a Daerah	Doku men	15,450,00 0	15,418,00 0	99.79 %
	1.05.02.2.02 .0006	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	810,705,5 02	292,534,5 00	36.08 %
	1.05.02.2.02 .0007	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Lapor an	0	0	0%
	1.05.02.2.02 .0008	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Lapor an	0	0	0%
	1.05.02.2.02 .0009	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak	Doku men	0	0	0%



No	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
					-6	-7	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Peraturan Daerah				
	1.05.02.2.02.0010	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	839,304,000	698,540,301	83.23 %
	1.05.02.2.02.0011	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	493,151,498	276,140,144	55.99 %
	1.05.02.2.02.0012	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	4,290,000	3,888,000	90.63 %
	JUMLAH INDIKATOR				2,162,901,000	1,286,520,945	59.48 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			21,375,000	21,375,000	100.00 %
	1.05.02.2.03.0002	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0003	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	1.05.02.2.03.0004	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	1.05.02.2.03	4	Dukungan	Laporan	0	0	0%



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	.0005		Operasional Sekretariat PPNS	an			
	1.05.02.2.03 .0006	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Lapor an	21,375,000	21,375,000	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				21,375,000	21,375,000	100.00 %
	JUMLAH PROGRAM				5,868,942,500	4,846,741,694	82.58 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				766,364,650	743,161,328	96.97 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			117,747,850	114,944,899	97.62 %
	1.05.03.2.01 .0003	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kot a	Doku men	0	0	0%
	1.05.03.2.01 .0004	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kot a (per jenis bencana)	Orang	117,747,850	114,944,899	97.62 %
	JUMLAH INDIKATOR				117,747,850	114,944,899	97.62 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			312,794,000	308,284,069	98.56 %
	1.05.03.2.02 .0001	1	Penyusunan rencana penanggulanga n bencana Kabupaten/Kot a	Doku men	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0002	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	0	0	0%



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Kabupaten/Kot a				
	1.05.03.2.02 .0003	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kot a	Doku men	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0004	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0005	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawas an	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0006	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawas an	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0007	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kot a	-	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0008	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kot a	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0009	9	Penyusunan rencana kontijensi	Doku men	0	0	0%
	1.05.03.2.02	10	Gladi	Orang	78,594,00	74,977,94	95.40



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	.0010		kesiapsiagaan terhadap bencana		0	0	%
	1.05.03.2.02 .0011	11	Penyusunan rencana penanggulanga n kedaruratan bencana	Doku men	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0012	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kelua rga	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0013	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kot a	Kegiat an	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0014	14	Penyusunan Rencana Penanggulanga n Bencana Kabupaten/Kot a	Doku men	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0015	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0016	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kot a	Kawas an	0	0	0%
	1.05.03.2.02 .0017	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Lapor an	234,200,0 00	233,306,1 29	99.62 %



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Kabupaten/Kot a				
	JUMLAH INDIKATOR				312,794,0 00	308,284,0 69	98.56 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			335,822,8 00	319,932,3 60	95.27 %
	1.05.03.2.03 .0001	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Lapor an	14,952,60 0	14,754,40 0	98.67 %
	1.05.03.2.03 .0002	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kot a	Doku men	305,870,2 00	298,789,1 60	97.68 %
	1.05.03.2.03 .0003	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kot a	Orang	15,000,00 0	6,388,800	42.59 %
	1.05.03.2.03 .0007	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kot a	Doku men	0	0	0%
	1.05.03.2.03 .0008	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kot a	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.03 .0009	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi	Orang	0	0	0%



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					-6	-7	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			korban bencana Kabupaten/Kota				
	1.05.03.2.03.0010	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.03.0011	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				335,822,800	319,932,360	95.27 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			0	0	0.00 %
	1.05.03.2.04.0001	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0002	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0003	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	1.05.03.2.04.0004	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%



No	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
					-6	-7	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.03.2.04 .0005	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraa n penanggulanga n bencana	Lapor an	0	0	0%
	1.05.03.2.04 .0006	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kot a	Doku men	0	0	0%
	1.05.03.2.04 .0007	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulanga n Bencana Kabupaten/Kot a	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04 .0008	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kot a	Orang	0	0	0%
	1.05.03.2.04 .0009	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kot a	Doku men	0	0	0%
	1.05.03.2.04 .0010	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kot a	Doku men	0	0	0%
	1.05.03.2.04 .0011	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana	Lemb aga	0	0	0%



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Kabupaten/Kot a				
	1.05.03.2.04 .0012	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Lapor an	0	0	0%
	1.05.03.2.04 .0013	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Doku men	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				766,364,6 50	743,161,3 28	96.97 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				664,945,1 06	391,132,2 02	58.82 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			651,087,9 06	381,696,1 02	58.62 %
	1.05.04.2.01 .0001	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kot a	Doku men	6,192,900	5,275,100	85.18 %
	1.05.04.2.01 .0002	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kot a	Doku men	177,350,0 00	129,050,0 00	72.77 %



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.04.2.01 .0003	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Lapor an	0	0	0%
	1.05.04.2.01 .0004	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kot a	Doku men	0	0	0%
	1.05.04.2.01 .0005	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulanga n kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	219,859,8 00	219,331,0 00	99.76 %
	1.05.04.2.01 .0007	6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Doku men	18,600,00 0	16,640,00 0	89.46 %
	1.05.04.2.01 .0008	7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
	1.05.04.2.01 .0011	8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulanga nn Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Doku men	0	0	0%
	1.05.04.2.01 .0012	9	Peningkatan kompetensi pejabat	Lapor an	0	0	0%



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran				
	1.05.04.2.01.0013	10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Doku men	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
	1.05.04.2.01.0014	11	Penyelenggaraa n Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Doku men	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
	1.05.04.2.01.0015	12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Doku men	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
	1.05.04.2.01.0016	13	Penyelenggaraa n Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Doku men	<u>0</u>	<u>0</u>	0%
	1.05.04.2.01.0017	14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	<u>229,085,206</u>	<u>11,400,002</u>	4.98 %
	1.05.04.2.01.0018	15	Penyelenggaraa n kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga,	Orang	<u>0</u>	<u>0</u>	0%



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran				
	1.05.04.2.01 .0019	16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Doku men	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				651,087,906	381,696,102	58.62 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			3,520,000	0	0.00 %
	1.05.04.2.02 .0001	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Doku men	1,440,000	0	0%
	1.05.04.2.02 .0002	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Doku men	2,080,000	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				3,520,000	0	0.00 %
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.03 .0001	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Doku men	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			10,337,200	9,436,100	91.28 %
	1.05.04.2.04.0001	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	10,337,200	9,436,100	91.28 %
	1.05.04.2.04.0002	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%
	1.05.04.2.04.0003	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Doku men	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				10,337,200	9,436,100	91.28 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			0	0	0.00 %
	1.05.04.2.05.0001	1	Penyelenggaraa n operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan , dan/atau mengancam keselamatan manusia	Lapor an	0	0	0%



N o	PROGRAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.05.04.2.05 .0002	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyel amatan dan evakuasi	Doku men	0	0	0%
	1.05.04.2.05 .0004	3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyel amatan dan evakuasi	Lapor an	0	0	0%
	JUMLAH PROGRAM				664,945,1 06	391,132,2 02	58.82 %
KEGIATAN LAINNYA							
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: e-SPM 2025



4.4 URUSAN BIDANG SOSIAL

N o	PROGRAM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA KEDIRI				3,022,684,800	2,032,101,584	67.23 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				645,571,800	613,788,584	95.08 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			628,071,800	603,486,334	96.09 %
	1.06.04.2.01.0001	1	Penyediaan permakanaan	Orang	262,555,400	248,797,646	0%
	1.06.04.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	2,000,000	1,824,840	0%
	1.06.04.2.01.0003	3	Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01.0004	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	500	0	0%
	1.06.04.2.01.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	325,526,800	323,354,158	0%
	1.06.04.2.01.0006	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,	Orang	0	0	0%



N o	PROGRAM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			serta gelandanga n pengemis dan masyarakat				
	1.06.04.2.01. 0007	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudu kan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01. 0008	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01. 0009	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01. 0010	10	Pemberian layanan kedarurata n	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01. 0011	11	Pemberian pelayanan penelusura n keluarga	Orang	0	0	0%
	1.06.04.2.01. 0012	12	Pemberian layanan rujukan	Dokum en	37,489,60 0	29,509,69 0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				628,071,8 00	603,486,3 34	96.09 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			17,500,00 0	10,302,25 0	58.87 %



N o	PROGRAM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.06.06.2.01. 0001	1	Penyediaan makanan	Orang	12,500,00 0	6,050,000	48.40 %
	1.06.06.2.01. 0002	2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
	1.06.06.2.01. 0003	3	Penyediaan tempat penampung an pengungsi	Unit	2,000,000	1,400,000	70.00 %
	1.06.06.2.01. 0004	4	Penangana n khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
	1.06.06.2.01. 0005	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	3,000,000	2,852,250	95.08 %
	JUMLAH INDIKATOR				17,500,00 0	10,302,25 0	58.87 %
	JUMLAH PROGRAM				645,571,8 00	613,788,5 84	95.08 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1	Program Perlindung an Dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab./Kota, Sub.Kegiat an Pengelolaan Data Fakir Miskin		1,896,000, 000	937,200,0 00	49.43 %



N o	PROGRAM	KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Cakupan Daerah Kab./Kota (Bansos ODKB, Bansos ABH, Bansos ASLUT)				
		2	BTT		481,113,000	481,113,000	100.00 %

Sumber: e-SPM 2025



BAB V

PENUTUP

Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian kinerja makro, Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan baik urusan wajib dan pilihan, serta capaian kinerja fungsi penunjang Pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan tahun anggaran 2025 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Pencapaian kemajuan-kemajuan tersebut diukur melalui hasil-hasil pembangunan Kota Kediri yang dapat dilihat dan dirasakan baik dalam perspektif pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro dilihat dengan menggunakan indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Pendapatan per Kapita, dan Tingkat Inflasi. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia.

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kediri selama tahun 2025 mencapai kinerja sangat baik. Namun demikian harus disadari pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dalam aspek Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, regulasi maupun anggaran. Meskipun demikian, dengan segala kekurangan tersebut Pemerintah Kota Kediri mampu menunjukkan hasil kinerjanya yaitu dengan memperoleh penghargaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Perolehan penghargaan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, serta seluruh lapisan masyarakat Kota Kediri yang telah memberikan support dan partisipasi konstruktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kediri. Secara rinci, penghargaan yang telah diterima dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.1
Penghargaan Tingkat Nasional dan Provinsi yang diterima oleh
Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025

TAHUN 2025		
NO	Nama Penghargaan	Tingkat
1	Wali Kota Kediri sebagai Tokoh Penguat Demokrasi dalam acara Beritajatim Award 2025	Provinsi
2	Wali Kota Kediri sebagai Tokoh Muda Pemberdaya Masyarakat dari PWI Jawa Timur	Provinsi
3	Wali Kota Kediri sebagai Women in Education Improvement sebagai Scholarships For Underprivileged People sebagai Scholarships For Underprivileged People dalam ajang Women's Inspiration Award 2025	Nasional
4	Penghargaan dari Kantor Regional II BKN Surabaya atas keberhasilan menyelesaikan proses pengadaaaan CASN 2024	Nasional
5	Opini WTP sebelas kali berturut-turut	Provinsi
6	Kota Kediri sebagai salah satu performa terbaik non ranking dalam Karnaval Budaya Light Culture Parade APEKSI 2025	Provinsi
7	Penghargaan Outstanding Young Public Leader Of the Year dalam ajang Indonesia Leading Woman Award	Provinsi
8	Wali Kota Kediri sebagai Kepala Daerah Inovatif kategori Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dalam acara malam Apresiasi 100 Hari Inovasi Untuk Negeri Tahun 2025 dari PT Jawapos Media Televisi (JTV Rek)	Provinsi
9	Penghargaan dari BKN Kanreg 2 peringkat 2 kategori Implementasi Manajemen ASN terbaik (melalui I-Mut).	Se-Wilayah Kerja BKN Kanreg 2
10	Penghargaan dari BKN Kanreg 2 kategori Layanan Penetapan NIP (tanpa peringkat)	Se-Wilayah Kerja BKN Kanreg 2
11	Penghargaan dari BKN Kanreg 2 Komitmen terbaik dalam Penuntasan Disparitas Data Semester I tahun 2025.	Se-Wilayah Kerja BKN Kanreg 2
12	Juara I kategori Zona KHAS/ Wisata Ramah Muslim pada ajang Syariah Award Provinsi Jawa Timur 2025	Provinsi
13	Juara 2 kategori Keuangan Mikro Syariah pada ajang Syariah Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Provinsi
14	Kota Kediri Peringkat 5 dalam 5 besar Kota/ Kabupaten Paling Berkelanjutan di Indonesia pada UI GreenCity Metric 2025	Nasional
15	Wali Kota Kediri Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2025	Nasional
16	Anugerah Program Ekonomi Terpuji kategori Akselerasi Wisata Kota Terintegrasi Detik Awards	Provinsi
17	Kota Kediri Peringkat 2 Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2025	Nasional



18	Kota Kediri mendapat Piagam Penghargaan atas terbentuknya Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di wilayah masing-masing	Provinsi
19	Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025. Kota Kediri berhasil dinobatkan dengan predikat Kota Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.	Nasional

Diharapkan melalui dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Kediri Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Kediri sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD, seluruh *stakeholder*, serta seluruh jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dan seluruh masyarakat Kota Kediri yang telah memberikan dukungan dan kerja keras dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan selama tahun 2025.

Demikian penyampaian LPPD Kota Kediri Tahun 2025 ini, Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala amal dan ikhtiar kita dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Kediri. *Aamiin. YRA.*



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Ampel No.1, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64127
Telp. (0354) 687305, Pos-el inspektorat@kedirikota.go.id
Laman inspektorat.kedirikota.go.id

LAPORAN HASIL REVIU ATAS
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2025

Kepada : Yth. Wali Kota Kediri
Dari : Inspektur Kota Kediri
Tanggal : 30 Maret 2026
Nomor : 700.1.2.8 / 342 / 419.060 / 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Kediri Nomor : 100.3.3.3 / 19 / 419.033 / 2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Tim Penyusun dan Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, dengan hormat dilaporkan hal - hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

A. Dasar Penugasan

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 100.2.7 / 989 / OTDA Tanggal 12 Februari 2026 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025.
7. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 100.3.3.3 / 19 / 419.033 / 2026 tentang Tim Penyusun dan Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
8. Surat Tugas Inspektur Kota Kediri Nomor : 700.1.2 / 263 / 419.060 / 2026 untuk melaksanakan reviu atas dokumen LPPD perangkat daerah yang telah diterima pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kediri.

B. Ruang Lingkup Reviu

- 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - a. Capaian kinerja makro
 - Indeks Pembangunan Manusia
 - Persentase Penduduk Miskin
 - Tingkat Pengangguran Terbuka
 - Pertumbuhan Ekonomi
 - PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 - Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)
 - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
Diukur dari indikator kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - c. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten / kota dari pemerintah pusat dan / atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.
- 3) Capaian kinerja penerapan standar pelayanan minimal
 - a. Capaian penerapan standar pelayanan minimal
 - b. Kendala penerapan standar pelayanan minimal
 - c. Ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

II. Hasil Reviu

A. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika rancangan LPPD

Berdasarkan hasil reviu kami pada dokumen rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kediri Tahun 2025, materi yang disajikan telah sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Kabupaten / Kota Tahun 2025 yang meliputi :

1. Pada BAB I Pendahuluan

- Latar Belakang; 1.1.1. Penjelasan Umum; telah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :
 - a. undang - undang pembentukan daerah;
 - b. data geografis wilayah;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. jumlah kecamatan dan kelurahan;
 - e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
 - f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah, telah memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :
 - a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
 - b. visi dan misi kepala daerah;
 - c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
 - d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.
- 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal, telah memuat hal - hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

2. Pada BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 2.1. Capaian Kinerja Makro



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Capaian kinerja makro telah memuat capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

– 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan telah memuat gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah telah memuat data / informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing - masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data / informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

– 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah telah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat antara lain :

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

3. Pada Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program / kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

- 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota
- Tugas pembantuan dari Kementerian / lembaga yang ditugaskan kepada daerah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

kabupaten / kota.

– 3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja telah memuat target program / kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian / lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen / lembar penugasan.

– 3.1.2 Realisasi

Realisasi telah memuat target program / kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten / kota atas pelaksanaan penugasan.

– 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten / kota.

– 3.2.1 Target Kinerja

Target kinerja telah memuat target program / kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen / lembar penugasan.

– 3.2.2 Realisasi

Realisasi telah memuat target program / kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten / kota atas pelaksanaan penugasan.

– 3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala sudah menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

– 3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut telah berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.

4. Pada Bab IV Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Urusan Pendidikan; Urusan Kesehatan; Urusan Pekerjaan Umum; Urusan Perumahan Rakyat; Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Urusan Sosial dan urusan pada program serta kegiatan lainnya telah memuat antara lain :

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Jenis pelayanan dasar telah memuat jenis - jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian telah memuat target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

4.1.3. Realisasi

Realisasi telah memuat target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran telah memuat jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil telah menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

5. Penyajian Capaian Kinerja Makro

Penyajian capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro yang disajikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	81,88	82,71	1,013
2	Persentase Penduduk Miskin	6,51	6,04	-7,219
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,91	3,76	-3,836

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,43	1,74	-49,271
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	565,84	581,57	2,779
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,337	0,334	-0,890

6. Penyajian Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan :
Materi yang disajikan pada IKK Keluaran, IKK Hasil dan IKK untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2025.
7. Sedangkan untuk sistematika penyusunannya sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.1.1. Penjelasan Umum
 - 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 2.1 Capaian Kinerja Makro
- 2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia
 - 2.1.2. Persentase Penduduk Miskin
 - 2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.5. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 - 2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)
- 2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
- 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran
 - 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil
 - 2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
- 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Kediri
- 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Kediri
- 3.3. Permasalahan Dan Kendala

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- 4.1. Urusan Pendidikan
 - 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah
 - 4.1.3. Realisasi
 - 4.1.4. Alokasi Anggaran
 - 4.1.5. Dukungan Personil
 - 4.1.6. Permasalahan dan Solusi
- 4.2. Urusan Kesehatan
 - 4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah
 - 4.2.3. Realisasi
 - 4.2.4. Alokasi Anggaran
 - 4.2.5. Dukungan Personil
 - 4.2.6. Permasalahan dan Solusi
- 4.3. Urusan Pekerjaan Umum
 - 4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah
 - 4.3.3. Realisasi
 - 4.3.4. Alokasi Anggaran
 - 4.3.5. Dukungan Personil
 - 4.3.6. Permasalahan dan Solusi
- 4.4. Urusan Perumahan Rakyat
 - 4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah
 - 4.4.3. Realisasi
 - 4.4.4. Alokasi Anggaran
 - 4.4.5. Dukungan Personil
 - 4.4.6. Permasalahan dan Solusi
- 4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- 4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar
- 4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah
- 4.5.3. Realisasi
- 4.5.4. Alokasi Anggaran
- 4.5.5. Dukungan Personil
- 4.5.6. Permasalahan dan Solusi
- 4.6. Urusan Sosial
 - 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah
 - 4.6.3. Realisasi
 - 4.6.4. Alokasi Anggaran
 - 4.6.5. Dukungan Personil
 - 4.6.6. Permasalahan dan Solusi
- 4.7. Program Dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa materi dan sistematika pada rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2025.

B. Pencermatan data dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

- a. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan
- b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap kesesuaian sumber data, penghitungan dan format data pendukung pembilang dan penyebut IKK didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APIP
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	8324	8750	95,1314286	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APiP
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	42605	42605	100	Disetujui
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	687	687	100	Disetujui
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	385	829	46,4414958	Disetujui
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	771	1545	49,9029126	Disetujui
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	1	3292	0,0303767	Disetujui
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	680	14764	4,6057979	Disetujui
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3315	3626	91,4230557	Disetujui
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3277	3626	90,3750689	Disetujui
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3239	3606	89,822518	Disetujui
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	15838	16438	96,3499209	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APiP
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	39068	39068	100	Disetujui
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	180244	194466	92,68663 93	Disetujui
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	37576	37576	100	Disetujui
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	23001	23001	100	Disetujui
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	10196	10196	100	Disetujui
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	572	572	100	Disetujui
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	7428	7428	100	Disetujui
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	6628	6628	100	Disetujui
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1186	1649,72	71,89098 76	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APIP
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	353747	389998	90,7048241	Disetujui
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	86636	107601	80,5159803	Disetujui
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	86636	86636	100	Disetujui
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	0	1	-	Disetujui
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	1	-	Disetujui
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	235	235	100	Disetujui
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	0	1	-	Disetujui
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	118	228	51,754386	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APIP
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	72	174	41,3793103	Disetujui
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	1	1	100	Disetujui
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	100	100	100	Disetujui
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	181	1180	15,3389831	Disetujui
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	0	1	-	Disetujui
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	1	3	33,3333333	Disetujui
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	1,458	1,458	100	Disetujui
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	25	29	86,2068966	Disetujui
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	1,897	1,897	100	Disetujui
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	17	17	100	Disetujui
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	56	67	83,5820896	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APIP
		kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap					
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	371	371	100	Disetujui
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	90	90	100	Disetujui
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	581	581	100	Disetujui
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	120	120	100	Disetujui
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	10	10	100	Disetujui
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	35169	35169	100	Disetujui

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APIP
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	6	7	86	Disetujui
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	126	481	26	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APIP
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	10.999	11.000	100	Disetujui
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	38	38	100	Disetujui
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	12	12	100	Disetujui
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	77.984	77.999	100	Belum dapat menyajikan Sumber Data IKK 2.f.1 sesuai Pedoman penyusunan LPPD.
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	72.573	73.685	98	Belum dapat menyajikan Data Pendukung Penyebut IKK 2.f.2 sesuai Pedoman penyusunan LPPD.
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	2	2	100	Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.f.3 belum sesuai pedoman penyusunan LPPD Tahun 2025
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	227.676	228.335	100	Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.f.4 dan Format Data Pendukung Penyebut IKK 2.f.4 belum sesuai pedoman penyusunan LPPD Tahun 2025
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	35.880	35.880	100	Data Pendukung Pembilang dan Penyebut, serta Sumber Data b IKK 2.f.5 yang disajikan belum sesuai Pedoman penyusunan LPPD.
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	131.718	137.903	96	Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.f.6, serta Format Sumber Data IKK 2.f.6 belum sesuai Pedoman penyusunan LPPD.
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	8.849	9.412	94	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APIP
2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	0	1	-	Disetujui
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	0	1	-	Disetujui
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	0	1	-	Disetujui
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	459.683	514.406	-11	Disetujui
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	8.963	10.322	87	Disetujui
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	1.663.269.071.724	1.546.144.068.979	8	Belum menyajikan Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.l.1 Rekapitulasi Investasi Tahun N dan Tahun N-1, Data Pendukung Pembilang IKK 2.l.1 Rincian Investasi PMDN Tahun N, Data Pendukung Pembilang IKK 2.l.1 Rincian Investasi PMA Tahun N, Data Pendukung Penyebut IKK 2.l.1 Rincian Investasi PMDN Tahun N-1, Data Pendukung Pembilang IKK 2.l.1 Rincian Investasi PMA Tahun N-1 sesuai Pedoman penyusunan LPPD.
2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	1.663.269.071.724	633.800.000.000	262	Belum menyajikan Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.l.2 Rekapitulasi Investasi Tahun N, Data Pendukung Pembilang IKK 2.l.2 Rincian Realisasi Investasi PMDN Tahun N, Data Pendukung Pembilang IKK 2.l.2 Rincian Realisasi Investasi PMA Tahun N, data Pendukung Penyebut IKK 2.l.2 Target Investasi PMDN Tahun N, Data Pendukung Penyebut IKK 2.l.2 Target Investasi PMA Tahun N sesuai Pedoman penyusunan LPPD.

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APIP
2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	3	18	16,67	Disetujui
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	4.622	49.685	9	Disetujui
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	207	847	24	Disetujui
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	198	207	96	Disetujui
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	14	14	100	Disetujui
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	11.649	9.385	24	Disetujui

3. Urusan Pilihan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APIP
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	14	-	14	Disetujui
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	193	1	19.310	Disetujui
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	Realisasi investasi Tahun N	167.029.097.607	627.640.168.473	26,61	Data Dukung belum sesuai
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	765	440	74	Disetujui
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	1.893.765	1.721.197	10	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APIP
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	16.171	19.316	-16	Disetujui
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	2.269	4.305	-47	Disetujui
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	4	4	4	Disetujui
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	39	39	100	Disetujui
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera ulang di wilayah kab/kota	8	10	75	Disetujui
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	-	66	-	66	Disetujui
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	179	19.713	1	Disetujui
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	19.713	18.066	9	Disetujui
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	94.314.549.221	1.182.386.223.070	8	Disetujui

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRfE

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APIP
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17	17	100	Disetujui
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	404.641.067.118	1.863.073.120.324	21,7190116	Disetujui
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	466.345.750.554	1.563.757.705.197	29,8221233	Disetujui
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	909.241.562.625	1.439.887.217.270	63,1467209	Disetujui
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	667.469.259.212	1.863.073.120.324	35,8262514	Format Data Pendukung Pembilang IKK 4.b.4 belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1437	2107	68,201234	Disetujui
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	150	150	100	Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 4.d dan Format Rincian Data Pendukung IKK 4.d belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	2	-	2	Disetujui
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	3	-	3	Disetujui
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	2	-	2	Disetujui
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	26	36	72,2222222	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian (%)	Status Reviu APIP
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	35,56	-	35,56	Disetujui
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	19,47	-	19,47	Disetujui
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	23,75	-	23,75	Disetujui
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1	-	1	Format Data Pendukung IKK 4.g.1 belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	6	6	100	Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 4.g.2 belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	93,84	-	93,84	Disetujui

Dari hasil reviu pada Indikator Kinerja Kunci per bidang urusan pemerintahan tersebut diatas masih terdapat catatan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar
- IKK 2.f.1 Persentase akta kelahiran yang diterbitkan terdapat catatan yaitu Belum dapat menyajikan Sumber Data IKK 2.f.1 sesuai Pedoman penyusunan LPPD.

– IKK 2.f.2 Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) terdapat catatan yaitu Belum dapat menyajikan Data Pendukung Penyebut IKK 2.f.2 sesuai Pedoman penyusunan LPPD.

– IKK 2.f.3 Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.f.3 belum sesuai pedoman penyusunan LPPD Tahun 2025.

– IKK 2.f.4 Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.f.4 dan Format Data Pendukung Penyebut belum sesuai pedoman penyusunan LPPD Tahun 2025.

– IKK 2.f.5 Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan terdapat catatan yaitu Data Pendukung Pembilang dan Penyebut, serta Sumber Data b IKK 2.f.5 yang disajikan belum sesuai Pedoman penyusunan LPPD.

– IKK 2.f.6 Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.f.6, serta Format Sumber Data IKK 2.f.6 belum sesuai Pedoman penyusunan LPPD.

- IKK 2.I.1 Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota terdapat catatan yaitu Belum menyajikan Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.I.1 Rekapitulasi Investasi Tahun N dan Tahun N-1, Data Pendukung Pembilang IKK 2.I.1 Rincian Investasi PMDN Tahun N, Data Pendukung Pembilang IKK 2.I.1 Rincian Investasi PMA Tahun N, Data Pendukung Penyebut IKK 2.I.1 Rincian Investasi PMDN Tahun N-1, Data Pendukung Pembilang IKK 2.I.1 Rincian Investasi PMA Tahun N-1 sesuai Pedoman penyusunan LPPD.
- IKK 2.I.2 Realisasi total terhadap target investasi terdapat catatan yaitu Belum menyajikan Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.I.2 Rekapitulasi Investasi Tahun N, Data Pendukung Pembilang IKK 2.I.2 Rincian Realisasi Investasi PMDN Tahun N, Data Pendukung Pembilang IKK 2.I.2 Rincian Realisasi Investasi PMA Tahun N, data Pendukung Penyebut IKK 2.I.2 Target Investasi PMDN Tahun N, Data Pendukung Penyebut IKK 2.I.2 Target Investasi PMA Tahun N sesuai Pedoman penyusunan LPPD.

2. Urusan Pilihan

- IKK 3.b.1 Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum terdapat catatan yaitu Belum isi Data Dukung.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

- IKK 4.b.4 Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung Pembilang IKK 4.b.4 belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.
- IKK 4.d Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 4.d dan Format Rincian Data Pendukung IKK 4.d belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.
- IKK 4.g.1 Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung IKK 4.g.1 belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.
- IKK 4.g.2 Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 4.g.2 belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.

III. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Dari hasil revidi sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa rancangan penyusunan LPPD Kota Kediri Tahun 2025 pada prinsipnya secara umum dapat diyakini sistematis dan isi materinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025. Informasi dalam dokumen LPPD Kota Kediri Tahun 2025 telah didukung dengan bukti sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu disempurnakan yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

- IKK 2.f.1 Persentase akta kelahiran yang diterbitkan terdapat catatan yaitu Belum dapat menyajikan Sumber Data IKK 2.f.1 sesuai Pedoman penyusunan LPPD.
- IKK 2.f.2 Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) terdapat catatan yaitu Belum dapat menyajikan Data Pendukung Penyebut IKK 2.f.2 sesuai Pedoman penyusunan LPPD.
- IKK 2.f.3 Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.f.3 belum sesuai pedoman penyusunan LPPD Tahun 2025.
- IKK 2.f.4 Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung Pembilang IKK 2.f.4 dan Format Data Pendukung Penyebut IKK 2.f.4 belum sesuai pedoman penyusunan LPPD Tahun 2025.
- IKK 2.f.5 Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan terdapat catatan yaitu Data Pendukung Pembilang dan Penyebut, serta Sumber Data b IKK 2.f.5 yang disajikan belum sesuai Pedoman penyusunan LPPD.
- IKK 2.f.6 Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.f.6, serta Format Sumber Data IKK 2.f.6 belum sesuai Pedoman penyusunan LPPD.
- IKK 2.l.1 Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota terdapat catatan yaitu Belum menyajikan Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.l.1 Rekapitulasi Investasi Tahun N dan Tahun N-1, Data Pendukung Pembilang IKK 2.l.1 Rincian Investasi PMDN Tahun N, Data Pendukung Pembilang IKK 2.l.1 Rincian Investasi PMA Tahun N, Data Pendukung Penyebut IKK 2.l.1 Rincian Investasi PMDN Tahun N-1, Data Pendukung Pembilang IKK 2.l.1 Rincian Investasi PMA Tahun N-1 sesuai Pedoman penyusunan LPPD.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- IKK 2.I.2 Realisasi total terhadap target investasi terdapat catatan yaitu Belum menyajikan Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 2.I.2 Rekapitulasi Investasi Tahun N, Data Pendukung Pembilang IKK 2.I.2 Rincian Realisasi Investasi PMDN Tahun N, Data Pendukung Pembilang IKK 2.I.2 Rincian Realisasi Investasi PMA Tahun N, data Pendukung Penyebut IKK 2.I.2 Target Investasi PMDN Tahun N, Data Pendukung Penyebut IKK 2.I.2 Target Investasi PMA Tahun N sesuai Pedoman penyusunan LPPD.

2. Urusan Pilihan

- IKK 3.b.1 Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum terdapat catatan yaitu Belum isi Data Dukung.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

- IKK 4.b.4 Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung Pembilang IKK 4.b.4 belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.
- IKK 4.d Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 4.d dan Format Rincian Data Pendukung IKK 4.d belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.
- IKK 4.g.1 Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung IKK 4.g.1 belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.
- IKK 4.g.2 Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N terdapat catatan yaitu Format Data Pendukung Pembilang dan Penyebut IKK 4.g.2 belum sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD.

B. Saran

Dari simpulan tersebut di atas kami memberikan saran kepada Tim Penyusun LPPD Kota Kediri agar segera menyempurnakan penyusunan rancangan LPPD Tahun 2025 untuk disajikan sesuai Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

IV. Penutup

Kami menghargai upaya Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri beserta Tim Penyusun LPPD dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Selanjutnya agar dokumen LPPD Tahun 2025 segera diselesaikan dan disajikan sesuai Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025.

Demikian hasil revidi ini kami sampaikan.

Plt. INSPEKTUR KOTA KEDIRI



Edi Darmasto, S.E., Ak., CA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660511 198803 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kediri
